



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah rencana kerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2017 dipergunakan sebagai:

- a. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; dan
- b. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2017.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2017 memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. program prioritas pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

(2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
- BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan
- BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- BAB VI Penutup

(3) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 5

RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah dalam hal terjadi:

- a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
- c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Agustus 2016

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Agustus 2016

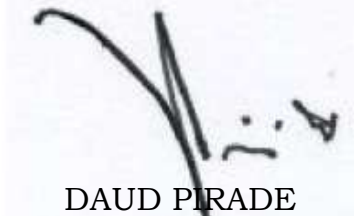
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DAUD PIRADE', is written over a light blue rectangular stamp or background.

DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Daerah telah menyusun dokumen RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 dan RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016. RPJMD Kota Balikpapan Tahap I (2006-2011) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006, sedangkan RPJMD Tahap II (2011-2016) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

Pasca Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan tanggal 9 Desember 2015 dan setelah ditetapkannya Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Balikpapan Periode 2016-2021, Pemerintah Daerah telah mempersiapkan rumusan rancangan awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 bahwa penyusunan RKPD 2017 memperhatikan rancangan awal RPJMD periode 2016-2021.

Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang memuat visi, misi dan program prioritas Walikota terpilih dan rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Walikota terpilih yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017 ini merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD 2017-2021.

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan

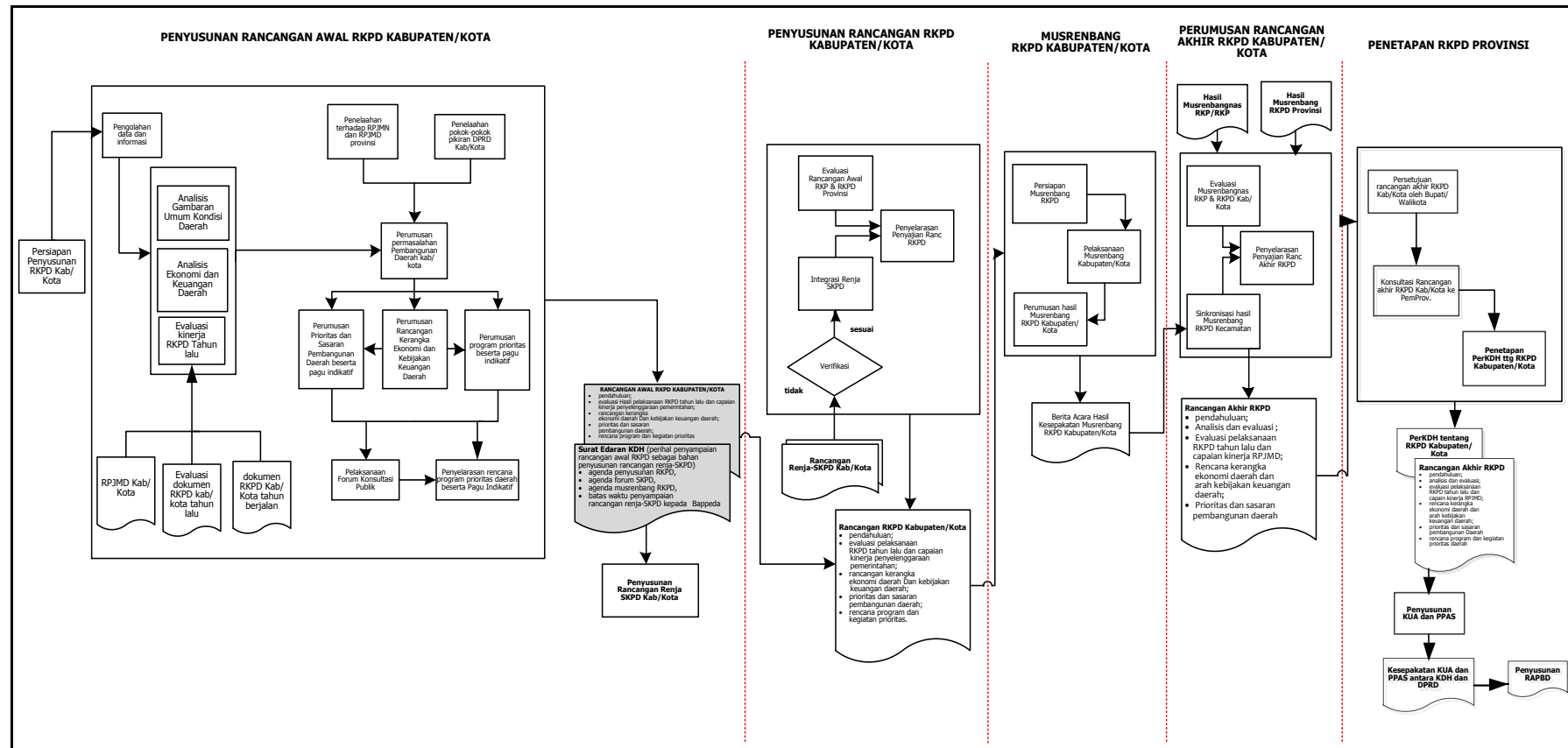
Renja SKPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2017, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program dan Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja-SKPD terkait.

Gambar 1.1

Proses perumusan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana gambar bagan sebagai berikut:



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Rancangan awal RKPD kota yang berpedoman pada RPJMD kota tersebut juga mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD tahun 2017 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Tahun 2011-2016, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018, serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, yaitu sebagai berikut:

- 1) RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai Lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yaitu: Buku I dengan judul: "Agenda Pembangunan Nasional", Buku II dengan judul: "Agenda Pembangunan Bidang", dan Buku III dengan judul: "Agenda Pembangunan Wilayah".

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan, khususnya dalam menjabarkan program sektoral dan program kewilayahan/regional.

2) RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014. Berdasarkan RPJMD tersebut pembangunan Kota Balikpapan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan diantaranya:

- a. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2017, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD tahun 2015 dan mengacu Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 bagi Kabupaten/Kota;
- b. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2018, tahun 2017 merupakan Tahun keempat dari tahapan Mewujudkan Kalimantan Timur sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agro industri dan energi ramah lingkungan.

3) RPJMD Kota Balikpapan

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dan seiring dengan akan berakhirnya periode kepemimpinan Walikota Balikpapan 2011-2016, maka Pemerintah Kota Balikpapan akan menyusun Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016-2021. Rancangan awal tersebut memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih untuk periode perencanaan 5 tahunan.

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021. Tema dasar pada perencanaan tahun 2017 tersebut adalah PEMANTAPAN KUALITAS SUMBER

DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING KOTA BALIKPAPAN.

4) RENJA – SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017 sebagai bahan untuk penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2017, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2017, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2017;
- b. mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2011-2016, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- e. memasukan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

1.4. Sistematika RKPD

Sistematika RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

PERATURAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 yang menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan

dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Kota Balikpapan, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

LAMPIRAN

1.5. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RKPD Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk:

- a. menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017;
- b. sebagai pedoman Penyusunan Renja SKPD Tahun 2017.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sejarah Kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan Minyak yaitu lebih tepatnya dengan sumur minyak Mathilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak JH Menten dan Firma Samuel and Co sebagai pemenang hak konsesi pengeboran di yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak Balikpapan dari Kesultanan Kutai.

Seiring dengan berkembangnya waktu Balikpapan telah berkembang menjadi "Kota Minyak" dengan besarnya produksi minyak sebesar 260 ribu barel per hari. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun Saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi Kota Minyak yang berorientasi pada pengeboran melainkan pada jasa pengolahan minyak yang telah mengolah minyak mentah dari sekitar Balikpapan, yaitu Sepingga, Handil, Bekapai, Sanga-sanga, Tarakan, Bunyu dan Tanjung serta minyak mentah yang diimpor dari negara lain.

Gambar 2.1
Posisi Strategis Kota Balikpapan



Sumber : RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

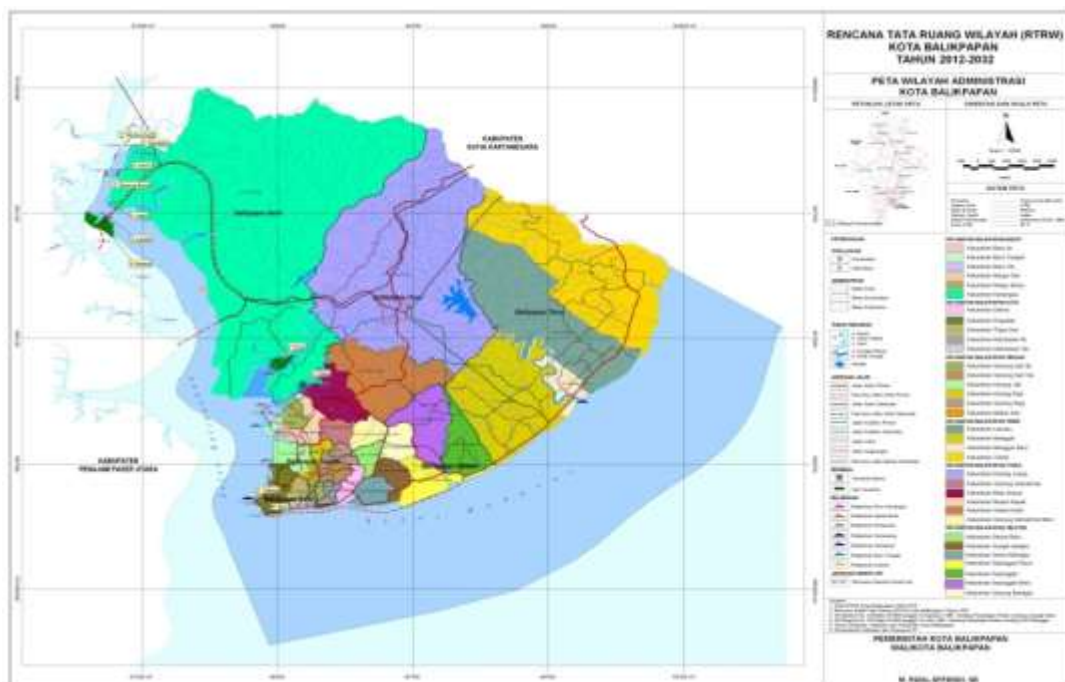
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut RTRW Tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Timur, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Administrasi Kelurahan Kota Balikpapan



Sumber : RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 20.090,57 ha atau 51,66 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 17.260 ha atau 34,17% dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian)

No	Ketinggian mdpl	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13,86
2.	>10-20	17.260,00	34,29
3.	>20-100	26.090,57	51,85
Jumlah		50.330,57	100,00

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 42,33% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

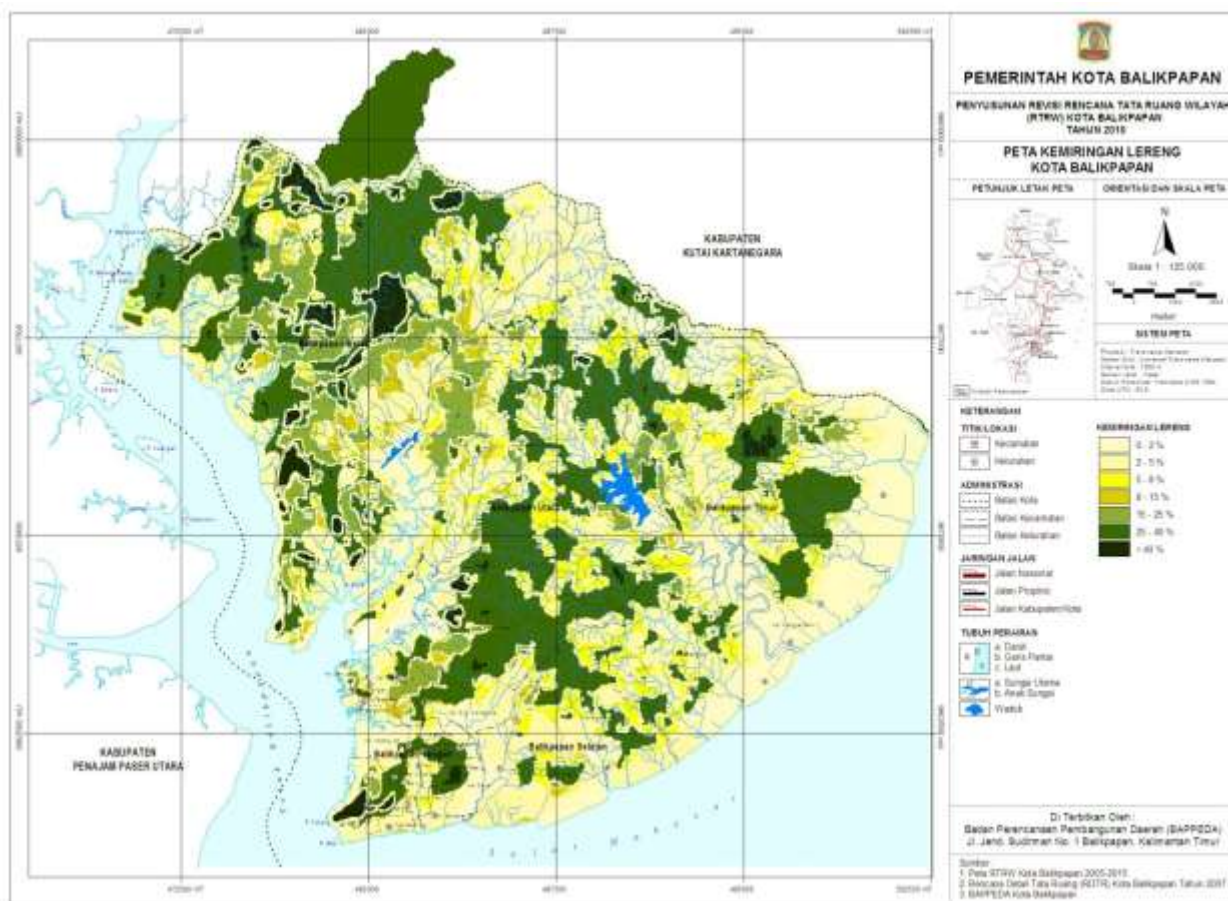
Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	14.01
2	> 2-15	3.325,00	6.61
3	> 15-40	21.305,57	42.33
4	> 40	18.650,00	37.05
Jumlah		50.330,57	100,00

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Untuk mengetahui kondisi kelerengan Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi kelerengan Kota Balikpapan dalam bentuk peta kelerengan (gambar 2.3).

Gambar 2.3
Peta Kelereng Kota Balikpapan



Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Perkembangan penduduk di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan rata-rata 21.088 jiwa setiap tahun. Pada tahun jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 639.031 jiwa mengalami penurunan sebanyak 3.832 jiwa menjadi sebanyak 635.199 jiwa pada tahun 2012 dengan angka pertumbuhan -0,60%. Penurunan ini terjadi karena masih berlakunya sistem manajemen kependudukan yang mensyaratkan penyerahan dana jaminan bagi penduduk pendatang yang belum memiliki pekerjaan tetap. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka manajemen kependudukan tersebut tidak dapat diberlakukan dan berdampak pada peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 menjadi 669.685 jiwa atau bertambah 34.486 jiwa dengan angka pertumbuhan 5,29%. Angka pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 meningkat menjadi 5,34% dengan jumlah penduduk sebanyak 706.414 jiwa. Pada tahun 2015 pertumbuhan penduduk menurun menjadi 4,21% akan tetapi jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 736.807 jiwa atau bertambah 30.393 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel. 2.3**Angka pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Jumlah Penduduk (WNI dan WNA)	Pt/PO(x)	Angka Pertumbuhan Penduduk
2011	639.031	1,0396	3,96%
2012	635.199	0,994	-0,60%
2013	669.685	1,054	5,29%
2014	706.414	1,055	5,34%
2015	736.807	1,043	4,21%

Sumber data Disdukcapil 2016

Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 503,3 km² sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2015 adalah 1.140 jiwa per km². Sebaran penduduk terbesar terjadi di Kecamatan Balikpapan Selatan sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Balikpapan Barat.

Adapun rincian jumlah dan komposisi penduduk Kota Balikpapan dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4**Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2015**

KECAMATAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH (JIWA)	KEPADATAN/ Km ²
BALIKPAPAN SELATAN	37.595	154.436	408,77
BALIKPAPAN KOTA	10.743	102.306	71,26
BALIKPAPAN BARAT	180.637	107.062	5,79
BALIKPAPAN TIMUR	130.696	86.819	6,17
BALIKPAPAN TENGAH	10.766	122.103	108,22
BALIKPAPAN UTARA	132.868	164.081	11,72
JUMLAH	503.305	736.807	1140,35

Sumber Data : Disdukcapil Tahun 2016

Berdasarkan struktur usia kependudukan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan dari semua kelompok umur. Untuk kelompok umur 0-4 tahun terjadi peningkatan lebih dari 100% dari tahun 2013 sebanyak 48.221 jiwa menjadi 99.589 jiwa pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menurun sangat signifikan menjadi 59.797 jiwa. Rasio ketergantungan muda untuk Kota Balikpapan sebesar 36,07% sedangkan rasio ketergantungan tua sebesar 4,11% dengan total rasio 40,19% yang artinya setiap 100 penduduk

usia produktif di Kota Balikpapan mempunyai tanggungan sekitar 40-41 penduduk usia non produktif.

Tabel. 2.5

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 2011 – 2015 (tanpa WNA)

Kelompok Umur	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
0 – 4	44.794	35.224	48.221	99.589	59.797
5 – 9	56.657	57.588	60.751	64.021	67.296
10 – 14	54.923	56.493	58.779	61.338	62.249
15 – 19	50.551	52.003	54.397	56.785	59.169
20 – 24	54.529	53.637	55.803	58.613	61.927
25 – 29	69.030	65.324	64.647	65.392	65.921
30 – 34	71.954	71.948	72.937	74.942	75.164
35 – 39	62.548	62.482	64.157	68.007	71.325
40 – 44	49.609	51.933	53.389	55.991	58.629
45 – 49	40.722	40.419	42.223	45.103	46.763
50 – 54	31.387	33.016	33.943	35.582	37.705
55 – 59	23.253	23.867	25.302	26.613	28.991
60 – 64	12.878	14.681	15.975	17.947	19.298
65 +	16.196	16.584	17.546	19.335	21.616
Jumlah	639.031	635.199	668.070	704.371	735.850

Sumber Data Disdukcapil 2016

Berdasarkan jenis pekerjaan, struktur penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2015 terbanyak adalah belum bekerja dan pelajar/mahasiswa sebesar 64,95% dan 35,05% bekerja dalam berbagai bidang. Penduduk terbesar bekerja sebagai karyawan sebanyak 19,15% dan yang terkecil penduduk bekerja sebagai tukang yaitu 0,17%.

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Kecamatan						%
	Balikpapan Barat	Balikpapan Utara	Balikpapan Timur	Balikpapan Tengah	Balikpapan Kota	Balikpapan Selatan	
Belum Bekerja	53.397	76.124	46.480	50.319	44.500	71.176	46,42
Pelajar/ Mahasiswa	18.869	30.509	13.068	24.464	19.781	29.871	18,53
PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	1.624	5.478	1.888	2.955	4.190	5.764	2,97
Karyawan	15.511	30.483	11.904	29.440	21.601	32.190	19,15
Buruh	7.970	6.695	4.051	5.659	3.892	5.250	4,55
Tukang	202	328	145	297	113	147	0,17
Pedagang	3.411	1.935	1.259	2.259	2.413	1.717	1,76
Petani	259	2.148	2.470	125	58	632	0,77
Profesi	252	754	211	378	193	345	0,29
Edukasi	617	1.588	633	1.058	783	1.124	0,79
Medis	151	622	125	355	422	579	0,31
Lain-Lain	4.784	7.316	4.349	4.609	4.193	5.388	4,16
Pekerja Asing (WNA)	15	101	236	185	167	253	0,13
JUMLAH	107.062	164.081	86.819	122.103	102.306	154.436	736.807

Sumber Data Disdukcapil 2016

Komposisi penduduk sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menurut tingkat pendidikan di Kota Balikpapan terbanyak adalah lulusan SLTA/ sederajat dan yang paling rendah pada tingkat tidak/ belum tamat SD.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2010-2015

Pendidikan	Tahun					%
	2011	2012	2013	2014	2015	
Tidak/Belum Sekolah	126,131	124,940	138,084	146,840	151,358	20.54
Tidak/Belum Tamat SD	-	13,865	24,514	43,129	45,862	6.22
Tamat SD	148,908	140,452	132,928	129,226	124,866	16.95
Tamat SLTP	90,209	94,170	96,521	100,021	102,951	13.97
Tamat SLTA	196,037	202,964	212,525	226,850	239,643	32.52
Tamat Perguruan Tinggi	58,554	61,057	42,480	67,305	72,127	9.79
Jumlah	619,839	637,448	647,052	713,371	736,807	100.00

Sumber Data : Disdukcapil 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/ sektor dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. (PDRB tahun dasar 2010).

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada harga tahun yang sedang berjalan. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah berdasarkan harga tetap di satu tahun dasar. PDRB Atas Dasar Harga

Konstan menjadi dasar perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Balikpapan tahun 2011-2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

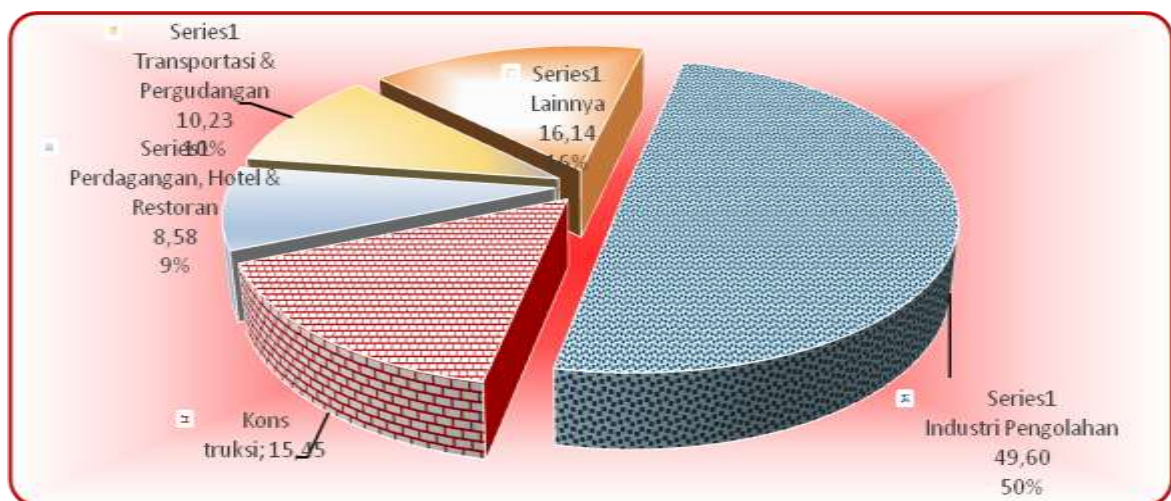
Tabel 2.8
PDRB Kota Balikpapan Tahun 2011-2014
(Dalam Juta Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014
1	PERTANIAN	635,819.66	666,155.35	702,201.86	717,112.50
2	PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN	31,846.42	34,508.35	36,307.26	38,485.30
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	31,226,758.05	29,304,522.76	31,609,548.56	35,522,367.71
4	PENGADAAN LISTRIK, GAS	29,795.08	32,242.22	31,400.69	34,263.41
5	PENGADAAN AIR	46,739.94	50,087.85	53,356.19	56,136.48
6	KONSTRUKSI	8,049,530.85	9,215,878.81	10,047,379.38	11,063,981.24
7	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	5,071,179.42	5,449,859.65	5,823,638.52	6,141,387.23
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	4,466,908.41	5,236,593.49	6,196,444.39	7,329,320.68
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	796,036.31	966,274.22	1,050,372.30	1,145,895.73
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1,653,433.98	1,887,838.04	2,110,249.69	2,322,258.79
11	JASA KEUANGAN	1,873,535.05	2,268,766.71	2,706,863.68	2,866,338.24
12	REAL ESTATE	985,136.03	1,094,142.36	1,206,327.83	1,347,167.75
13	JASA PERUSAHAAN	182,629.53	205,523.38	224,919.01	255,215.94
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	906,507.31	895,688.42	926,551.44	988,155.35
15	JASA PENDIDIKAN	515,000.03	659,047.58	816,784.45	962,352.86
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	310,376.10	332,643.69	345,899.03	381,282.75
17	JASA LAINNYA	394,226.33	395,873.27	398,021.13	444,102.53
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	57,175,458.48	58,695,646.16	64,286,265.40	71,615,824.50

Sumber data : BPS Kota Balikpapan

Gambar 2.4

Grafik Kontribusi Sektoral PDRB Kota Balikpapan tahun 2014



Sumber : BPS Kota Balikpapan

Sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan kontribusi yang besar bagi total pertumbuhan PDRB Kota Balikpapan periode 2011-2014, dimana sektor industri pengolahan pada PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar 49,60 % diikuti sektor Konstruksi sebesar 15,45 %. Terjadi peningkatan nilai PDRB pada sektor Konstruksi dari tahun 2011 - 2014 salah satunya ditunjang oleh pesatnya pembangunan properti oleh investor dan proyek pembangunan kembali/perluasan bandara internasional sepinggan. Pertumbuhan kedua sektor ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi di Kota Balikpapan.

Adapun kontribusi sektor terbesar kedua periode 2013-2014 disumbangkan oleh sektor Transportasi dan Pergudangan yang selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2014 adalah sebesar 10,23 % dari total PDRB. Peningkatan nilai PDRB dari tahun 2011 - 2014 juga terjadi pada sektor Kontribusi perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan sektor unggulan Kota Balikpapan dan makin menguatkan peran Kota Balikpapan sebagai kota jasa dan perdagangan. Pada tahun 2014 Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Balikpapan adalah sebesar 8,58 %.

Dinamika perekonomian yang berkembang saat ini di Kota Balikpapan ialah ekonomi yang berfokus pada industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Berkembangnya industri di Kota Balikpapan tidak lepas dari peran kota sebagai pendukung industri berbasis pertambangan minyak, gas dan batubara serta menjadi salah satu faktor yang memperkuat sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa sebagai potensi unggulan daerah di Kota Balikpapan.

Pariwisata juga merupakan andalan sektor jasa dimana posisi kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dengan kekhasan budaya dan adat istiadatnya menjadi potensi daya tarik wisata yang tinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kota Balikpapan.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Balikpapan Tahun 2011-2014

No	LAPANGAN USAHA	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	PERTANIAN	4.82	1.96	2.48	3.06
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	6.42	6.43	1.43	2.41
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	1.63	4.56	1.45	4.40
4	PENGADAAN LISTRIK, GAS	15.27	14.66	3.33	16.53
5	PENGADAAN AIR	-10.08	5.67	4.34	1.84
6	KONTRUKSI	7.78	4.94	4.39	3.85
7	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	11.97	5.69	5.48	3.54
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	9.85	7.81	7.15	6.83
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	4.60	10.75	4.11	4.76
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12.86	13.24	12.25	9.55
11	JASA KEUANGAN	5.29	11.71	15.27	2.02
12	REAL ESTATE	4.64	6.06	7.66	6.02
13	JASA PERUSAHAAN	17.66	4.90	4.30	6.87
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	8.47	3.16	2.85	5.56
15	JASA PENDIDIKAN	21.52	22.39	19.57	15.02
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	16.61	3.51	0.38	3.91
17	JASA LAINNYA	12.50	4.90	-1.80	4.42
	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	4.60	5.57	3.60	4.67

Sumber data: BPS Kota Balikpapan

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Kota Balikpapan selama 4 (Empat) tahun terakhir (tahun 2011–2014) menunjukkan peningkatan yang positif, pada tahun 2011 LPE Kota Balikpapan adalah 4,60% dan terus meningkat hingga tahun 2012 mencapai angka 5,57%. Namun pada tahun 2013 mengalami sedikit perlambatan menjadi 3,60% dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 4,67%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini terutama didukung oleh sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Transportasi dan Pergudangan.

A. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2014, PDRB perkapita Balikpapan mencapai 118,41 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,41 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan PDRB perkapita berturut-turut sebesar -2,66 persen, 0,71 persen, 7,50 persen dan 9,41 persen selama periode 2011-2014. Data tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tersebut terjadi percepatan pertumbuhan PDRB perkapita secara berkelanjutan. Sebuah sinyal yang menunjukkan berhasilnya pembangunan ekonomi di Balikpapan.

Grafik 2.1
PDRB Per Kapita, tahun 2010-2014 (Ribuan Rupiah)



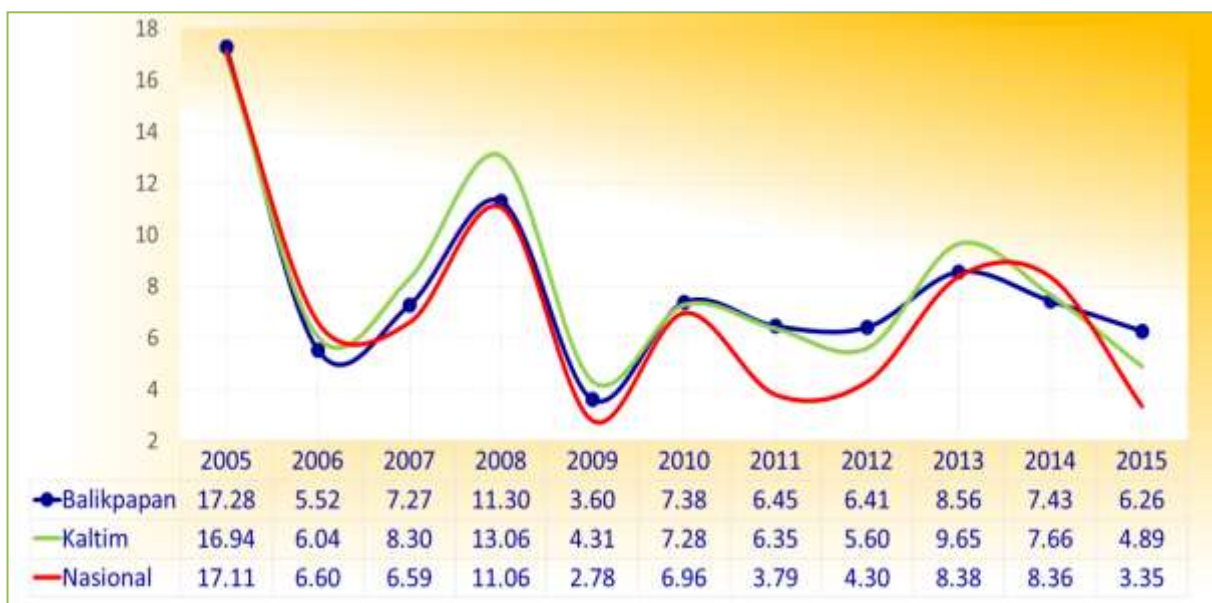
Sumber data : BPS Kota Balikpapan

B. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai suatu indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter.

Tingkat Inflasi di Kota Balikpapan pada tahun 2015 adalah sebesar 6,26%, mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun 2014 sebesar 7,43%. Kondisi inflasi pada tahun 2015 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,89% dan inflasi secara Nasional sebesar 3,35%. Kelompok bahan makanan, perumahan dan transportasi masih menjadi pemberi andil terbesar bagi inflasi di Kota Balikpapan. Kondisi khusus yang memicu inflasi ini adalah keterbatasan pasokan pangan dimana 95% pasokan kebutuhan pangan masih didatangkan dari luar Kota Balikpapan, selain dipengaruhi oleh harga produksi barang itu sendiri, juga sangat dipengaruhi oleh biaya distribusi barang, infrastruktur bongkar muat di pelabuhan dan kondisi cuaca.

Grafik 2.2
Grafik Perbandingan Inflasi tahun 2005-2015
Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim dan Nasional.



Sumber data : BPS Kota Balikpapan

Untuk mengendalikan inflasi tersebut Pemerintah Kota melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan telah melakukan upaya melalui kebijakan dan program pemerintah kota yaitu:

1. Instrumen untuk mengatasi inflasi pendidikan, pengaturan penggunaan seragam pada tahun ajaran baru agar tidak memberatkan orangtua siswa, bantuan bagi sekolah swasta dari APBD kota;
2. Menggalakkan kembali Gerakan Rumah Pangan Lestari, dengan memberikan pembinaan kepada seluruh rumah tangga untuk melakukan budidaya: untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sebagai income rumah tangga (dapat menghasilkan bibit sendiri);
3. Pengendalian harga menjelang Bulan Suci Ramadhan 1436 H. beberapa hal pokok terkait Pengendalian harga yaitu:
 - Terjaminnya ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga selama Ramadhan;
 - Mengadakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan;
 - Menindak tegas penimbun BBM dan kebutuhan bahan pokok;
 - Memprioritaskan sandar kapal dan kendaraan pengangkut logistik;
 - Terus memantau harga kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, cabai, bawang, dan sayuran melalui media PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) Kota Balikpapan;
4. Pengoptimalan program penanaman padi dan Palawija di Kota Balikpapan Bekerjasama dengan Kodam VI Mulawarman, luasan lahan penanaman padi adalah 203 Ha, dengan produksi 613 Ton gabah kering giling;
5. Memperkuat kerjasama antar daerah, khususnya terkait komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Balikpapan. Pada tahun 2015 lalu, TPID Kota Balikpapan telah menghasilkan Kajian/Studi Kerjasama dengan Daerah Pemasok. Dari hasil studi, diperoleh pemetaan kota/kabupaten di beberapa Provinsi yang mempunyai Surplus Pangan dan berpotensi untuk dilakukan penjajakan kerjasama. Studi Kerjasama dengan Daerah Pemasok yang telah dilakukan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Balikpapan di dalam melakukan penjajakan kerjasama antar daerah;
6. Pembatasan Pembelian BBM Subsidi. Walikota mengeluarkan keputusan untuk mengatur jam pembelian solar di beberapa tempat pengisian bahan bakar di Balikpapan. Keputusan Walikota Nomor 188.45-521/2014 ini melengkapi Keputusan Walikota sebelumnya Nomor 188.45-423/2013 tentang Pembatasan pengisian BBM untuk kendaraan bermotor pada SPBU di Balikpapan. Diharapkan akan mengurangi risiko kelangkaan solar sehingga distribusi bahan makanan dapat kembali lancar;

7. Pelaksanaan Program Bazar Ramadhan di enam kecamatan yang berlangsung selama 12 hari di bulan Ramadhan mulai jam 09.00 hingga 15.00. Program ini dilakukan sebagai upaya menjaga kestabilan harga serta membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang wajar selama bulan Ramadhan. Kegiatan Bazar Ramadhan bekerjasama dengan BULOG dan Distributor Utama Kota Balikpapan antara lain: Hypermart, Lotte Mart, PT. Indofood Sukses Makmur, PT. Garuda food, Giant, dan beberapa distributor besar lainnya.

Tabel 2.10
Perkembangan Inflasi Kalender Kota Balikpapan
Tahun 2010-2015 (%)

Tahun	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2015	1,69	2,42	1,69	1,36	2,13	3,38	5,49	5,25	5,11	6,03	5,46	6,26
2014	1,32	1,14	1,04	1,83	2,16	2,66	3,29	3,90	4,44	3,93	5,00	7,43
2013	1,09	1,64	2,52	2,64	2,79	3,56	7,44	8,84	7,39	7,52	7,16	8,56
2012	1,94	1,85	2,11	2,66	2,70	2,96	4,48	6,41	5,87	5,48	5,40	6,41
2011	1,59	2,05	2,38	2,84	3,15	4,58	6,45	6,72	6,65	6,49	6,17	6,45
2010	1,07	1,91	2,55	2,82	2,94	3,33	6,21	7,19	7,61	6,66	6,61	7,38

Sumber data : BPS Kota Balikpapan

C. Fokus Kesejahteraan Sosial

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Balikpapan juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi (multidimensional). Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator (makro) lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

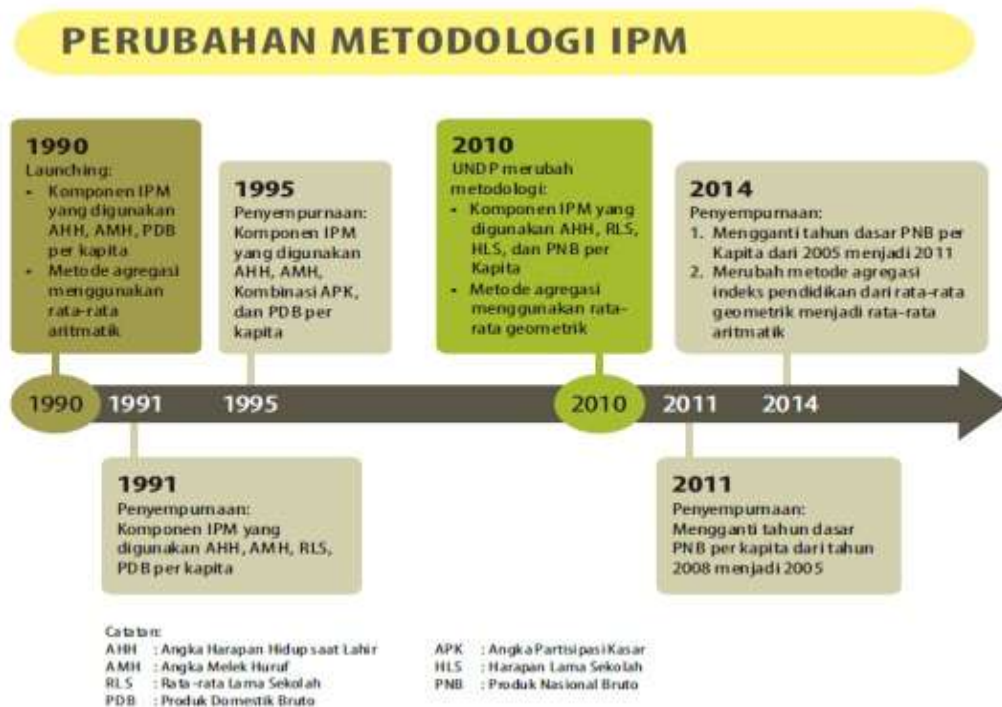
Tabel berikut menguraikan beberapa indikator makro strategis Kota Balikpapan untuk dapat melihat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.

Tabel 2.11
Indikator Makro Kota Balikpapan

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015**
1	IPM		75,55	76,02	76,56	77,53	77,93	78,05
2	Angka Harapan Hidup (AHH-o)	Tahun	73,90	73,91	73,92	73,93	73,94	-
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,07	12,27	12,47	13,15	13,43	-
4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,02	10,26	10,29	10,39	10,41	-
5	Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan	(Ribu Rp.)	12.813	12.922	13.127	13.333	13.439	-
6	LPE	Persen	5,19	4,60	5,57	3,60	4,67	4,28
7	PDRB (Berlaku)	(Juta Rp.)	36,521,931.49	57,611,960.58	57,175,458.48	58,695,646.16	64,286,265.40	71,615,824.50
8	PDRB (Konstan)	(Juta Rp.)	15,405,235.48	57,611,960.58	60,260,220.85	63,615,143.51	65,907,490.79	68,984,218.07
9	Inflasi	Persen	7.38	6,45	6,41	8,56	7,43	6.26
10	Pengangguran (mencari kerja)	Jiwa	16.152	16.485	24.963	25.666	22.315	16.823

Sumber: BPS Kota Balikpapan diolah

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk itu dari tahun ke tahun dilakukan perbaikan, baik dalam menentukan indikator maupun metode penghitungannya.

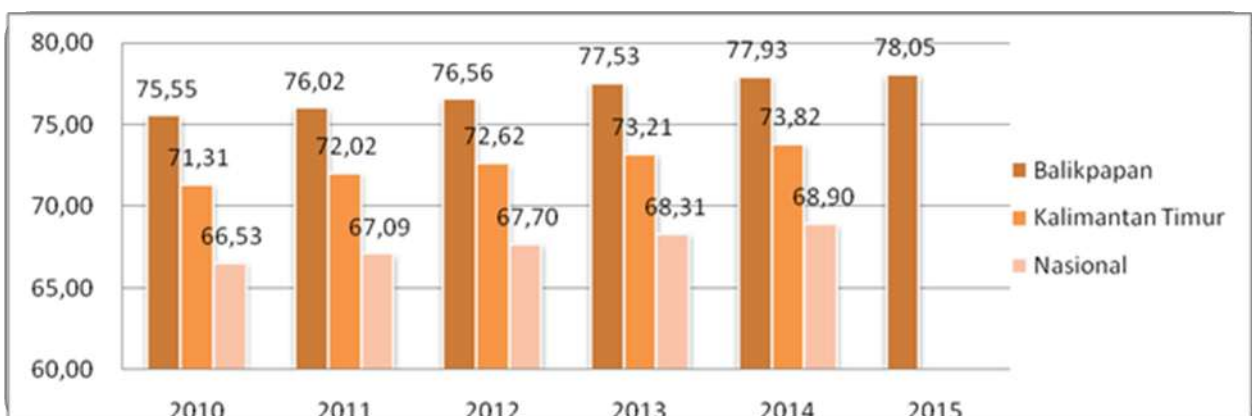




Indeks ini adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 (tiga) komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir (2) Pendidikan yang diwakili oleh rata-rata pencapaian tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan angka harapan lama sekolah, dan (3) standar kehidupan layak yang diwakili oleh Pendapatan Riil Perkapita.

Berdasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia melalui pengukuran keadaan penduduk menurut usia hidup, pengetahuan, dan hidup layak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dan cenderung diatas provinsi dan nasional. Jika pada tahun 2011 IPM Kota Balikpapan sebesar 76,02 maka pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 78,05 dan sepanjang peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Kinerja pembangunan manusia dalam dimensi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.

Grafik 2.3
Pertumbuhan IPM Kota Balikpapan Tahun 2010 - 2015

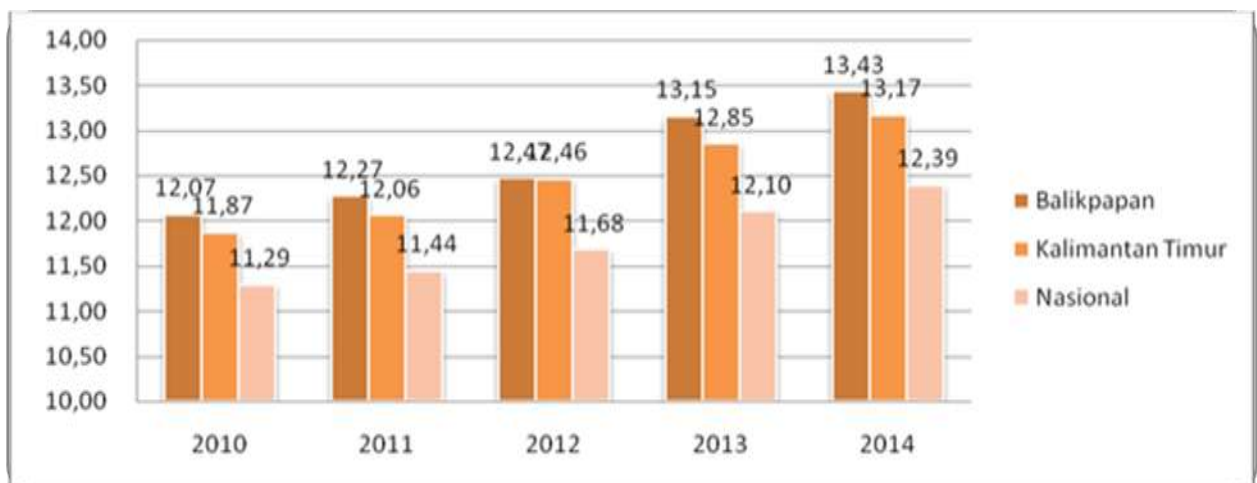


Sumber : BPS Kota Balikpapan

Situasi pembangunan manusia dimana bidang pendidikan yang diwakili dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah atau angka harapan lama sekolah yang berdasarkan grafik, cenderung meningkat dan selama 5 (lima) tahun berada di atas angka provinsi dan nasional. Peningkatan di bidang pendidikan ini didukung dengan adanya peningkatan proporsi anggaran pendidikan setiap tahun yang mencapai 20%, adanya kebijakan dan program pengurangan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di Kota Balikpapan yang serta peningkatan aspek kualitas sumberdaya manusia. Pemerintah Kota Balikpapan meningkatkan sarana prasarana dalam hal pendidikan, dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi yang terpenting disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan inovasi untuk peningkatan pemerataan akses pendidikan melalui penyaluran dana bantuan kepada siswa di sekolah SMP dan SLTA swasta.

Grafik 2.4

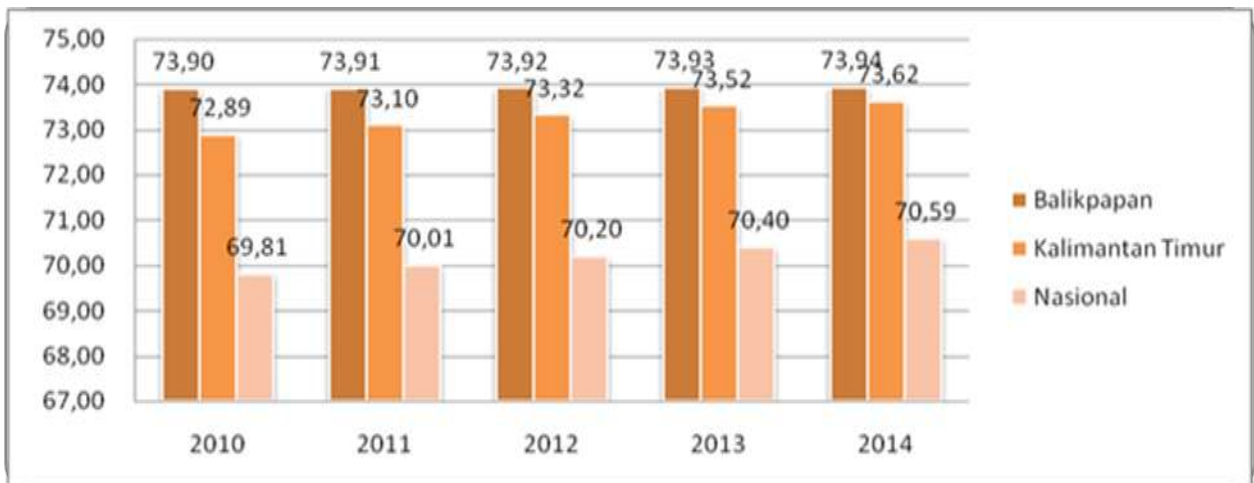
Angka Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan 2010 - 2014



Sumber : BPS Kota Balikpapan

Peningkatan yang serupa juga terjadi di bidang kesehatan. Jika pada tahun 2011 angka harapan hidup Kota Balikpapan sebesar 73,91 pada tahun 2012 meningkat menjadi 73,92 dan pada tahun 2013 menjadi 73,93, pada tahun 2014 menjadi 73,94 Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan mengalami perbaikan setiap tahunnya.

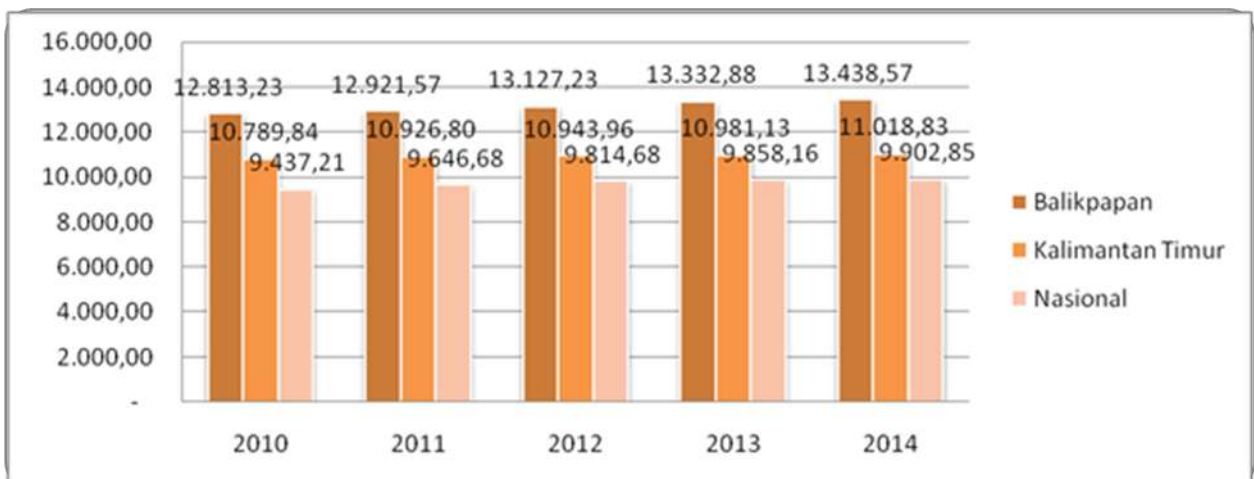
Grafik. 2.5
Pertumbuhan indikator Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan Tahun
2010-2014



Sumber : BPS Kota Balikpapan

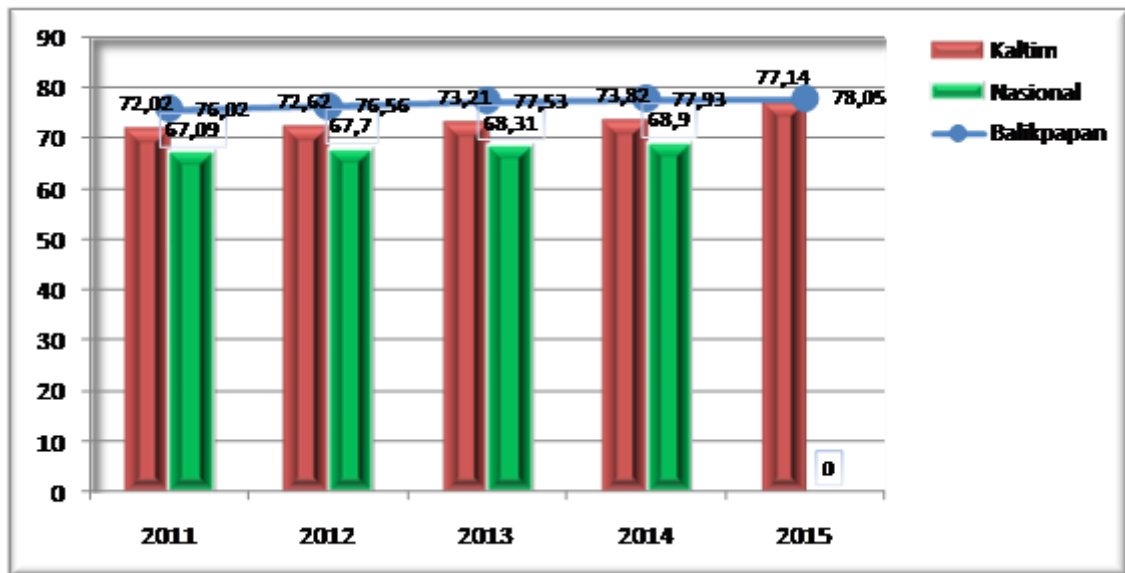
Indeks ekonomi (pengeluaran Riil per kapita) juga mengalami peningkatan selama periode 2010-2014, dimana pada tahun 2010 sudah berada di kisaran Rp12.813 dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp13.439

Grafik. 2.6
Indeks Pengeluaran Riil per kapita Kota Balikpapan 2010 - 2014



Sumber : BPS Kota Balikpapan

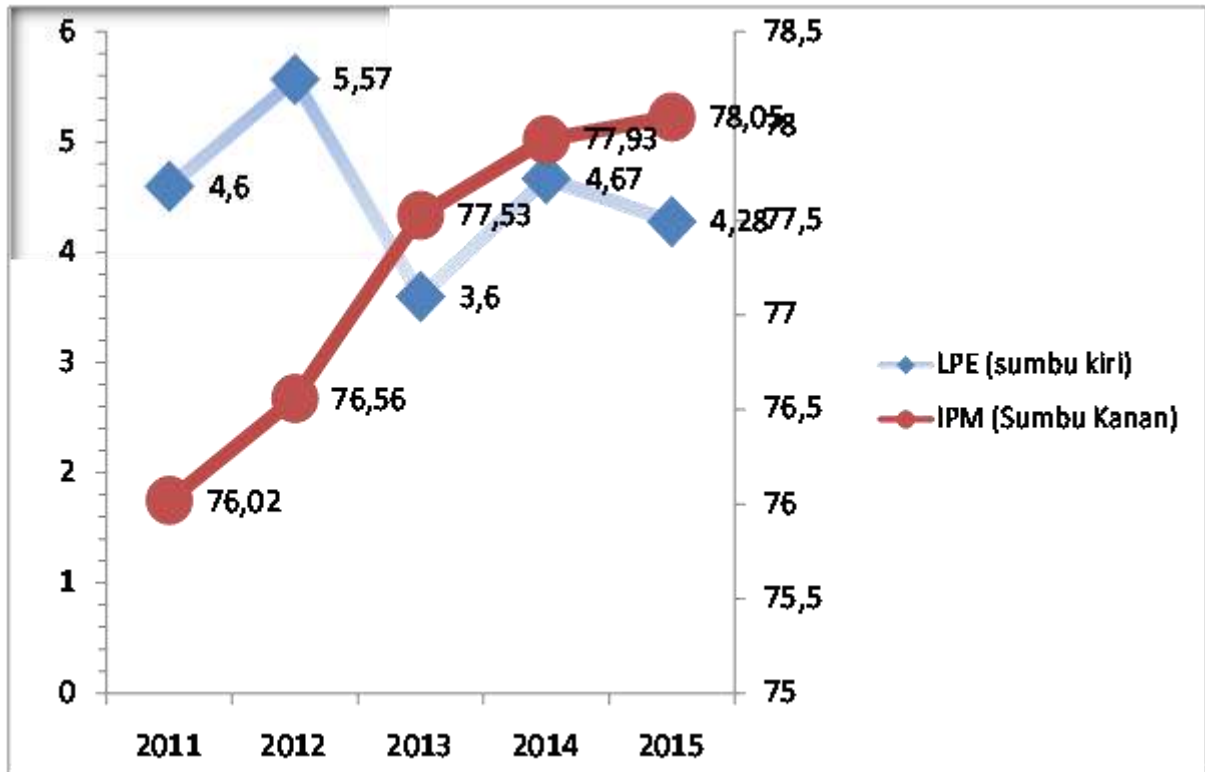
Grafik 2.7
Perbandingan IPM Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan
Tingkat Nasional Periode 2011 – 2015**



**Angka Sangat Sementara Sumber data : BPS Kota Balikpapan

Jika dilakukan komparasi antara tingkat Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan IPM Kota Balikpapan relatif lebih baik. Pada tingkat Nasional, IPM pada tahun 2011 sebesar 67.09, pada tahun 2012 menjadi 67.70, tahun 2013 meningkat menjadi 68.31, tahun 2014 sebesar 68.90. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2011, IPM Provinsi Kalimantan Timur baru mencapai nilai 72,02 dan terus mengalami peningkatan meningkat menjadi 77,14 pada tahun 2015. IPM Kota Balikpapan berada diposisi ke tiga di Kalimantan Timur, setelah Kota Bontang dan Kota Samarinda, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan metodologi IPM pada Tahun 2014. akan tetapi tren positif IPM di Kota Balikpapan memberikan indikasi bahwa potensi yang ada di Kota Balikpapan memiliki keunggulan yang relatif baik serta patut untuk terus dipelihara dan dikembangkan dalam peningkatan pembangunan di segala bidang secara berkelanjutan.

Grafik 2.8
Trend IPM dan laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan
Tahun 2008-2013



Sumber data : BPS Kota Balikpapan

Tren perkembangan IPM Kota Balikpapan menunjukkan keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik (two-way relationship) antara modal manusia (human capital) dan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia (human development). Perekonomian (PDRB) mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Di sisi lain, dengan semakin tingginya pembangunan manusia, maka akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreatifitas dan produktivitas masyarakat. Namun akibat perlambatan perekonomian global berdampak pada kondisi perekonomian Kota Balikpapan, sehingga perkembangan IPM yang signifikan tidak diimbangi dengan peningkatan LPE.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan oleh 2 (dua) indikator utama yaitu indikator perkembangan pembangunan dan indikator

keberhasilan pembangunan. Perkembangan pembangunan ditunjukkan angka akses penduduk usia sekolah terhadap lembaga pendidikan (angka partisipasi sekolah/APS), kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, tingkat pendanaan pendidikan dan rasio sarana prasarana pendidikan, Sedangkan indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan, tingkat kelulusan siswa dan angka melek huruf.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak/besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sesuai dengan jenjangnya. APS untuk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun di Kota Balikpapan cenderung meningkat. Hal ini berarti persentase anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan semakin meningkat. Pada tahun 2015 APS usia 7-12 sebesar 99,76 persen masih terdapat sisanya 0,34 persen berdasarkan data tersebut tidak bersekolah. Begitupula dengan APS usia 13-15 tahun 2015 sebesar 83,64 persen yang bersekolah dan masih terdapat sisanya 17,46 persen tidak bersekolah.

Selanjutnya APS usia 16-18 tahun sebesar **99,46** persen yang bersekolah dan masih terdapat sisanya **0,54** persen tidak bersekolah. Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APS SD/MI	99,76%	97,30%	120,18%	90,59%	91,39%
2.	APS SMP/MTs	84,31%	90,47%	90,60%	78,45%	83,64%
3.	APS SMA	69,69%	-	-	72,76%	78,03%

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Kota Balikpapan, dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel. 2.13**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d 2015**

Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI					
Jumlah gedung sekolah	194	194	195	195	201
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	66.499	69.834	57.663	74.984	78.499
Rasio	1 : 342.77	1 : 359.96	1 : 295.70	1 : 384.53	1 : 390.54
SMP/MTs					
Jumlah gedung sekolah	69	69	69	72	73
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	31.499	29.998	30.972	35.492	37.069
Rasio	1 : 456.50	1 : 434.75	1 : 448.86	1 : 492.94	1 : 507.79

Sumber Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Jumlah Ketersediaan Sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah untuk tingkat SD/MI sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya gedung sekolah. Demikian untuk tingkat SLTP/MTs sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.14**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015**

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	Rasio (3/4x10.000)	Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	Rasio (6/7x10.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Balikpapan Timur	28	9.759	29	8	4.555	18
2	Balikpapan Barat	28	11.593	24	11	5.506	20
3	Balikpapan Utara	44	18.312	24	18	8.526	21
4	Balikpapan Tengah	41	12.071	34	11	5.716	19
5	Balikpapan Selatan	30	16.973	18	14	7.904	18
6	Balikpapan Kota	30	9.791	31	11	4.862	23
TOTAL		201	78.499	159	73	37.069	118

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid di Kota Balikpapan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010 s.d 2015

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	192	194	194	195		197
1.1.	Jumlah Guru	3.266	3.320	3.790	3.421		3.011
1.2.	Jumlah Siswa	66.119	67.927	68.988	86.130		62.157
1.3.	Rasio						
2	SMP/MTs	68	69	69	69		72
2.1.	Jumlah Guru	1.690	1.655	1.682	1.682		1.671
2.2.	Jumlah Siswa	26.841	27.071	28.062	29.834		31.224
2.3.	Rasio	1 : 15.88	1 : 16.35	1 : 16.68	1 : 17.73		1 : 18.68

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Balikpapan 2016

Berdasarkan tabel 2.12, jumlah murid yang ditangani oleh satu guru selama tahun 2011-2015 semakin bertambah.

Tabel 2.16
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan Tahun 2015

No.	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio (3/4x10.000)	Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio (6/7x10.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Balikpapan Timur	422	10.069	419	182	3.540	514
2	Balikpapan Barat	483	11.581	417	224	4.001	560
3	Balikpapan Utara	768	19.529	393	473	8.268	572
4	Balikpapan Tengah	606	13.520	448	218	3.021	722
5	Balikpapan Selatan	1.142	31.431	363	585	11.004	532
6	Balikpapan Kota						
TOTAL		3.421	86.130	2.041	1.682	29.834	2.899

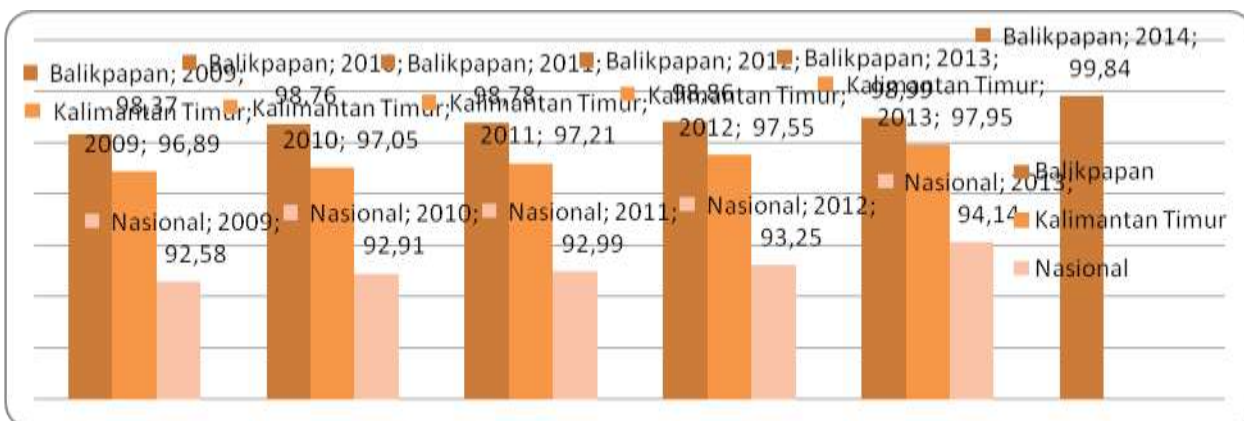
Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai kepadatan tertinggi sehingga satu guru menangani 448 siswa untuk pendidikan tingkat SD/MI demikian juga pendidikan tingkat SMP/MTs satu guru menangani 722 siswa.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Grafik. 2.9

Pertumbuhan Angka Melek huruf kota Balikpapan tahun 2009 - 2014.



Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Angka melek huruf Kota Balikpapan sepanjang 5 (lima) tahun berada di atas angka provinsi dan nasional. Untuk data tahun 2015 belum diperoleh dari BPS sehingga data yang dibandingkan hanya 2013 dan 2014. Pada tahun 2013, APM Kota Balikpapan sebesar 98,99% dan pada tahun 2014 sebesar 99,84%.

APK pendidikan anak usia dini (PAUD) menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Tahun 2013 masih 49,93% yang meningkat 2,76 point pada tahun 2014 menjadi 52,69%. Demikian juga pada tahun 2015, APK PAUD menjadi 55,14% atau meningkat 2,45 point. Angka tersebut masih dibawah angka nasional namun masih diatas angka provinsi. Pemerintah Kota Balikpapan juga menggalakkan pengembangan pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan.

Grafik. 2.10

Perkembangan APK PAUD Kota Balikpapan 2013 - 2015.



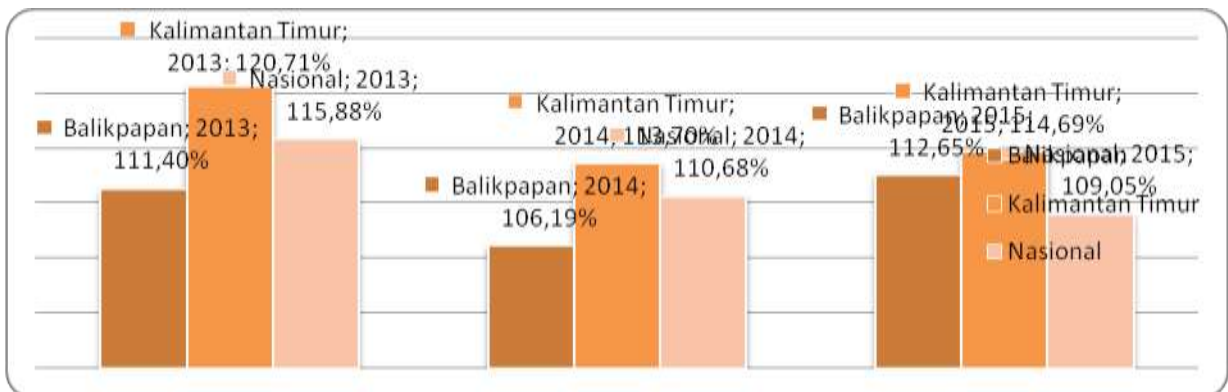
Sumber Data : Kementerian pendidikan go.id

Tingkat pendidikan sekolah dasar (SD), APK menunjukkan angka fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2013, APK SD sebesar

111,40% yang pada tahun 2014 menurun menjadi 106,19%. Tahun 2013 dan 2014 angka tersebut dibawah angka provinsi dan nasional. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 112,65% yang meskipun masih dibawah provinsi namun diatas angka nasional. Untuk peningkatan APK SD/MI Kota Balikpapan masih harus bekerja keras terutama pada tahun 2016 melalui berbagai program dan kegiatan terutama peningkatan akses layanan pendidikan.

Grafik. 2.11

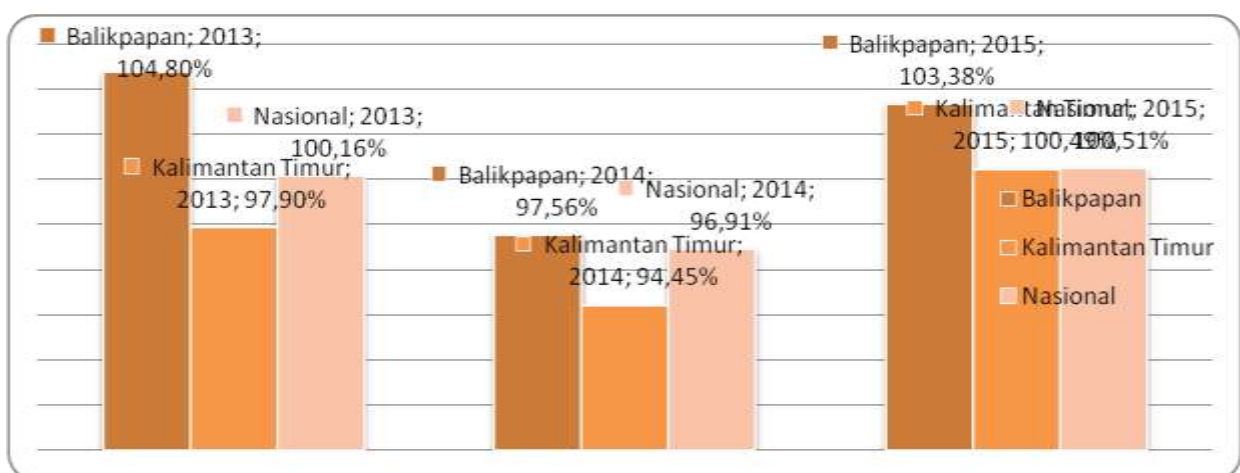
Perkembangan APK SD/MI Kota Balikpapan tahun 2013 - 2015.



Sumber Data : Kementerian Pendidikan go.id

Angka Partisipasi Kasar untuk SMP/MTs Kota Balikpapan pada tahun 2013-2015 cenderung menurun namun masih diatas angka provinsi dan nasional. Pada tahun 2013 APK SMP/MTs adalah 104,80%, menurun 7,24 point pada tahun 2013 menjadi 97,56%. Pada tahun 2015, APK SMP/MTs meningkat menjadi 103,38% melebihi angka provinsi dan nasional.

Grafik. 2.12



Perkembangan APK SMP/MTs Kota Balikpapan Tahun 2013 - 2015.

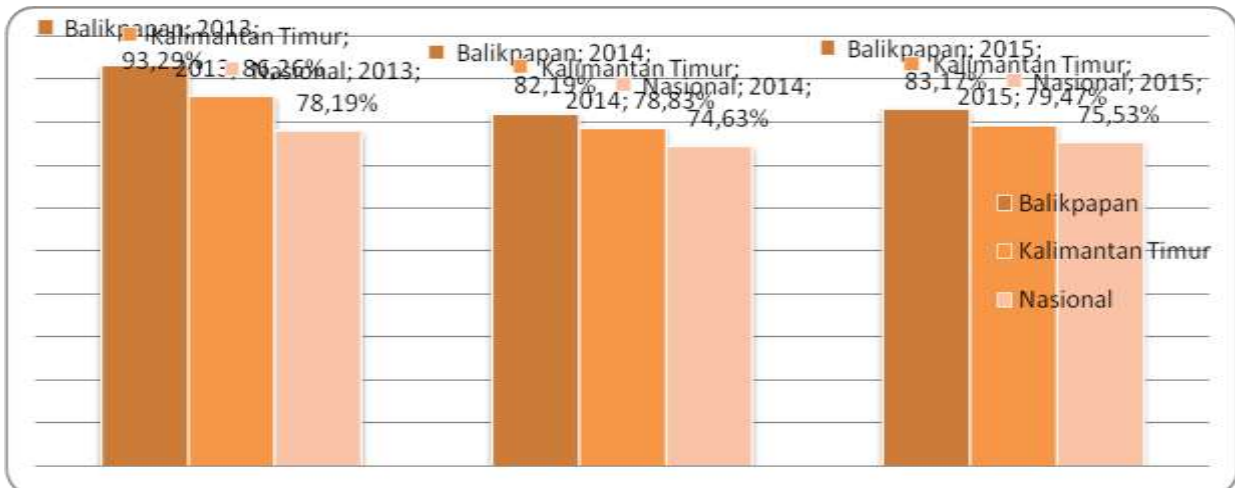
Sumber Data : Kementerian Pendidikan go.id

Untuk pendidikan menengah atas, terjadi penurunan APK SMA/MA baik skala kota, provinsi maupun nasional. APK SMA/MA Kota Balikpapan pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 2013, 2014 dan 2015 rata-rata diatas angka

provinsi dan nasional. Pada tahun 2013 APK mencapai 93,29% yang pada tahun 2014 menurun menjadi 82,19% dan meningkat 1 point pada tahun 2015 menjadi 83,17%.

Grafik. 2.13

Perkembangan APK SMA/MA Kota Balikpapan tahun 2013 -2015.



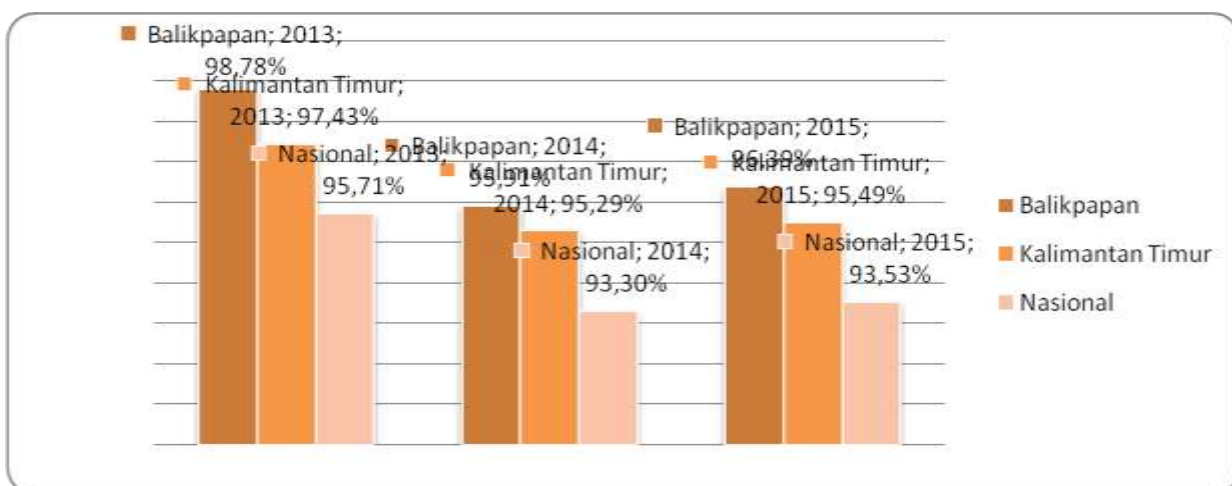
Sumber : Kementerian Pendidikan go.id

Selain Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni (APM) juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan.

APM SD/MI tahun 2013-2015 fluktuatif cenderung menurun namun masih diatas angka provinsi dan nasional. Pada tahun 2013, APM SD/MI sebesar 98,78% menurun menjadi 95,91% pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 96,39%.

Grafik. 2.14

Perkembangan APK SD/MI Kota Balikpapan pada tahun 2013 - 2014



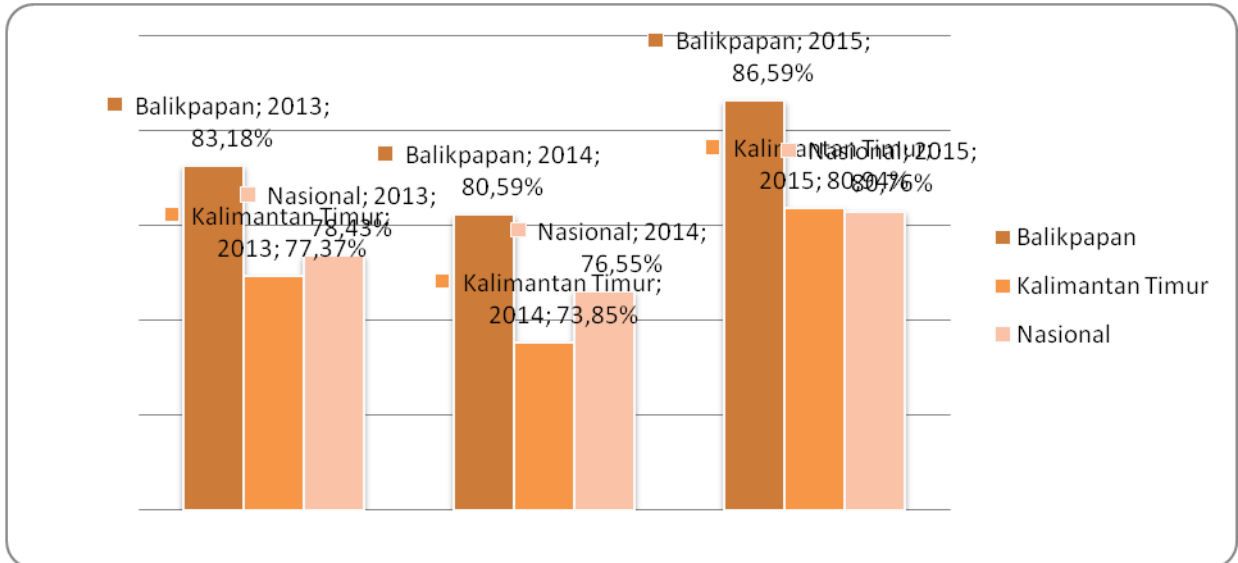
Sumber : Kementerian Pendidikan go.id

Untuk APM pendidikan dasar SMP/MTs dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun menunjukkan peningkatan dan diatas nilai provinsi dan nasional. APM

tahun 2013 sebesar 83,18% menurun menjadi 80,59% pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 86,59%.

Grafik. 2.15

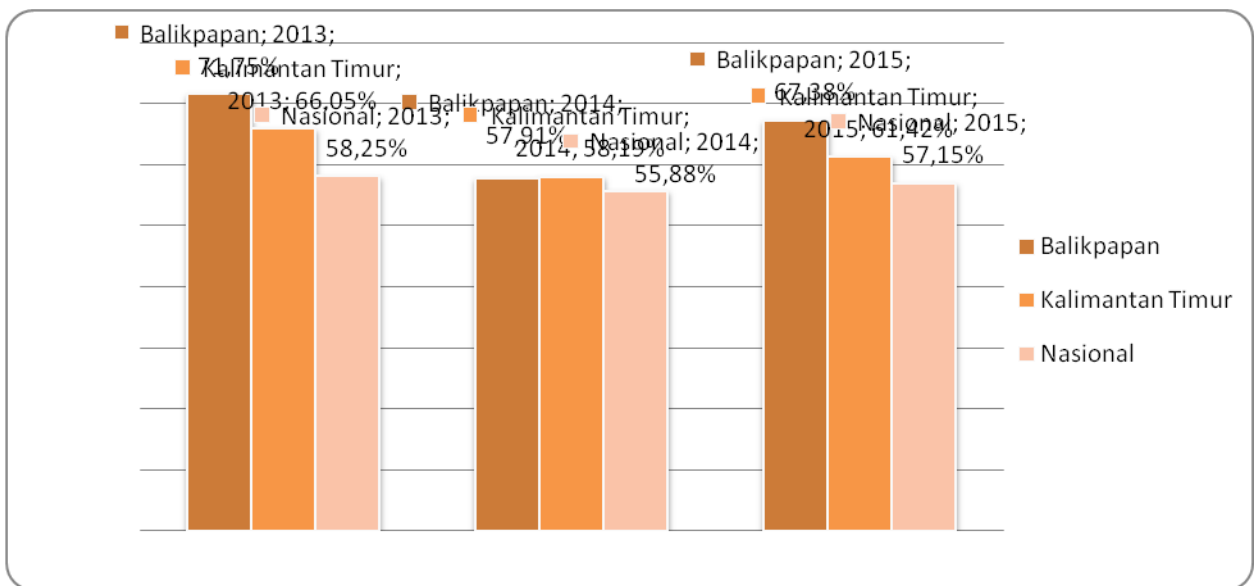
Perkembangan APM SMP/MTs Kota Balikpapan Tahun 2013 - 2015



Sumber : Kementerian Pendidikan go.id

APM pendidikan menengah SMA/MA tahun 2013-2015 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tahun 2013 APM SMA/MA sebesar 71,75% yang menurun menjadi 57,91% pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 67,38%.

Grafik. 2.16



Perkembangan APM SMA/MA Kota Balikpapan tahun 2013 - 2015.

Sumber : Kementerian pendidikan go.id

b. Kesehatan

Beberapa indikator yang digunakan penilaian keberhasilan pembangunan bidang kesehatan antara lain usia harapan hidup (UHH), angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Usia Harapan Hidup Kota Balikpapan telah dibahas dalam pembahasan IPM sehingga pada bagian ini hanya dibahas 2 (dua) indikator yaitu AKI dan AKB.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2015 fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2012 sebanyak 69 jiwa, pada tahun 2013 meningkat 10 jiwa menjadi 79 jiwa dan meningkat tajam pada tahun 2014 menjadi 123 jiwa. Pada tahun 2015 terjadi penurunan signifikan menjadi 70 jiwa. Penurunan ini bisa tercapai dengan adanya penerapan sistem manual rujukan maternal neonatal.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Balikpapan pada tahun 2011 sebanyak 4 per 1000 kelahiran hidup, tahun 2012 sebanyak 5 per 1000 kelahiran hidup, meningkat pada tahun 2013 menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup dan tahun 2014 sebanyak 11 per 1000 kelahiran hidup, dan tahun 2015 menurun menjadi 6 per 1000 kelahiran hidup.

Indikator lainnya adalah terkait tenaga kesehatan yaitu jumlah kelahiran yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya, selama 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2011 sebesar 90,95%, meningkat pada tahun 2012 menjadi 92,47%, tahun 2013 meningkat sebesar 93,82%, dan pada tahun 2014 sebesar 94,62%, dan tahun 2015 menurun menjadi 92,80%. Sementara itu kelahiran yang ditolong oleh dukun terlatih semakin menurun.

Perkembangan ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan lainnya termasuk meningkatnya jumlah tenaga kesehatan. Selain itu timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sebagai dampak langsung dari keberhasilan program penyuluhan yang telah dilakukan.

c. Pekerjaan Umum

Dari tabel 2.32. memperlihatkan bahwa panjang jalan Kota Balikpapan dalam kondisi baik menunjukkan prosentasenya terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 sekitar 64,15% panjang jalan di Kota Balikpapan dalam kondisi baik. Kemudian naik menjadi 64,46% pada tahun 2012, dan naik lagi menjadi 78,32% pada tahun 2012, serta naik menjadi 79,08% pada tahun

2014. Namun kondisi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 80,30%.

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
Kondisi panjang jalan Kota Balikpapan tahun 2010 - 2014

No	Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	km	372,02	297,23	298,69		
2	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	%	80,30%	64,15%	64,46%	78,32%	79,08%

Sumber: LPPD

d. Perumahan

Untuk urusan perumahan, jumlah rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan yang cukup baik, karena pada tahun 2010 baru mencapai 51,93%, tetapi pada tahun 2014 sudah mencapai 76,00%. Sedangkan jumlah rumah tangga yang bersanitasi terus mengalami penurunan, karena pada tahun 2010 sudah mencapai 97,03%, namun pada tahun 2014 hanya 59,00%. Hal ini kemungkinan dikarenakan pertumbuhan rumah yang sangat cepat, namun tidak diikuti dengan pembangunan sanitasi yang baik. Ini bisa dilihat pula dari kondisi lingkungan permukiman kumuh yang terus meningkat dari hanya 0,18% pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,56% pada tahun 2014. Untuk rumah layak huni walaupun persentasenya berfluktuasi, namun dapat dikatakan sudah cukup baik, karena pada tahun 2014 sudah mencapai 93,93%. Untuk jelasnya lihat tabel 2.18.

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan
Kondisi perumahan di Kota Balikpapan tahun 2010 - 2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rumah tangga pengguna air bersih	51,93%	38,56%	73,36%	74,00%	76,00%
3	Rumah tangga ber-Sanitasi	97,03%	65,53%	65,53%	83,48%	59,00%
4	Lingkungan permukiman kumuh	0,18%	0,18%	0,26%	0,53%	0,56%
5	Rumah layak huni	15,74%	96,53%	96,73%	82,01%	93,93%

Sumber: LPPD

e. Penataan Ruang

Untuk urusan penataan ruang, Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan Luas Wilayah ber HPL (hak pengelolaan)/HGB (hak guna bangunan) di Kota Balikpapan memperlihatkan kondisi yang sangat baik. Untuk tahun 2012 rasio nya sebesar 40,63%, pada tahun 2013 naik menjadi 52,29%. Tahun 2014

rasionya masih bersifat sementara. Adapun rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kota Balikpapan menunjukkan rasio yang kurang baik. Jika pada tahun 2012 sebesar 32,00%, maka pada tahun 2013 turun menjadi 2,90%. Hal ini menunjukkan kurang pedulinya masyarakat dalam mengurus IMB atau sosialisasi pentingnya bangunan memiliki IMB oleh pemerintah Kota Balikpapan sangat kurang. Untuk jelasnya gambaran tersebut, dapat dilihat pada tabel 2.19

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang
Rasio RTH per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Balikpapan
tahun 2012 - 2014

No	Indikator	Satuan	2012	2013	2014
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	40,63 %	52,29%	25,74%
2	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	40,63 %	52,29%	25,74%

Sumber: LPPD

f. Perencanaan Pembangunan

Untuk urusan Perencanaan Pembangunan yang meliputi tersedianya dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota serta penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD di Kota Balikpapan, telah terdokumentasi dengan baik. Sedangkan program RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 telah dijabarkan kedalam RKPD Kota Balikpapan tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Untuk tahun 2013 dan 2014 penjabaran program RPJMD ke dalam dokumen RKPD tidak mencapai 100% (hanya 95,15% pada tahun 2013 dan 67,12% pada tahun 2014). Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan
Tahun 2010 - 2014

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ADA	ADA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERWALI	Ada	Ada	Ada	ADA	ADA
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERWALI	Ada	Ada	Ada	ADA	ADA
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	95,15%	67,12%

Sumber: LPPD

g. Perhubungan

Data urusan perhubungan Kota Balikpapan tidak tersedia dengan baik, sehingga banyak indikator yang tidak bisa dianalisis, lihat tabel 2.21.

Dari tabel 2.21, Jumlah pelabuhan laut di Kota Balikpapan ada 2 buah yaitu: Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Milik Pertamina. Pelabuhan Semayang merupakan pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri (Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor 885/Kpb/VII/1985, Nomor 667/KMK.05/1985 tanggal 26 Juli 1985). Pelabuhan Semayang memiliki panjang dermaga sepanjang 489 m dan gudang seluas 2.450 m².

Bandara Balikpapan hanya 1 buah, tetapi memiliki posisi strategis, yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang International Airport. Selain melayani penerbangan domestik, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang juga melayani penerbangan internasional. Mulai dioperasikan tanggal 6 Agustus 1997, memiliki luas 300 ha dan merupakan bandara ke 4 terbesar dari 13 bandara yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I.

Jumlah Terminal Bis di Kota Balikpapan ada 2 buah, yaitu Terminal Batu Ampar dan Terminal Damai. Terminal Batu Ampar untuk angkutan umum yang melayani rute Balikpapan-Samarinda (bus), Balikpapan-Bontang (bus), Balikpapan-Banjarmasin (bus) dan Balikpapan-Sepaku/Semoi (mini bus). Sedangkan Terminal Damai untuk angkutan umum yang melayani Balikpapan-Handil II (mini bus).

Tabel 2.21

Capaian Indikator kinerja Urusan Perhubungan 2010 - 2014

Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2
Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2
Angkutan darat	8,32	6,00	3,80	51,40	37,20

Sumber: LPPD, BPS dan Perspektif Kota Balikpapan 100 tahun.

Jumlah angkutan darat di Kota Balikpapan tumbuh dengan cepat dari tahun ke tahun. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu 51,40% dari tahun sebelumnya. Sampai dengan tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor di Kota Balikpapan telah mendekati 70.000 unit, dengan penambahan rata-rata 2.000 unit dari berbagai jenis. Menurut data Direktorat Lalu-Lintas Polda Kalimantan Timur, jumlah kendaraan bermotor di Kota Balikpapan pada tahun 2011 mencapai 38.816 unit (terdiri dari 30.156 unit sepeda motor, 4.493 mobil penumpang dan 4.069 truk). Pada tahun 2012

mendapat tambahan kendaraan baru sebanyak 38.275 unit (terdiri dari 28.267 unit kendaraan roda 2 dan 10.008 unit kendaraan roda 4). Tahun 2013 mendapat tambahan lagi kendaraan baru sebanyak 12.691 unit (terdiri dari 9.626 unit kendaraan roda 2 dan 3.065 unit kendaraan roda 4). Pertumbuhan yang sangat cepat ini memerlukan skenario transportasi yang baik dan cepat dan tepat, karena bila tidak transportasi di Kota Balikpapan akan macet seperti kota-kota besar lainnya.

h. Lingkungan Hidup

Sesuai data yang tersedia, sebagaimana tabel 2.22. kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Untuk penanganan sampah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Tahun 2010 sebanyak 71,21% dari volume sampah yang ada dapat ditangani. Tahun 2011 dan 2012 meningkat menjadi 98,61% dan 98,81% dari volume sampah. Namun pada tahun 2013 volume sampah yang dapat ditangani menurun drastis menjadi hanya 63,39% dan tahun 2014 hanya naik sedikit menjadi 66,13%. Ada 2 kemungkinan tidak tertanganinya sampah ini dengan baik. Pertama, kemungkinan jumlah personil dan armada sampah tidak seimbang dengan bertambah volume sampah yang ada. Kedua, kemungkinan titik-titik penempatan dan volume TPS (Tempat Penampungan Sementara) jumlah dan kapasitasnya kecil serta masyarakat tingkat kepeduliannya rendah.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL tidak tersedia datanya dengan baik, sehingga sulit untuk dianalisis. Tahun 2010 kinerjanya bagus (100%), namun ditahun 2011 menurun drastis, hanya 16,67%. Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL akan berjalan baik, jika semua perusahaan yang wajib AMDAL di Kota Balikpapan melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang terkena dampak sebagaimana yang ada didalam dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan yang telah disusun dan diterima serta disahkan/ditetapkan oleh pemerintah kota Balikpapan atau Provinsi Kalimantan Timur.

Penegakan Hukum Lingkungan dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang baik, kalau pada tahun 2010 baru mencapai 21,00%, tahun 2011 naik menjadi 42,86%, tahun 2013 naik menjadi 55,56% dan tahun 2014 naik menjadi 57,14%. Bahkan pada tahun 2012 kinerjanya mencapai 100,00%. Untuk selengkapnya lihat tabel 2.22.

Tabel 2.22
Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase penanganan sampah	%	71,21	98,61	98,81	63,39	66,13
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	100,00	16,67			
Penegakan hukum lingkungan	%	21,00	42,86	100,00	55,56	57,14

Sumber: LPPD

i. Pertanahan

Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel 2.23. Dari tabel tersebut, kinerja luas lahan bersertifikat sangat berfluktuatif. Tahun 2011 persentasenya bisa mencapai 73,06%, namun tahun 2013, hanya 8,29%. Turunnya prosentase luas lahan bersertifikat ini, dimungkinkan memang yang mengurus sertifikat jumlah sedikit atau bisa juga karena rumitnya permasalahan yang dihadapi. Hal ini sangat dipahami karena untuk menerbitkan sertifikat sebidang lahan tidaklah mudah dan memerlukan proses yang sangat panjang. Faktor kehati-hatian dan ketelitian, karena untuk menghindari permasalahan dikemudian hari kadang-kadang dianggap bertele-tele oleh masyarakat.

Penyelesaian kasus tanah Negara kinerjanya sangat tergantung pada ada tidaknya sengketa tanah Negara. Sebagaimana tahun 2011 dan 2012 bisa disimpulkan tidak ada permasalahan dengan tanah Negara, karena kinerja 0,00%. Sedangkan kinerja tertinggi pada tahun 2013, yaitu 100,00%. Artinya semua kasus tanah Negara pada tahun 2013 bisa dituntaskan pada tahun tersebut.

Untuk penyelesaian izin lokasi kinerja cukup baik, rata-rata di atas 80,00%, bahkan tahun 2014 mencapai 98,26%. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23
Capaian kinerja urusan pertanahan di Kota Balikpapan 2010 - 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase luas lahan bersertifikat	%	49,66	73,06	69,96	8,29	9,25
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	57,14	0,00	0,00	100,00	50,00
Penyelesaian izin lokasi	%	88,64	73,85	87,18	80,91	98,26

Sumber: LPPD

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya.

Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Tabel 2.24. menunjukkan jumlah keluarga dan jumlah keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga SIAK di Kota Balikpapan. Dari 248.158 keluarga ternyata 248.158 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga SIAK. Dengan kata lain pada tahun 2015, seluruh keluarga di Kota Balikpapan sudah mempunyai Kartu Keluarga SIAK.

Tabel. 2.24
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil
Persentase Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga SIAK Kota Balikpapan
Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Memiliki	Jumlah Keluarga Yang Tidak Memiliki	% Keluarga Yang Memiliki KK SIAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Balikpapan Timur	28.503	28.503	0	100%
2	Balikpapan Barat	35.247	35.247	0	100%
3	Balikpapan Utara	53.800	53.800	0	100%
4	Balikpapan Tengah	42.044	42.044	0	100%
5	Balikpapan Selatan	52.741	52.741	0	100%
6	Balikpapan Kota	35.823	35.823	0	100%
	TOTAL	248.158	248.158	0	100%

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2014

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel 2.25. menyajikan jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP SIAK.

Tabel. 2.25
Persentase Kepemilikan KTP di Kota Balikpapan Tahun 2015

No	Kecamatan	Wajib KTP			KTP Elektronik		% Kepemilikan KTP EI
		L	P	L+P	Σ Perekaman KTP-EL	Σ Distribusi KTP-EL	
1	Balikpapan Timur	31.999	28.415	60.414	45.992	36.021	59,62%
2	Balikpapan Barat	39.528	36.163	75.691	62.902	54.055	71,42%
3	Balikpapan Utara	59.517	55.082	114.599	82.857	89.366	77,98%
4	Balikpapan Tengah	45.752	42.876	88.628	77.590	66.955	75,55%
5	Balikpapan Selatan	56.810	51.512	108.322	105.147	105.393	97,30%
6	Balikpapan Kota	39.167	36.100	75.267	35.900	35.555	47,24%
T O T A L		272.773	250.148	522.921	410.388	387.345	74,07%

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2015

Menurut tabel 2.25 dapat diketahui bahwa dari 522.921 jiwa wajib KTP, 74.07% atau sebanyak 387.345 jiwa diantaranya sudah memiliki KTP Elektronik. Sedangkan untuk KTP Elektronik (KTP-EL) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2012 di Balikpapan dari 410.338 jiwa yang sudah melakukan perekaman KTP-EL, 348.577 jiwa sudah mendapatkan KTP-EL atau 94.38% penduduk Balikpapan yang telah merekam telah menerima KTP-Elektronik.

Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data mengenai akta kematian belum dapat diperoleh sehingga belum disajikan dalam profil ini. Hal tersebut disebabkan karena:

1. Belum/kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya akta kematian untuk mengurus hak-hak keperdataan seperti masalah warisan, utang piutang dan lain sebagainya.
2. Masyarakat menganggap sudah cukup dengan menggunakan Surat kematian dari Kelurahan dalam mengurus masalah yang dihadapinya.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting

untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 2.26
Rekapitulasi Akta Kelahiran Terbit Januari s/d Desember
Kota Balikpapan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah		
		L	P	L+P
1	Balikpapan Timur	1.050	933	1.983
2	Balikpapan Barat	1.215	1.163	2.378
3	Balikpapan Utara	1.801	1.536	3.337
4	Balikpapan Tengah	1.295	1.189	2.484
5	Balikpapan Selatan	1.590	1.530	3.120
6	Balikpapan Kota	1.422	1.430	2.852
TOTAL		8.373	7.781	16.154

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2015

2. Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Tabel 2.27. menyajikan kepemilikan akta perkawinan.

Tabel 2.27
Rekapitulasi Akta Perkawinan Kota Balikpapan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah		
		L	P	L+P
1	Balikpapan Timur	33	33	66
2	Balikpapan Barat	35	37	72
3	Balikpapan Utara	70	76	146
4	Balikpapan Tengah	68	83	151
5	Balikpapan Selatan	103	95	198
6	Balikpapan Kota	75	60	135
TOTAL		384	384	768

m

ber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2015

3. Akta Perceraian

Akta Perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel 2.28 menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian di Kota Balikpapan.

Tabel. 2.28
Rekapitulasi Akta Perceraian Terbit Januari s/d Desember
Kota Balikpapan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah		
		L	P	L+P
1	Balikpapan Timur	5	5	10
2	Balikpapan Barat	2	3	5
3	Balikpapan Utara	6	5	11
4	Balikpapan Tengah	9	10	19
5	Balikpapan Selatan	13	15	28
6	Balikpapan Kota	7	4	11
TOTAL		42	42	84

Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2015

4. Akta Kematian

Kegunaan akta kematian adalah sebagai syarat untuk menikah, untuk mengurus pensiun, taspen, asuransi bagi ahli warisnya dan untuk mengurus warisan bagi suami/istri/anaknya.

Pelayanan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan selama tahun 2015 sebanyak 3.125 jiwa. Persentase Kepemilikan Akta Kematian semakin meningkat karena mulai muncul kesadaran penduduk atau keluarga yang melaporkan kematian di lingkungannya.

Tabel. 2.29
Rekapitulasi Akta Kematian Terbit Januari s/d Desember
Kota Balikpapan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah		
		L	P	L+P
1	Balikpapan Timur	213	114	327
2	Balikpapan Barat	360	241	601
3	Balikpapan Utara	404	247	651
4	Balikpapan Tengah	358	262	620
5	Balikpapan Selatan	304	185	489
6	Balikpapan Kota	258	179	437
TOTAL		1,897	1,228	3,125

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2015

5. Akta Pengakuan Anak

Yang dimaksud pengakuan anak adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayah ibunya dengan menandatangani register pengakuan anak, maka sejak saat itu anak tersebut telah mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. Pengesahan anak adalah anak luar kawin yang kedua orang tuanya melaksanakan pencatatan perkawinan maka anak tersebut dapat disahkan bersama-sama dengan pencatatan perkawinan orang tuanya, sehingga hubungan tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan bapaknya. Sedangkan anak angkat adalah anak yang bukan kandunginya sendiri tetapi diperlakukan sebagaimana anak kandung.

Untuk sahnya pengangkatan anak harus ada penetapan pengadilan negeri. Dalam akta kelahiran pengangkatan anak, nama orang tua kandung dan orang tua angkatnya tercantum dalam akta tersebut, tetapi pada kutipan akta kelahiran hanya tercantum nama pengangkat.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hampir di seluruh wilayah Indonesia Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari belum tersedianya data terpilah secara menyeluruh. Biasanya hanya data geografi, anggota DPRD, PNS dan ketenagakerjaan. Itupun sangat terbatas, belum semua kantor BPS dan pemerintah daerah memuatnya, sehingga sampai saat ini masih sulit untuk mengukur capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk Kota Balikpapan dari 6 indikator kinerja, sementara ini hanya ada 2 (dua) indikator yang bisa diperoleh capaian kinerjanya, lihat tabel 2.30.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Balikpapan 2010 - 2015

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	4,50	5,36	5,36	58,32	47,67
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	77,58	51,84	50,84	43,99	47,23

Sumber: LPPD

Dari tabel 2.30 tersebut di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kota Balikpapan sangat baik. Pada tahun 2010

kinerjanya baru mencapai 4,50% namun pada tahun 2014 dan 2015 masing-masing telah mencapai 47,67% dan 52,38%. Artinya pada tahun 2015 lebih banyak karyawan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah.

Untuk partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Balikpapan mengalami penurunan. Pada tahun 2010 mencapai 77,58%, tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, dan pada tahun 2015 tinggal 42,45%. Hal ini mungkin dikarenakan lapangan kerja/usaha sebagaimana digambarkan dalam PDRB Kota Balikpapan lebih banyak di sektor konstruksi/bangunan.

1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga, akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Tabel 2.31
Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-rata Anggota Keluarga Kota Balikpapan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah		
		Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
1	Balikpapan Timur	28.336	86.583	3,05
2	Balikpapan Barat	35.233	107.047	3,04
3	Balikpapan Utara	53.740	163.980	3,05
4	Balikpapan Tengah	41.971	121.918	2,09
5	Balikpapan Selatan	52.535	154.183	2,93
6	Balikpapan Kota	35.711	102.139	2,86
JUMLAH		247.526	735.850	2,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan 2015

Berdasarkan tabel 2.31. dapat diketahui banyaknya Kepala Keluarga yang ada di Kota Balikpapan yaitu 247.526 Kepala Keluarga. Dengan jumlah penduduk sebanyak 735.850 jiwa, maka rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Balikpapan tahun 2015 berkisar antara 2-3 orang. Hal ini menunjukkan

bahwa rata-rata anggota keluarga pada setiap kepala keluarga merupakan keluarga inti.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Capaian kinerja sub urusan Keluarga Sejahtera di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel 2.32. Dari data tabel tersebut terlihat kinerja Pra Keluarga Sejahtera di Kota Balikpapan mengalami kemajuan yang cukup bagus. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dari 123 KK pada tahun 2010 menjadi 50 KK pada tahun 2014. Sedangkan untuk Keluarga Sejahtera I berfluktuasi, namun dibandingkan dengan tahun 2010 jumlah Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan dari 9.350 KK menjadi 9.056 KK pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 10.372 KK. Untuk KS II, KS III dan KS III+ pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 masing-masing menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015 tidak dilakukan pendataan keluarga Pra KS dan KS I – KS III+.

Tabel. 2.32
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kota Balikpapan 2011 - 2015

Jumlah	Pra Ks	KS I	KS II	KS III	KS III+	Jumlah
2010	123	9.350	52.740	61.045	25.245	148.503
2011	147	8.749	53.364	66.242	25.814	154.316
2012	147	8.749	53.364	66.242	25.814	154.316
2013	52	9.056	56.291	60.279	25.050	150.725
2014	50	10.372	53.344	56.235	23.807	143.808

m. Sosial

Capaian kinerja urusan Sosial di Kota Balikpapan tahun 2010-2014 menunjukkan kinerja yang berfluktuatif. Hal ini dimungkinkan karena migrasi penduduk yang sangat cepat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian setempat. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.33, untuk sarana sosial seperti pantai asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebanyak 27 unit menjadi 32 unit pada tahun 2014. Capaian ini harus terus ditingkatkan, khususnya untuk panti jompo sesuai dengan kebijakan Kota Balikpapan untuk menjadi kota nyaman bagi lansia.

Tabel. 2.33
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kota Balikpapan 2011 - 2015

Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	29	29	28	32	33
Jumlah PMKS	Orang	N/A	11.062	12.879	10.700	11.046
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	19,77	84,37	13,27	81,42	98,80

Sumber: LPPD dan Lakip Disnakersos 2013-2014

Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 kinerjanya mencapai 100,00%, namun pada tahun 2012 dan 2014 hanya 84,37% dan 81,42%. Kinerja terendah dialami pada tahun 2011 dan 2014, masing-masing 19,77% dan 81,42%. Sementara pada tahun 2015 mengalami peningkatan cakupan sebesar 98,80%.

n. Ketenagakerjaan

Angka partisipasi angkatan kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. (Sensus Penduduk 2000, hal : xxi). Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. (Sensus Penduduk 2000, hal : xxi). Adapun APAK Kota Balikpapan pada tahun 2014 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.34. berikut ini.

Tabel. 2.34
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Balikpapan Tahun 2014

No	Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Tenaga Kerja	APAK (%)
		Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah			
1	15-19	1.360	54.366	55.726	1.020	56.746	98,20
2	20-24	14.888	35.667	50.555	7.989	58.544	86,35
3	25-29	33.335	15.398	48.733	16.541	65.274	74,66
4	30-34	42.599	9.537	52.136	22.674	74.810	69,69
5	35-39	39.730	5.783	45.513	22.436	67.949	66,98

No	Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Tenaga Kerja	APAK (%)
		Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah			
6	40-44	32.872	2.912	35.784	20.083	55.867	64,05
7	45-49	26.086	1.538	27.624	17.341	44.965	61,43
8	50-54	20.474	988	21.462	14.163	35.625	60,24
9	55-59	14.494	1.051	15.545	11.201	26.746	58,12
10	60-64	9.287	1.279	10.566	7.620	18.186	58,10
Jumlah		235.125	128.519	363.644	141.068	504.712	72,05

Sumber : Database SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tahun 2014

Dari Tabel 2.34. diatas menunjukkan bahwa APAK Kota Balikpapan sebesar 72,05%, artinya bahwa terdapat 72,05% penduduk usia 15-64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Selanjutnya APAK Kota Balikpapan untuk penduduk pada kelompok usia 55-59 tahun mempunyai nilai paling rendah yaitu 58,10%, dan penduduk pada kelompok usia 15-19 tahun mempunyai APAK paling tinggi yaitu 98,20%.

Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Balikpapan dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada tahun 2009 tercatat jumlah angkatan kerja sebanyak 245.681 orang dan mengalami kenaikan yang cukup besar setiap tahunnya, rata-rata > 17.000 orang. Tingginya angkatan kerja ini dikarenakan banyaknya orang mencari pekerjaan setiap tahunnya, rata-rata > 31.700 orang.

Demikian pula halnya dengan Bukan Angkatan Kerja. Porsi terbesar yang bukan angkatan kerja kegiatan utamanya adalah mengurus rumah tangga, diikuti oleh kegiatan sekolah. Untuk jelasnya, lihat tabel 2.35.

Tabel. 2.35
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja

Kegiatan Utama	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Angkatan Kerja	245.681	259.391	286.361	278.820	281.485	331.280
Bekerja	230.602	228.897	251.588	253.857	259.335	300.092
Mencari Pekerjaan	15.079	30.494	34.773	24.963	22.150	31.188
Bukan Angkatan Kerja	137.562	141.496	127.949	147.142	154.035	173.695
Sekolah	26.827	34.251	29.370	34.423	41.398	40.620
Mengurus Rumah tangga	93.019	87.933	85.968	100.479	96.126	113.737
Lainnya	17.716	19.312	12.611	12.240	16.511	19.339
Jumlah	383.243	400.887	414.310	425.962	435.520	504.975

Sumber: BPS*) Angka Proyeksi

Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Untuk tenaga kerja menurut lapangan kerja, jenjang pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.36. Tenaga kerja menurut lapangan

kerja berfluktuasi, dengan jumlah tenaga kerja terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 1.144 orang.

Tabel. 2.36

Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja	2.659	3.100	1.144	3.646	325
2	Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan					
	SD	267	360	377	30	34
	SLTP	161	300	333	136	511
	SLTA	6.942	6.600	5.233	1.907	2.581
	DIPLOMA	2.004	2.165	2.362	1.684	1.861
	S1	5.222	5.624	5.555	3.072	3.509
	S2	28	47	74	48	51
3	Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-laki	6.286	6.114	6.660	2.981	3.996
	Perempuan	8.338	8.982	7.274	3.896	4.488
	Jumlah	14.624	15.096	13.934	6.877	8.484

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan

Tenaga kerja menurut jenjang pendidikan didominasi oleh tenaga kerja lulusan SLTA, diikuti lulusan S1 dan Diploma. Untuk tenaga kerja menurut jenis kelamin didominasi oleh tenaga kerja perempuan.

Jumlah dan Proporsi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja disetiap lapangan pekerjaan. Proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan menunjukkan distribusi atau penyebaran penduduk yang bekerja di suatu daerah pada waktu tertentu. Adapun proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.37. berikut ini.

Tabel. 2.37

Proporsi Jenis Pekerjaan di Kota Balikpapan Tahun 2014

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Proporsi Jenis Pekerjaan
1	Pegawai Negeri Sipil	9.764	4,38 %
2	TNI	3.933	1,76 %
3	POLRI	3.326	1,49 %
4	Nelayan/Perikanan	3.297	1,48 %
5	Karyawan Swasta	133.961	60,09 %
6	Karyawan Honorer	1.719	0,77 %
7	Buruh Harian Lepas	32.483	14,57 %
8	Guru	5.187	2,33 %
9	Pelaut	586	0,26 %
10	Pedagang	13.416	6,02 %
11	Wiraswasta	15.260	6,85 %
	Jumlah	222.932	100 %

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel 2.37. di atas dapat dilihat bahwa persentase terbesar untuk jenis pekerjaan adalah karyawan swasta yaitu sebesar 60,09%.

Ditinjau dari sisi penduduk, penduduk yang banyak bekerja sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, tenaga medis dan tenaga edukasi adalah penduduk kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota, lihat tabel 2.38.

Tabel. 2.38
Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2015

Jenis Pekerjaan	Kecamatan					
	Balikpapan Barat	Balikpapan Utara	Balikpapan Timur	Balikpapan Tengah	Balikpapan Kota	Balikpapan Selatan
Pegawai Negeri	1.190	3.840	1.596	2.143	3.513	3.731
Karyawan	14.699	28.842	10.698	28.453	20.705	30564
Buruh	7.898	6.512	3.941	5.599	3.845	5.105
Tukang	212	322	140	307	117	144
Pedagang	3.498	1.937	1.244	2.346	2.442	1.706
Petani	227	2.079	2.420	120	53	577
Profesi	261	794	208	372	200	331
Edukasi	602	1.485	595	1.004	741	1.080
Medis	137	577	114	321	394	532
Lain-Lain	4.463	6.867	4.020	4.563	3.931	4.713

Tingkat pengangguran terbuka

Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT), pada tahun 2009 hanya 6,14%, kemudian naik menjadi 11,76% pada tahun 2010 dan naik lagi menjadi 12,14% pada tahun 2011. Namun tingkat pengangguran terbuka ini dapat ditekan menjadi 8,95% pada tahun 2012 dan turun lagi menjadi 7,87% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka ini menurun menjadi sebesar 7,56%, untuk jelasnya lihat tabel 2.39.

Tabel. 2.39
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan 2009 - 2014

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,14%	11,76%	12,14%	8,95%	7,87%	7,56%

*) Angka Proyeksi

o. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia telah dicetuskan oleh Bung Hatta namun perkembangannya baik usaha maupun jumlahnya masih kurang mengembirakan, khususnya Kota Balikpapan dan Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan perkembangannya koperasi yang ada di Kota Balikpapan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari 2005 sampai dengan 2011 belum mengalami peningkatan yang signifikan yaitu rata-rata hanya 2,16 % per tahun, sedangkan koperasi yang aktif meningkat rata-rata 8,49 % per tahun. Menurut kelompoknya koperasi yang ada di Kota Balikpapan tahun 2011 sejumlah 24 kelompok antara lain: KUD 5 unit, Koperasi Peternakan 1 unit, Koperasi Nelayan 8 unit, Kopti 1 unit, Kopinkra 1 unit, Koppantren 9 unit, Kopkar 97 unit, Koperasi Angkatan Darat 19 unit, Koperasi Angkatan Laut 1 unit, Koperasi Angkatan Udara 2 unit, Koperasi Kepolisian 7 unit, Koperasi Serba Usaha 186 unit, Koperasi Pasar 6 unit, Koperasi Simpan Pinjam 12 unit, Koperasi Pegawai Negeri 65 unit, Koperasi Wanita 18 unit, Koperasi Veteran 1 unit, Koperasi Wredatama 1 unit, Koperasi Pepabri 1 unit, Koperasi Mahasiswa 1 unit, Koperasi Pemuda 1 unit, Koperasi Lainnya 46 unit, Koperasi KJKS 2 unit dan Koperasi Sekunder 2 unit.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ditinjau dari jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Balikpapan mengalami penurunan. Kalau pada tahun 2013 sempat naik menjadi 5.465 unit usaha dan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 9.956 orang, pada tahun 2014 turun menjadi 4.463 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.349 orang.

Ditinjau dari sisi omzet sempat mengalami kenaikan dari Rp519,92 milyar pada tahun 2012 naik menjadi Rp1,174 trilyun pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 turun kembali menjadi Rp380,83 milyar, lihat tabel 2.40.

Tabel. 2.40
Perkembangan UMKM di Kota Balikpapan mulai tahun 2012s/d 2014

Uraian	2012	2013	2014
UNIT USAHA			
MIKRO	5.054	4.990	3.847
KECIL	310	394	483
MENENGAH	10	81	133
JUMLAH	5.374	5.465	4.463
TENAGA KERJA (Orang)			
MIKRO	8.060	8.193	6.771
KECIL	1.028	1.520	1.186
MENENGAH	111	243	392
JUMLAH	9.199	9.956	8.349
OMZET (Rp,-)			
MIKRO	347.513.645.049	267.585.423.034	188.927.531.600
KECIL	133.188.001.405	205.019.853.000	119.394.572.000
MENENGAH	39.218.000.000	701.743.881.755	72.508.756.000
JUMLAH	519.919.646.454	1.174.349.157.789	380.830.859.600

Sumber: Dinas Perindagkop Kota Balikpapan

p. Penanaman Modal

Investasi di Kota Balikpapan di dominasi oleh investasi swasta nasional, baik dari sisi nilai investasi maupun penyerapan tenaga kerja investasi tersebut. Posisi kedua diduduki oleh PMA dan diikuti oleh PMDN. Nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.41

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Nilai Investasi di Kota Balikpapan Tahun 2007-2015

TAHUN	SWASTA NASIONAL				PMA			PMDN			JUMLAH TOTAL			
	Investasi	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Luasan Lahan	Investasi	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Luasan Lahan
2007	1.820.650.000.000	42	1.692	555,2889	572.678.000.000	23	1.142	126.700.000.000	2	82	2.520.028.000.000	67	2.916	555,2889
2008	4.915.300.598.000	92	3.442	1.819,1403	404.496.000.000	24	1.012	674.589.300.000	7	332	5.994.385.898.000	123	4.786	1.819,1403
2009	3.206.250.000.000	75	4.596	676,6435	410.178.000.000	25	840	432.000.000.000	4	166	4.048.428.000.000	104	5.602	676,6435
2010	3.313.634.928.400	43	2.093	212,2350	3.700.208.000.000	37	164	10.365.000.000	1	58	7.024.207.928.400	81	2.315	212,2350
2011	7.153.095.950.000	50	5.581	528,1633	2.057.654.000.000	42	659	18.250.000.000	1	56	9.228.999.950.000	93	6.296	528,1633
2012	3.047.142.712.650	69	11.610	1.329,6546	1.490.887.000.000	30	602	50.000.000.000	1	25	4.588.029.712.650	100	12.237	1.329,6546
2013	22.038.011.153.520	138	12.998	1.909,1294	4.346.100.000.000	28	1.038	260.469.800.000	7	267	26.644.580.953.520	173	14.303	1.909,1294
2014	10.796.312.035.444	160	9.766	1.225,9996	35.808.000.000	3	14	2.350.000.000	2	39	10.834.470.035.444	165	9.819	1.225,9996
2015*	4.287.755.765.000	32	2.191	98,1583	-	-	-	-	-	-	4.287.755.765.000	32	2.191	98,1583
TOTAL	56.290.397.378.014	669	51.778	8.256,2546	13.018.009.000.000	212	5.471	1.574.724.100.000	23	986	70.883.130.478.014	904	58.235	8.256,2546

Keterangan: * Sampai Dengan Maret 2015

Letak dan kondisi geografis Kota Balikpapan yang sangat strategis adalah salah satu daya tarik minat investor untuk menanamkan modalnya, posisi strategis tersebut antara lain adalah:

- 1) Terletak ditengah jaringan transportasi Trans Kalimantan dan Trans Nasional;
- 2) Pintu gerbang utama wilayah Kalimantan Timur dengan adanya Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sepinggian dan ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia);
- 3) Tempat kedudukan Kodam VI/Mulawarman, POLDA Kaltim dan beberapa Kantor Pusat BUMN Wilayah Kalimantan;
- 4) Kota Embarkasi Haji Kelima di Indonesia;
- 5) Sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) ke sepuluh di Indonesia;
- 6) Pusat Industri pengilangan minyak untuk Kawasan Timur Indonesia;
- 7) Basis dari beberapa perusahaan asing yang bergerak dibidang pengeboran minyak dan gas bumi.

Jika dilihat dari pertumbuhan dan sharenya terhadap keseluruhan investasi di Kota Balikpapan, share terbesar diduduki oleh swasta nasional, diikuti investasi PMA, dan PMDN. Sementara dilihat dari pertumbuhan investasi, investasi yang dilakukan oleh swasta nasional, PMA, dan PMDN

fluktuatif. Pertumbuhan dan share investasi di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.42
Pertumbuhan dan Share Investasi Kota Balikpapan Tahun 2010-2014

Tahun	Swasta Nasional		PMA		PMDN	
	Δ	Share	Δ	Share	Δ	Share
2010		47,17		52,68		0,15
2011	115,87	77,51	-44,39	22,30	76,07	0,20
2012	57,40	66,42	-27,54	32,50	173,97	1,09
2013	623,24	82,71	191,51	16,31	420,94	0,98
2014	51,01	99,65	-99,18	0,33	-99,10	0,02

Sumber : BMP2T Kota Balikpapan, diolah

Jika dilihat dari sisi perencanaan, hal yang cukup menarik adalah nampaknya Kota Balikpapan tidak menyusun target capaian investasi. Dengan tidak ditargetkannya capaian realisasi investasi, maka besar kemungkinan strategi untuk mencapainya kurang mengimplementasikan strategi unggulan atau “asusual”. Oleh karena itu, potensi ke depan diharapkan bisa lebih dioptimalkan dengan sistem perencanaan yang ideal. Hal ini merupakan tantangan bagi Kota Balikpapan untuk melakukan berbagai strategi unggulan dan terobosan guna meningkatkan kinerja investasi di masa yang akan datang.

Kebijakan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah diarahkan kepada penguatan struktur ekonomi Balikpapan pada masa yang akan datang agar tidak lagi tergantung pada industri Migas dan penguatan ekonomi yang berbasis kepada kegiatan ekonomi kerakyatan dalam rangka memecahkan masalah jangka pendek yaitu pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Upaya pencapaian sasaran investasi di Kota Balikpapan sangat terkait dengan penyediaan infrastruktur kota Balikpapan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi warga masyarakat seperti, jalan, pemukiman, air bersih, kebersihan kota, dan drainase kota. Demikian pula halnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota cukup banyak kegiatan yang telah dilakukan, namun masih menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya aktifitas masyarakat dalam pembangunan khususnya pengolahan lahan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu upaya pengembangan infrastruktur perkotaan dan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan kota dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Sarana dan Prasarana Daerah yang terpenting dalam simpul distribusi lalu lintas perekonomian suatu daerah adalah prasarana jalan karena

berfungsi menunjang kelancaran arus barang dan jasa. Model transportasi di Kota Balikpapan meliputi transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang menghubungkan pusat kota dengan seluruh wilayah Balikpapan, yang meliputi angkutan dalam kota dan antar kota di wilayah sekitar Balikpapan. Alat angkutan laut untuk melayani penyeberangan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota dan Kabupaten lain.

Di Kota Balikpapan terdapat 8 (delapan) kelompok kegiatan investasi berdasarkan Jenis Usaha, adapun kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.43
Kelompok Kegiatan Investasi berdasarkan Jenis Usaha

Kelompok kegiatan	Jenis Usaha
Prasarana Wilayah	Perumahan, Sarana Olah Raga, Mess Karyawan, Taman, Jembatan, Coastal Road
Pariwisata	Hotel, Apartemen, Villa, Taman Rekreasi, Museum
Perdagangan	Pasar Induk, Penampungan Oli, Ruko, Mall, Supplier Barang (spare part alat berat)
Kesehatan	Rumah Sakit, Klinik, Apotik
Industri	Workshop, Pabrik, Bengkel, Percetakan, Galangan Kapal, Industri Pengolahan, Industri Aneka, Stock Pile, Kawasan Industri Karinangau (KIK)
Pertanian	Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pusat Niaga Nelayan Terpadu
Telekomunikasi	Tower, Roof Top
Sumber Energi	Pembangkit Listrik

Realisasi unit usaha/investor PMDN dan PMA Kota Balikpapan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.44
Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 2014

No	KELOMPOK KEGIATAN	UNIT USAHA	REALISASI NILAI INVESTASI (Rp.)	REALISASI TENAGA KERJA (Orang)
1	Prasarana Wilayah	8	484.548.682.009,00	875
2	Pariwisata	1	12.000.000.000,00	114
3	Perdagangan	25	1.963.041.383.290,00	1.158
4	Kesehatan			
5	Industri	18	1.198.274.629.353,00	1.705
6	Pertanian			
7	Telekomunikasi	5	8.000.000.000,00	40
8	Sumberdaya Energi			
Total		57	3.665.864.694.652,00	3.892

Sumber Data : BPMP2T Kota Balikpapan

Tabel 2.45
Realisasi investasi Penanaman Modal Asing tahun 2014

No	KELOMPOK KEGIATAN	Unit Usaha	REALISASI NILAI INVESTASI (Rp.)	REALISASI TENAGA KERJA (Orang)
1	Prasarana Wilayah			
2	Pariwisata			
3	Perdagangan	6	98.774.861.404,00	264
4	Kesehatan			
5	Industri	4	340.116.925.029,00	354
6	Pertanian			
7	Telekomunikasi			
8	Sumberdaya Energi			
Total		10	438.891.786.433,00	618

Sumber Data : BPMP2T Kota Balikpapan

Tabel 2.46
Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 2015

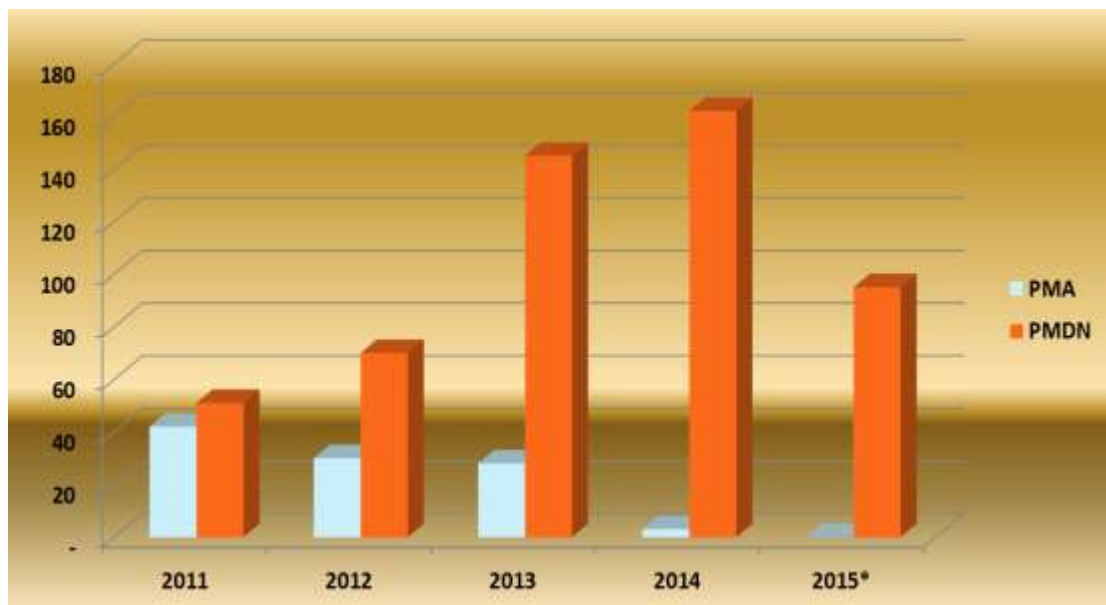
No	KELOMPOK KEGIATAN	PROYEK (UU)	REALISASI NILAI INVESTASI (Rp.)	REALISASI TENAGA KERJA (Orang)
1	Prasarana Wilayah	5	129.313.000.000,00	154
2	Pariwisata	2	126.650.000.000,00	138
3	Perdagangan	1	846.000.000.000,00	300
4	Kesehatan			618
5	Industri	3	628.409.341.466,00	704
6	Pertanian			
7	Telekomunikasi			
8	Sumberdaya Energi			
Total		11	1.730.372.341.466,00	1.914

Sumber Data : BPMP2T Kota Balikpapan

Realisasi Investasi PMA/PMDN selama Tahun 2014 mencapai 57 Proyek dengan total investasi Rp3,6 trilyun dan menyerap tenaga kerja 3892 Orang, Sedangkan realisasi investasi PMA/PMDN selama Tahun 2015 mencapai 11 Proyek dengan total investasi 1,7 trilyun Rupiah dan menyerap tenaga kerja 1.914 Orang.

Trend pertumbuhan investasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah investasi dari PMDN yang mencapai puncaknya selama tahun 2014 kemudian mengalami perlambatan selama tahun 2015. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya krisis global, namun tetap menunjukkan tren positif berbanding terbalik dengan PMA yang mengalami penurunan pertumbuhan.

Grafik 2.17
Trend perkembangan proyek investasi PMDN/PMA di Kota Balikpapan selama 5 tahun terakhir



Sumber Data : BPMP2T Kota Balikpapan

Kebijakan/langkah pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya mendorong realisasi investasi antara lain melalui:

1. Penetapan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, yang mengatur distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya, sehingga memberikan kepastian wilayah untuk investasi;
2. Memberikan kemudahan perizinan dan akses permodalan diantaranya melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pengembangan pelayanan perizinan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi serta Program Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) bekerjasama dengan Bank Kaltim dan Askrindo;
3. Pengembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK), Kawasan Industri Kecil Sumber (KIKS), dan percepatan pembangunan Kawasan Industri Hasil Pertanian dan Kelautan (KIKHP&K);

4. Regulasi yang terkait dengan pelayanan publik dan perizinan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Perda ini memberikan kemudahan bagi investor untuk melakukan perizinan di kawasan tertentu berupa keringanan pajak daerah dan retribusi daerah.

q. Kebudayaan

Capaian kinerja urusan kebudayaan di Kota Balikpapan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 2.47. Dari tabel tersebut bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya selalu tidak sama ataupun semakin meningkat pelaksanaannya. Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2010 mencapai 11 kali atau hampir setiap bulan sekali. Namun pada tahun selanjutnya hanya 4 kali, naik menjadi 5 kali pada tahun 2012, namun turun lagi menjadi 3 kali dan terakhir pada tahun 2014 sebanyak 7 kali. Dikaitkan dengan potensi pariwisata, seyogyanya sebagai daya tarik wisata, penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan secara berkala, paling sedikit 3 kali setahun di Kota Balikpapan dan 3 kali diluar Kota Balikpapan (misalnya: Bali, Yogyakarta dan Jakarta).

Untuk sarana penyelenggaraan seni dan budaya juga tidak sama jumlahnya setiap tahun. Paling sedikit 3 buah pada tahun 2011 dan 2012, serta paling banyak 5 buah pada tahun 2010 dan 2014.

Sedangkan benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan memperlihatkan kinerja yang menggembirakan, yakni 97,30% pada tahun 2010 dan 100,00% pada tahun 2012, 2013 dan 2014.

Tabel. 2.47
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Balikpapan 2010 - 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	11	4	5	3	7
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	5	3	3	4	5
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	97,30	17,86	100,00	100,00	100,00

Sumber: LPPD

r. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olah raga, khususnya organisasi pemuda dan organisasi olah raga dan kegiatannya belum dapat disajikan, karena keterbatasan ketersediaan data.

Sedangkan capaian kinerja untuk Gelanggang/Balai Remaja dan Lapangan Olah Raga adalah sebagai berikut:

Rasio Gelanggang/Balai Remaja di Kota Balikpapan bisa dikatakan tetap untuk tahun 2010, 2011 dan 2012, yaitu antara 0,00470 – 0,00490 atau 4,7-4,9 per 1.000 penduduk. Tahun 2013 mengalami penurunan, hanya 2,99 per 1.000 penduduk. Namun pada tahun 2014 naik menjadi 30 per 1.000 penduduk.

Rasio Lapangan Olah Raga di Kota Balikpapan berkisar antara 0,20 - 0,23 atau 20 lapangan olah raga per 1.000 penduduk dan pada tahun 2014 naik menjadi 23 lapangan olah raga per 1.000 penduduk. Untuk jelasnya lihat tabel 2.48.

Tabel. 2.48
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Balikpapan 2010 - 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Gelanggang /Balai Remaja (selain milik swasta) (Per 1000 penduduk)	Rasio	0,00490	0,00470	0,00470	0,00299	0,03
Lapangan olahraga (Per 1000 penduduk)	Rasio	0,200	0,210	0,210	0,010	0,23

Sumber: LPPD

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Kota Balikpapan melakukan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP rata-rata 1 kegiatan dalam 1 tahun, kecuali ada event lain yang melibatkan pemerintah kota bisa mencapai 3 atau 4 kegiatan. Untuk kegiatan pembinaan politik dilakukan antara 3–4 kegiatan pertahun. Untuk jelasnya. Lihat tabel 2.49.

Tabel. 2.49
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kota Balikpapan 2010 – 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kegiatan	4	3	1	1	1
Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	4	3	1	5	4

Sumber: LPPD

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian merupakan urusan wajib yang meliputi kewenangan pemerintah kota dan pemerintahan umum lainnya (organisasi, hukum, dan lain-lain), pengelolaan keuangan, perangkat daerah (termasuk DPRD dan Inspektorat, dan camat) serta kepegawaian dan persandian. Urusan ini sebenarnya cukup banyak indikator kinerjanya, namun hampir ditemukan dibanyak daerah kurang mendapat perhatian, sehingga tidak tersajikan dengan baik. Adapun cakupan kinerja urusan ini, dapat dilihat pada tabel 2.50.

Tabel. 2.50
Capaian kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah Kota Balikpapan tahun 2010 -
2014

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Pertumbuhan ekonomi						
<i>Dengan Migas</i>	%	3,40	3,30	5,48	3,80	4,29
<i>Tanpa Migas</i>	%	8,34	5,35	5,52	4,16	5,11
Sistim Informasi Manajemen Pemda	buah	6	4	6	13	43
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (Nilai Interval Konversi IKM = 62,51 – 81,25, kategori Baik)	Tidak Baik/Kurang Baik/Baik/Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: LPPD

u. Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan yang sangat strategis yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Balikpapan. Capaian kinerja urusan ketahanan pangan di Kota Balikpapan sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama semula hanya 1,80% pada tahun 2011 telah meningkat menjadi 28,40% pada tahun 2014. Untuk jelasnya lihat tabel 2.51.

Tabel. 2.51
Capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan Kota Balikpapan 2010 - 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Ketersediaan pangan utama	%		1,80			28,40

Sumber: LPPD

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Balikpapan tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 2.52. Kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) selalu berfluktuasi. Capaian kinerja tertinggi pernah dicapai pada tahun 2013 sebesar 91,18%.

Capaian kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan PKK terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan mencapai 100,00% pada tahun 2014. Jumlah LSM yang ada di Kota Balikpapan sejak tahun 2011 sudah tidak mengalami penambahan, yaitu 15 buah. Sedangkan PKK aktif dan Posyandu Aktif capaian kerjanya sudah sangat baik, yaitu 100,00% selama 5 tahun (2010 – 2015). Untuk jelasnya lihat tabel 2.52.

Tabel 2.52
Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Balikpapan 2010 - 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%			58,82	91,18	58,22
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%		37,00	41,70	40,00	100,00
Jumlah LSM	buah	12	15	15	15	15
PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Posyandu aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: LPPD

w. Statistik

Capaian kinerja Urusan Statistik di Kota Balikpapan tahun 2010-2014, sudah sangat baik, karena buku Kota Balikpapan dalam Angka sudah tersedia (ada) setiap tahun secara rutin. Demikian pula dengan buku PDRB Kota Balikpapan tersedia untuk setiap tahunnya, lihat tabel 2.53. Yang diperlukan adalah melakukan kerja sama dengan BPS setempat untuk melengkapi data yang diperlukan oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk mengukur kinerja program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Tabel 2.53
Capaian kinerja Urusan Statistik Kota Balikpapan 2010 - 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Buku "Kota dalam angka"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kota"		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: LPPD

x. Kearsipan

Capaian kinerja Urusan Kearsipan Kota Balikpapan tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 2.54. Dari tabel tersebut untuk Pengelolaan arsip secara baku kinerja sangat baik, karena capaian kerjanya dari tahun 2012 – 2014 sudah mencapai 100%. Artinya pengelolaan arsip sudah mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan arsip secara benar, baku atau standar.

Demikian pula dengan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan dari tahun ke tahun terus meningkat. Jika pada tahun 2010 hanya ada 2 kegiatan, maka pada tahun 2011 dan 2012 sudah naik menjadi 4 kegiatan, tahun 2013 naik menjadi 9 kegiatan dan tahun 2014 naik lagi menjadi 11 kegiatan.

Tabel. 2.54
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kota Balikpapan tahun 2010 – 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Pengelolaan arsip secara baku	%	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	4	4	9	11

Sumber: LPPD

y. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, tidak semuanya dianalisis karena belum lengkapnya data yang diterima oleh tim pengkaji. Untuk selengkapnya capaian kinerja urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat pada tabel 2.55.

Tabel. 2.55
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Kota Balikpapan 2010 – 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Website milik pemerintah daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Pameran/expo	kali	4	24	55	6	7

Sumber: LPPD

Dari tabel 2.55 di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kota Balikpapan sudah memiliki Website dengan alamat www.balikpapan.go.id. Keberadaan website ini sudah ada sejak tahun 2008. Sedang keikut-sertaan Kota Balikpapan dalam pameran/expo sudah sangat baik rata-rata 4-7 kali, bahkan pada tahun 2011 mencapai 24 kali dan tahun 2012 mencapai 55 kali.

z. Perpustakaan

Capaian kinerja Urusan Perpustakaan Kota Balikpapan tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 2.56. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa pemerintah Kota Balikpapan memiliki 1 unit perpustakaan milik daerah, dengan pengunjung yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika pada tahun 2010 jumlah pengunjungnya hanya 6.378 orang, maka untuk tahun-tahun berikutnya jumlah pengunjungnya selalu meningkat secara signifikan. Jumlah pengunjung tahun 2011 meningkat menjadi 18.665 pengunjung (naik < 300%), tahun 2012 meningkat menjadi 56.775 pengunjung (naik > 300% dibandingkan dengan tahun 2011) dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 73.120 pengunjung.

Tabel. 2.56
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Balikpapan 2010 - 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Perpustakaan Pemerintah Daerah		1	1	1	1	1
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	6.378	18.665	56.775	73.120	
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	22,41	23,00	23,00	32,74	33,06

Sumber: LPPD

Peningkatan jumlah pengunjung tersebut seiring dengan bertambahnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa prosentase koleksi buku di perpustakaan daerah Kota Balikpapan terus meningkat. Jika pada tahun 2010 hanya 22,41%, maka pada tahun 2011 naik menjadi 23,00%. Kemudian tahun 2013 naik menjadi 32,74% dan tahun 2014 naik lagi menjadi 33,06%.

Dari sisi total jumlah perpustakaan di Kota Balikpapan, dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.57 berikut ini:

Tabel. 2.57
Jumlah Perpustakaan di Kota Balikpapan

Perpustakaan	2012	2013	2014
Formal	124	140	240
Informal	10	17	30

Sumber: LAKIP Pemerintah Kota Balikpapan

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Capaian kinerja Urusan Pertanian Kota Balikpapan, tidak menggambarkan kinerja yang mendukung kinerja perekonomian Kota Balikpapan. Hal ini karena potensinya tidak begitu besar. Adapun capaian

kinerja urusan pertanian Kota Balikpapan tahun 2010-2011 dapat dilihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kota Balikpapan 2010 – 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	2,86	4,32	14,38	9,60	21,29
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	1,11	3,95	1,64	2,94	2,76

Sumber: LPPD

Dari tabel 2.58 tersebut diatas capaian kinerja urusan pertanian sangat berfluktuatif, sesuai potensi dan luas lahan pertanian yang ada di Kota Balikpapan. Demikian pula sumbangannya terhadap pembentukan PDRB Kota Balikpapan.

b. Kehutanan

Capaian kinerja urusan kehutanan Kota Balikpapan 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 2.59. Dari tabel 2.71 tersebut, kinerja Rehabilitasi hutan dan lahan kiritis di Kota Balikpapan sangat fluktuatif. Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan sangat tergantung dari luas lahan dan ketersediaan anggaran. Kerusakan kawasan hutan di Kota Balikpapan relatif kecil, karena rusaknya kawasan hutan pada umumnya akibat kebakaran hutan dan longsor.

Tabel. 2.59
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kota Balikpapan 2010 – 2014

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	17,98	0,03	0,93	28,79	0,29
Kerusakan Kawasan Hutan	%	4,79	0,00	0,19	5,00	0,00

Sumber: LPPD

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sangat kecil sebagaimana yang digambarkan pada tabel 2.60. Kontribusi sektor pertambangan terhadap pembentukan PDRB Kota Balikpapan sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan memang Kota Balikpapan tidak memiliki potensi bahan tambang. Keberadaan industri pengolahan minyak (kilang minyak) di Kota Balikpapan, murni sebagai industri pengolahan dengan bahan baku dari luar Kota Balikpapan. Demikian pula dengan industri pengolahan batubara, bahan bakunya dari daerah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	0,06	0,13	0,07	0,12	0,12

Sumber: LPPD

d. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan, dimana di tahun 2015, total jumlah kunjungan wisatawan di 24 obyek wisata tercatat sebanyak 2.2 juta orang.

Tabel. 2.61
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Data Kunjungan Wisatawan tahun 2011 – 2015

No.	NAMA OBJEK WISATA	2011	2012	2013	2014	2015
1	PANTAI MELAWAI	118.375	121.059	160.922	165.497	166.766
2	PANTAI LAMARU	62.446	37.651	150.122	150.213	151.826
3	PANTAI MANGGAR	362.406	371.719	201.350	197.800	250.100
4	PANTAI POLDA / KEMALA	11.900	12.176	14.466	21.308	28.099
5	PENANGKARAN BUAYA TERITIP	47.775	52.029	54.231	66.902	69.745
6	TAMAN BEKAPAI	138.380	141.515	171.564	180.974	190.019
7	MONPERA	246.317	251.832	264.512	268.632	277.403
8	HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN	7.501	6.221	4.938	5.055	5.079
9	AGRO WISATA KM - 23	34.636	37.861	25.386	38.550	39.840
	WANA WISATA KM - 10	-	-	-	6.385	6.625
11	HUTAN MANGROVE MARGOMULYO	2.255	2.302	1.554	7.837	9.333
12	PUSAT OLEH-OLEH PASAR INPRES KEBUN SAYUR	625.917	639.967	636.531	699.010	773.820
13	WATER PARK REGENCY	26.320	26.903	27.297	102.712	109.632
14	TUGU JEPANG DAN MAKAM JEPANG – LAMARU	273	126	121	2.186	2.055
15	MANGROVE TERITIP	-	-	-	10.326	9.591
16	WATER PARK BUKIT DAMAI INDAH	-	-	-	8.650	8.350
17	TUGU AUSTRALIA	-	-	-	1.483	3.144
18	MUSEUM KODAM VI MULAWARMAN	-	-	-	2.039	1.902
19	JEMBATAN ULIN KARIANGAU	-	-	-	9.887	8.942
20	KAWASAN WISATA KULINER BANDAR BALIKPAPAN	-	-	-	104.332	106.827
21	PALM HILL GALLERY	-	-	-	5.980	4.690
22	KEBUN RAYA BALIKPAPAN	-	-	-	654	631
23	PANTAI ANGKASA LANUD BALIKPAPAN	-	-	-	-	575
	TOTAL	1.684.50	1.701.36	1.712.99	2.058.57	2.226.363

Pencapaian peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut ditunjang oleh peran aktif seluruh stakeholder terkait dan program/kegiatan pemerintah kota untuk pengembangan destinasi wisata melalui pembangunan, pemeliharaan/perbaikan/renovasi dan promosi pariwisata antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan desa wisata alam di kelurahan Teritip;
- Pengembangan wisata bahari/wisata minapolitan;
- Pelestarian cagar budaya;
- Pengembangan fasilitas wisata alam mangrove center;
- Pengembangan Kebun Raya Balikpapan.

Jumlah unit usaha perhotelan mengalami peningkatan di tahun 2015 sejumlah 74 buah dari sebelumnya di tahun 2014 sejumlah 69 buah.

Tabel. 2.62
Jumlah Hotel di Kota Balikpapan tahun 2014 – 2015

NO	KLASIFIKASI HOTEL	TAHUN 2014	TAHUN 2015
1	BINTANG 5	3	3
2	BINTANG 4	7	8
3	BINTANG 3	11	16
4	BINTANG 2	4	4
5	BINTANG 1	5	4
6	MELATI	39	39
	TOTAL	69	74

Sumber Data : Disporabudpar Kota Balikpapan

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Tinjauan Agregat PDRB Kota Balikpapan Menurut Pengeluaran.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Propinsi Kalimantan Timur tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena propinsi Kalimantan Timur sebagian besar struktur ekonominya masih bertumpu pada ekspor komoditas berbasis Sumber Daya Alam (SDA), ditambah dengan ekonomi dan kebijakan negara tujuan ekspor yang kurang kondusif sehingga kinerja ekspor melambat. Sedangkan Kota Balikpapan struktur ekonominya bertumpu pada ekspor hasil industri terutama industri pengolahan migas. (Karena Balikpapan

tidak mempunyai pertambangan migas ataupun batu bara yang mengalami penurunan harga di pasar global). Perbaikan ekonomi di Balikpapan dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada komponen ekspor dan komponen PMTB, walaupun komponen pengeluaran rumah tangga semuanya mengalami perlambatan.

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Tabel. 2.63

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kota Balikpapan Tahun 2010-2014 (Miliar Rp)**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Konsumsi Rumah Tangga	11.809,59	13.491,79	15.440,55	17.576,30	19.491,42
Konsumsi LNPRT	187,05	205,83	227,94	256,80	287,22
Konsumsi Pemerintah	1.826,80	1.947,81	1.995,16	2.218,39	2.617,72
PMTB	19.102,80	20.953,48	24.477,98	25.698,03	28.650,99
Perubahan Inventori	279,94	380,72	475,42	559,02	759,67
Ekspor Neto	24.405,78	20.195,83	16.078,61	17.977,73	19.808,80
Total PDRB	57.611,96	57.175,46	58.695,65	64.286,27	71.615,82

Nilai PDRB Balikpapan (adh Berlaku) selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2011. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume nominal PDRB Balikpapan pada tahun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan terjadinya peningkatan pada masing-masing komponen pembentuknya.

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat daya saing daerah. Berikut ini diuraikan fasilitas wilayah/infrastruktur yang ada di Kota Balikpapan.

a. Infrastruktur Perhubungan

Sarana jalan raya adalah bagian dari sistem perhubungan utama di Kota Balikpapan. Selain itu ada sarana perhubungan pelabuhan Semayang dan perhubungan udara Internasional Sepinggian. Sebagai sarana utama jalan raya di Kota Balikpapan, panjang jalan di Kota Balikpapan pada tahun 2011 adalah sepanjang 799,42 km dengan rincian sesuai status jalan sebagai berikut :

- Jalan Nasional : 115,0 Km
- Jalan Propinsi : 221,07 Km
- Jalan Kota : 463,35 Km

Adapun kondisi fisik jalan tersebut sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat bahwa untuk jalan Nasional dalam kondisi baik sepanjang 97,65 km atau 84,91%, kondisi sedang sepanjang 15,33 Km atau 13,33% dan kondisi rusak 2 km. Untuk jalan Propinsi dalam kondisi baik sepanjang 146,43 km atau 66,23%, kondisi sedang sepanjang 51,43 Km atau 23,23% dan kondisi rusak 23,3 Km atau 10,49%. Sedangkan untuk jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 305,42 km atau 65,91%, kondisi sedang sepanjang 96,99 Km atau 20,93% dan kondisi rusak 60,94 Km atau 13,15%.

Sebagai kota yang secara fisik berbatasan dengan laut, maka Kota Balikpapan memiliki beberapa fasilitas pelabuhan baik pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus. Pelabuhan umum terdiri dari Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Fery Kariangau, Pelabuhan Kampung Baru. Sedangkan pelabuhan khusus terdiri dari Pelabuhan Pertamina, Pelabuhan Pendaratan Ikan Manggar, dan Pelabuhan yang dimiliki oleh perusahaan di Kawasan Industri Kariangau.

Keberadaan Pelabuhan Semayang yang berada di pusat kota saat ini menimbulkan bangkitan lalu-lintas yang cukup tinggi terlebih lagi adanya peningkatan bongkar muat barang dan penumpang. Oleh karena itu, di masa yang akan datang pelabuhan ini hanya akan dioperasikan untuk pelabuhan penumpang. Sedangkan pelabuhan bongkar muat barang akan dikembangkan di Kariangau.

Bandar Udara Sepinggian saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Namun kapasitas bandaranya relatif terbatas dalam

menampung penumpang. Oleh karena itu pengembangan bandara baik dari segi run way maupun terminal akan mampu meningkatkan pelayanan Bandara Udara Sepinggian.

Secara umum kondisi perhubungan Kota Balikpapan saat ini mulai menghadapi masalah serius dan semakin menjadi ancaman besar di masa datang bila tidak dilakukan terobosan penting. Terlebih lagi dengan perkembangan kota dan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi. Sehingga Sangat dibutuhkan sistem angkutan umum massal sebagai salah satu solusinya.

b. Sarana Lingkungan (Sanitasi, Drainase, Sampah)

1. Air Limbah

Berdasarkan laporan final Master Plan Air Limbah, perkiraan total produksi air limbah domestik (rumah tangga) untuk black dan grey water di Kota Balikpapan sampai tahun 2015 adalah sekitar 86.312 m³/hari. Untuk mengolah air limbah domestik Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai beberapa layanan yaitu Layanan IPAL Margasari, Layanan IPAL komunal dan Pemerintah Kota Balikpapan juga mempunyai MCK ++ berada di 2 kelurahan yaitu Kelurahan Margo Mulyo RT 26 dikelola oleh KSM Tirta Guna dengan jumlah pengguna 83 KK sedangkan Kelurahan Margo Mulyo RT 25 dikelola oleh KSM Sendang Makmur dengan jumlah pengguna 70 KK.

2. Drainase

Terdapat 86 (delapan puluh enam) saluran atau sungai yang langsung bermuara di teluk Balikpapan atau di Selat Makasar yang melayani pampatan kota Balikpapan. Tidak ada saluran primer drainase buatan yang dibuat khusus untuk mengalirkan air pampatan dan air buangan keluar daerah perkotaan. Semua saluran primer drainase yang ada sekarang merupakan saluran alam yang disesuaikan untuk kebutuhan saluran drainase.

Sistem drainase Kota Balikpapan dibagi menjadi 6 (enam) wilayah yaitu wilayah Balikpapan Barat dengan total panjang sungai 22.341 m, wilayah Wain dengan panjang sistem drainase 23.428 m, wilayah sumber yang mempunyai panjang 36.022 m, wilayah Balikpapan selatan yang dilayani dengan sungai-sungai kecil yang mempunyai outflow langsung ke Selat Makasar dengan total panjang drainase 110.869 m, wilayah manggar mempunyai panjang drainase 9.232 m dan wilayah Balikpapan Timur 23.981

m. Kondisi drainase pada umumnya masih kotor oleh sampah dan sedimen sehingga sering kali terjadi penyumbatan pada daerah tertentu dan menyebabkan genangan jika hujan.

3. Persampahan

Berdasarkan Master Plan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Balikpapan, pada tahun 2011 kondisi limbah padat (sampah domestik) di Kota Balikpapan yang dihasilkan perhari diperkirakan sebanyak 381 ton/hari dan jumlah sampah yang dapat diangkut dan dikelola DKPP Kota Balikpapan sebesar 250 ton/hari. Kondisi sanitasi kota juga sangat dipengaruhi keberadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS). Standar pelayanan minimal pelayanan persampahan menetapkan dalam penyediaan sarana pengumpul untuk 1 m³ wadah sampah melayani 200 KK, berdasarkan Masterplan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Balikpapan total kapasitas TPS berupa container dan TPS beton mencapai 1.403,85 m³/hari, sehingga nilai kecukupan mencapai 100 %, sedangkan pelayanan terhadap penduduk mencapai angka 1 m³/88 KK. Hal ini memperlihatkan bahwa berdasarkan kapasitasnya, jumlah sarana pengumpulan sampah di Kota Balikpapan telah mencukupi kebutuhan.

Pengelolaan sampah secara garis besar saat ini dilayani TPA Manggar dengan sistim sanitary landfill. Untuk pengembangan TPA saat ini sedang dilakukan peningkatan kapasitas pengelolaan air lindi dan pembangunan cell 2 dan 3 yang akan mampu melayani 5 (lima) tahun kedepan. Program pengurangan timbulan sampah dilakukan melalui pengembangan composting, memacu program 3R dan pengembangan bank sampah. selama tahun 2011 telah berhasil mengurangi produksi sampah sebesar 8,92% melalui program komposting sebesar 525 ton/bulan, recycle mencapai 564 ton/bulan dan penggunaan yang lain sebesar 86 ton/bulan.

Program pengembangan dan pengelolaan sanitasi yang meliputi air bersih, drainase, persampahan serta pola hidup bersih dan sehat selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan clean land, clean water dan clean air telah disusun secara terpadu dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Balikpapan 2012-2016.

c. Air Minum (Air Bersih)

Kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Balikpapan dipenuhi dari beberapa sumber yaitu jaringan perpipaan yang dikelola PDAM, PT.Pertamina

dan kawasan perumahan tertentu, hidrant umum yang dikelola PDAM, mobil tangki yang dikelola swasta, sumur dalam, sumur dangkal dan air hujan.

Sumber air baku saat ini sangat tergantung pada Waduk Manggar untuk pelayanan seluruh warga kota dan Waduk Pertamina di kawasan Hutan Lindung Sungai Wain untuk memenuhi kebutuhan operasional kilang dan perumahan PT.Pertamina.

Tingkat cakupan layanan air bersih oleh PDAM saat ini mencapai 72,15% atau sekitar 77.708 sambungan rumah dengan kapasitas produksi PDAM 1.108 lt/dt dan presentasi kehilangan air bersih rata-rata pertahun 30,69%. Kebutuhan air baku rata-rata pada tahun 2025 mencapai 2.179 lt/detik. Saat ini kapasitas air baku hanya 1.140 lt/dt. Untuk memenuhi kebutuhan air baku tersebut pembangunan Waduk Teritip dan Waduk Wain harus dipercepat. Jika kedua waduk tersebut terbangun maka akan menghasilkan air baku dengan kapasitas 420 lt/dt.

Program penyediaan air baku dan air bersih baik jangka pendek (2011-2015) maupun jangka panjang (2016-2020) khususnya yang dikelola PDAM akan dikembangkan sesuai dengan revisi master plan sistem penyediaan air bersih PDAM Kota Balikpapan Tahun 2005-2020.

d. Sarana Pendidikan

Sebagai Kota Pendidikan, Kota Balikpapan selalu menjadi tujuan utama para pelajar untuk mengenyam pendidikan, karena Kota Balikpapan memiliki kualitas yang baik dibanding dengan daerah disekitarnya. Sampai dengan Tahun 2015, Kota Balikpapan memiliki 158 TK/RA, 273 SD/MI, 72 SMP/MTs dan 58 SMA/SMK/MA yang tersebar di 6 Kecamatan (Sumber : *Dinas Pendidikan Kota Balikpapan*). Selain itu Kota Balikpapan memiliki 2 (dua) Universitas Negeri yaitu Politeknik Negeri (Politeknik Balikpapan) dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, serta 13 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 7 Akademi.

Akan tetapi penyebaran Lembaga Pendidikan tersebut tidak merata baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sarana prasarana pendidikan serta ketenagaan pendidikan, hal tersebut akan mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Balikpapan, dengan munculnya brand sekolah favorit dan sekolah yang kurang favorit/sekolah pinggiran. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota telah berupaya menangani penyebaran siswa sesuai hasil nilai UN melalui PPDB *online*, dimana data

realtime yang bis diakses langsung oleh wali murid, sehingga dapat meminimalisir adanya siswa titipan di sekolah.

Selain hal tersebut untuk meningkatkan minat masyarakat bersekolah di Sekolah Swasta, Pemerintah Kota Balikpapan memberikan subsidi berupa bantuan uang gedung bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan, diantaranya melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, antara lain melalui Role Sharing antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, akan tetapi kondisi sarana prasarana pendidikan belum memadai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64

Rekapitulasi Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas	Kondisi Ruang Kelas		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
TK/RA	501	486	15	0
SD/MI	1632	1524	99	9
SMP/MTs	861	803	55	3
SMA/SMK/MA	679	609	68	2

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan 2015

Dari kondisi tersebut, di masa datang patut diperhatikan mengenai sebaran sarana pendidikan dan penataan kawasan pendidikan. Hal ini dapat mengurangi pergerakan penduduk khususnya siswa/mahasiswa agar lebih efisien dan tidak terlalu lama dalam perjalanan menuju lokasi belajar. Pelibatan masyarakat dalam penyediaan dan pengembangan sarana pendidikan juga dapat menjadi alternatif penting.

Dalam hal ketenagaan pendidikan, Kota Balikpapan memiliki Guru sebanyak 3.431 orang guru SD/MI, 1.737 orang guru SMP/MTs dan 1.889 orang guru SLTA/MA terbanyak adalah guru Sekolah Dasar dan guru SLTA.

e. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2015 adalah 27 unit Puskesmas dan 14 unit Puskesmas Pembantu, 7 diantaranya merupakan Puskesmas 24 Jam. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 berdasar data Disdukcapil yang mencapai 736.807 maka jika dibandingkan dengan standar 1 unit puskesmas setiap 120.000 jiwa maka jumlah tersebut

sudah memenuhi standar pelayanan minimal. Sarana pendukung lain adalah 1 Unit UPTD Laboratorium dan Radiologi dan 1 unit UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan. Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya adalah Praktek Dokter Umum 779 Orang, Praktek Dokter Gigi 277 Orang, Praktek Bidan 862 Orang, Praktek Dokter Spesialis 257 Orang, Balai Pengobatan Alternatif/Swasta 74 buah, Klinik Keluarga Berencana 0 buah, Laboratorium Klinik 23 buah, Apotek sebanyak 181 buah, Toko Obat 83 buah. Rumah Sakit di Kota Balikpapan berjumlah 13 unit, 6 diantaranya milik Pemerintah, yaitu Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo, Rumah Sakit DR. Hardjanto, Rumah Sakit Bhayangkari, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu, Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan dan Rumah Sakit AURI, sedangkan Rumah Sakit Swasta berjumlah 7 unit, yaitu Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, Rumah Sakit Restu Ibu, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Balikpapan Baru, Rumah Sakit Bersalin Permata Hati, Rumah Sakit Bersalin Kasih Bunda dan Rumah Sakit Bersalin ASIH. Jumlah rumah sakit tersebut telah memenuhi standar pelayanan minimal yaitu 1 unit rumah sakit setiap 240.000 jiwa. Memperhatikan perkembangan Kota Balikpapan yang sangat pesat dan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi harus didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang baik dan memadai, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan permasalahan kesehatan perkotaan pada umumnya.

f. Sarana Ekonomi

Sarana ekonomi di Kota Balikpapan, khususnya untuk perdagangan dan jasa memiliki jenis beragam dan tumbuh dengan pola alamiah. Karena pertumbuhannya yang alami dan mengikuti kecenderungan pasar, maka beberapa pusat perdagangan skala besar dibangun dalam jarak terlalu dekat atau justru bersaing dengan pasar yang sudah ada. Usaha ritel dan grosir sudah menjadi tidak jelas lagi, sehingga persaingan dapat dikatakan kurang sehat. Toko-toko kecil sudah semakin terdesak oleh jaringan pertokoan besar dan pasar tradisional semakin terfokus pada produk-produk pertanian primer (*perishable goods*). Situasi seperti ini bagi ekonomi makro Kota Balikpapan dapat memunculkan potensi *crowding out* investasi, artinya investasi satu kegiatan tergeser oleh persaingan padahal belum mencapai titik keuntungan. Hal ini juga dapat menjadi salah satu pemicu kenaikan biaya ekonomi di Kota Balikpapan. Untuk itu pada perekonomian Kota Balikpapan diperlakukan aturan yang jelas dan tegas agar persaingan usaha menjadi lebih sehat dan produktif.

g. Sarana Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman Umum

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian penting dari ekosistem perkotaan. RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka (tanpa bangunan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, jenis-jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan Balikpapan dilihat dari segi kepemilikan dibagi menjadi 2 jenis RTH yaitu RTH Publik dan RTH Privat.

RTH privat merupakan RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat, misal: halaman rumah tinggal, perkantoran, tempat ibadah, sekolah atau kampus, hotel, rumah sakit, kawasan perdagangan (pertokoan, rumah makan), kawasan industri, stasiun, bandara, pelabuhan, dan lahan pertanian kota. Sedangkan RTH publik merupakan RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, daerah) atau dapat diartikan sebagai lahan dengan tujuan penggunaan utamanya adalah ditanami berbagai jenis tetumbuhan untuk memelihara fungsi lingkungan, yang dikelola pemerintah kota dan dapat dipergunakan masyarakat umum, seperti taman rekreasi, taman olahraga, taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau jalan, saluran umum tegangan ekstra tinggi (SUTET), bantaran kali, serta hutan kota (HK) konservasi, HK wisata, HK zona industri, HK antar-zona permukiman, HK tempat koleksi dan penangkaran flora dan fauna.

Ruang terbuka hijau publik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan maupun Pemerintah Provinsi diantaranya yaitu semua jenis RTH jalur hijau, taman kota, makam, hutan kota dan hutan lindung. Selain kelima jenis RTH tersebut, RTH yang dimiliki oleh pemerintah kota yaitu RTH Kariangau, RTH Bendali I dan II, Kawasan Bantaran Sungai Jl. A. Yani Karang Jati, dan Kawasan RT.42 dan 55 Batu Ampar. Sedangkan ruang terbuka hijau privat (milik pribadi atau badan hukum) diantaranya yaitu Buffer Zone Pertamina Karang Jati (dikelola Pertamina), Kawasan Perumahan TNI AL Karang Jati (dikelola oleh TNI-AL), Hutan Kota Ponpes Syaichona Cholil (dikelola oleh pondok pesantren), Hutan Wisata Inhutani (dikelola PT.Inhutani), Hutan Kawasan Hutan Karangrejo dan Kawasan Hutan Prapatan (dikelola masyarakat). Selain ruang terbuka hijau diatas yang dikelola oleh pemerintah maupun pribadi atau badan hukum, juga terdapat RTH yang dikelola

dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta yaitu Hutan Kota Gunung Komendur yang berlokasi di Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota.

Sesuai RTRW Kota Balikpapan tahun 2012-2032, 52% wilayah menjadi kawasan ruang terbuka hijau dan hanya 48% yang terbangun. Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan luas kawasan ruang terbuka hijau. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap Kawasan Non budidaya/Lindung dan Ruang Terbuka Hijau, dapat dihasilkan luasan total Kawasan Non budidaya/Lindung dan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Balikpapan yaitu 18.821,742 Ha atau 37,396% dari luas wilayah Kota Balikpapan (50.330,57 Ha). Untuk memenuhi prosentase 52%, maka arahan pengembangan kawasan non budidaya (ruang terbuka hijau) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65
ARAHAN KAWASAN NON BUDIDAYA/LINDUNG KOTA BALIKPAPAN

No.	Kawasan Non Budidaya/Lindung Ruang Terbuka Hijau	Luas	
		Ha	Prosentase Luas Terhadap Kota Balikpapan (%)
1	Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya		
	1. Hutan Lindung Sungai Wain	9,783.00	19.43
	2. Hutan Lindung DAS Manggar	4,998.99	9.93
	3. Kawasan Paruh Burung	1,449.098	2.88
	4. Kawasan Hutan Inhutani	2,723.322	5.41
	Sub Total	18,954.41	37.65
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	1. Kawasan Waduk	594.737	1.182
	a. Waduk Sungai Wain		
	b. Waduk Sungai Manggar		
	c. Bendali Sepinggian I		
	d. Bendali Sepinggian II		
	e. Bendali Batu Ampar		
	2. Pulau-pulau Kecil	130.348	0.259
	a. P. Benawa Besar		
	b. P. Benawa Kecil		
	c. P. Balang		
	d. P. Babi		
	e. P. Tukung		
	f. P. Lipan		
	g. P. Kelawan		
	h. P. Tak Bernama		
	3. Buffer Zone Bendali	64.581	0.13
	4. Buffer zone hutan lindung	3,274.822	6.51
	5. Green belt waduk	199.46	0.40
	6. Sempadan sungai	121.317	0.24
	Sub Total	4,385.26	8.72

3	Kawasan Suaka Alam		
	1. Kawasan Mangrove	1,302.42	2.588
	2. Wanawisata Inhutani	19.16	0.04
	Sub Total	1,321.58	2.628
4	Ruang Terbuka Hijau		
	1. Tempat Pemakaman Umum (TPU)	99.25	0.19
	2. Taman dan Jalur Hijau	6.31	0.012
	3. Hutan Kota Eksisting	659.938	1.311
	4. Kawasan dengan Kemiringan > 40 %	678.543	1.35
	Sub Total	1,444.041	2.86
5	Kawasan Non Budidaya dan RTH berdasarkan Peta Dasar	1,529.917	3,03
	Total Luas	27,635.213	54.90
<i>Sumber : Bappeda Kota Balikpapan</i>			

RTH pemakaman merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada area pemakaman. Pemakaman umum tersebar di setiap Kecamatan di Kota Balikpapan. Pengelolaan pemakaman tersebut ada yang dikelola oleh pemerintah (Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman) namun ada juga yang dikelola oleh masyarakat setempat. Skala pelayanan pemakaman umum tersebut sebagian besar merupakan skala pelayanan lingkungan, namun ada juga yang berskala besar (kota).

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti sebagai sumber pendapatan.

RTH pemakaman umum di Kota Balikpapan juga merupakan salah satu sarana lain yang masih dapat dianggap mempunyai fungsi sebagai daerah terbuka hijau. Besar luas tanah pekuburan ini sangat tergantung dari sistem penyempurnaan jenazah yang dianut.

Sebaran pemakaman umum di Kota Balikpapan didasarkan pada data mengenai Jumlah dan Luasan Pemakaman Umum yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan, dimana berdasarkan data dari DKPP Kota Balikpapan tersebut diketahui bahwa jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota Balikpapan berjumlah 28 makam dan tersebar di seluruh wilayah kota dengan luas total 99,25 ha. Luas makam terbesar berada di Tempat Pemakaman Umum Terpadu di Kecamatan Balikpapan Utara (makam km.15) dengan luas total 48 ha.

Tabel 2.66
Jumlah dan Luas Pemakaman Umum Kota Balikpapan

No	Wilayah Administrasi	Jenis Pemakaman Umum	Luas (ha)
1	Balikpapan Selatan	Makam Prapatan	1,5
		Makam Pasar Baru (3 buah)	2
		Makam Pupuk	1
		Makam Sepinggian	2
		Makam Gunung Bahagia	2
		Makam TMP Dharma Agung	2
Total		6	10,5
2	Balikpapan Timur	Makam Batakan	1,5
		Makam Patok Merah	1,5
		Makam Manggar	2
		Makam Lamaru	1,5
		Makam Lamaru Dalam	1
		Makam teritib	2
		Makam Gunung Tembak	0,75
Total		7	10,25
3	Balikpapan Tengah	Makam Gunung Guntur	1,5
Total		1	1,5
4	Balikpapan Utara	Makam km.0,5 (Gunung Samarinda)	4,5
		Makam km.2,5 (Kristen)	4,5
		Makam km.4	1
		Makam km. 5,5	2
		Makam Kariangau	3,5
		Makam km.8	1
		Makam Transad	1,5
		Makam km.11	2
		Makam Tiong Hoa (Cina)	1,5
		Makam km.15	48
Total		10	21,5
5	Balikpapan Barat	Makam Gunung Empat	1
		Makam Gunung Pipa	1,5
		Makam Asrama Bukit	3
		Makam Baru Ulu	2
Total		4	7,5
Total Jumlah Makam dan Luas Makam		28 makam	99,25

Sumber : Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Balikpapan

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Letak dan kondisi geografis Kota Balikpapan yang sangat strategis adalah salah satu daya tarik minat investor untuk menanamkan modalnya, posisi strategis tersebut antara lain adalah:

- Terletak ditengah jaringan transportasi Trans Kalimantan dan Trans Nasional

- Pintu gerbang utama wilayah Kaltim dengan adanya Pelabuhan Laut Semayang dan Bandara Internasional Sepinggan dan ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia)
- Tempat kedudukan Kodam VI/Mulawarman, POLDA Kaltim dan beberapa Kantor Pusat BUMN Wilayah Kalimantan.
- Kota Embarkasi Haji Kelima di Indonesia.
- Sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition) ke sepuluh di Indonesia.
- Pusat Industri pengilangan minyak untuk Kawasan Timur Indonesia.
- Basis dari beberapa perusahaan asing yang bergerak dibidang pengeboran minyak dan gas bumi.

Kebijakan Umum Pengembangan Perekonomian Daerah diarahkan kepada penguatan struktur ekonomi Balikpapan pada masa yang akan datang agar tidak lagi tergantung pada industri Migas dan penguatan ekonomi yang berbasis kepada kegiatan ekonomi kerakyatan dalam rangka memecahkan masalah jangka pendek yaitu pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja.

Upaya pencapaian sasaran investasi di Kota Balikpapan sangat terkait dengan penyediaan infrastruktur kota Balikpapan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi warga masyarakat seperti, jalan, pemukiman, air bersih, kebersihan kota, dan drainase kota. Demikian pula halnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota cukup banyak kegiatan yang telah dilakukan, namun masih menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya aktifitas masyarakat dalam pembangunan khususnya pengolahan lahan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang baik, oleh karena itu upaya pengembangan infrastruktur perkotaan dan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan kota dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Sarana dan Prasarana Daerah yang terpenting dalam simpul distribusi lalu lintas perekonomian suatu daerah adalah prasarana jalan karena berfungsi menunjang kelancaran arus barang dan jasa. Model transportasi di Kota Balikpapan meliputi transportasi darat, laut dan udara. Transportasi darat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang menghubungkan pusat kota dengan seluruh wilayah Balikpapan, yang meliputi angkutan dalam kota

dan antar kota di wilayah sekitar Balikpapan. Alat angkutan laut untuk melayani penyeberangan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota dan Kabupaten lain.

Di Kota Balikpapan terdapat 8 (delapan) kelompok kegiatan investasi berdasarkan Jenis Usaha, adapun kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.67
KELOMPOK KEGIATAN INVESTASI

KELOMPOK KEGIATAN	JENIS USAHA
Prasarana Wilayah	Perumahan, Saran Olahraga, Mess Karyawan, Taman, Jembatan, Coastal Road
Pariwisata	Hotel, Apartemen, Villa, Taman Rekreasi, Museum
Perdagangan	Pasar Induk, Penampungan Oli, Ruko, Mall, Supplier Barang (Spare Part alat berat)
Kesehatan	Rumah Sakit, Klinik, Apotik
Industri	Workshop, Pabrik, Bengkel, Percetakan, Galangan Kapal, Industri Pengolahan, Industri Aneka, Stock Pile, Kawasan Industri Kariangau (KIK)
Pertanian	Pertanian, perkebunan, Perikanan, Pusat Niaga Nelayan Terpadu
Telekomunikasi	Tower, Roof Top
Sumberdaya Energi	Pembangkit Listrik

2.2 Evaluasi dan capaian Millenium Development Goals (MDGs)

Millenium Development Goals merupakan agenda pembangunan dengan 8 tujuan utama yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2. Mencapai pendidikan untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu

6. Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8. Mengembangkan kemitraan global.

Data yang dibutuhkan untuk menganalisis terkait evaluasi capaian MDGs idealnya diperoleh dari sumber yang sama yaitu BPS untuk menghindari bias data. Namun mengingat tidak semua tersedia di BPS maka beberapa data diperoleh dari lembaga atau SKPD terkait.

Dari 8 tujuan utama tersebut dijabarkan dalam 18 target dan 71 indikator. Beberapa indikator terutama pada tujuan mengembangkan kemitraan global menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk Kota Balikpapan, capaian MDGs dari indikator tersebut 23 indikator memenuhi target MDGs, 9 indikator belum memenuhi, 19 indikator tidak dapat dievaluasi karena keterbatasan ketersediaan data, dan 2 indikator tidak tercapai.

Tujuan pertama menanggulangi kemiskinan dan kelaparan dari 11 (sebelas) indikator, 8 (delapan) indikator tercapai, 2 (dua) indikator memerlukan kerja keras untuk mencapainya dan 1 (satu) indikator tidak tersedia data. **Untuk target menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015** secara umum tercapai yang ditunjukkan tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional untuk Kota Balikpapan pada tahun 2015 mencapai 2,35% (sumber data BPS) yang jauh diatas target MDGs yaitu 7,55%. Demikian juga dengan indeks kedalaman kemiskinan terjadi penurunan pada tahun 2013 sebesar 0,25 menjadi 0,20 pada tahun 2014 dan artinya target MDGs tercapai. Mengingat data untuk tahun 2015 belum diterbitkan oleh BPS maka data yang digunakan adalah data 2014.

Target **Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda tidak tersedia data dari BPS sehingga untuk** Laju pertumbuhan PDB per tenaga Kerja tidak dapat diketahui apakah tercapai atau tidak. Sedangkan angka Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013 mencapai 59,87% masih di bawah target MDGs yaitu 60,72% sehingga masih perlu kerja keras untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk usia di atas 15 tahun. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja pada tahun 2013 mencapai

24,16% yang artinya target MDGs menurun tercapai jika dibandingkan dengan tahun dasar 2011 yaitu 27,86%.

Target **Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 dari 5 indikator seluruhnya tercapai.** Prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi pada tahun 2015 mencapai 10,27% sedangkan target MDGs adalah 15,5%. Prevalensi balita gizi buruk Kota Balikpapan masoh 0,02% dan jauh melebihi target MDGs yaitu 3,6%. Indikator Prevalensi balita gizi kurang menunjukkan angka 10,25% yang lebih rendah jika dibandingkan dengan target MDGs yaitu 11,9% namun jika dibandingkan dengan tahun dasar angka tersebut meningkat signifikan hampir 50% yaitu 5,80% pada tahun 2011. Mekipun untuk indikator MDGs ini tercapai namun Pemerintah Kota Balikpapan masih harus bekerja untuk menurunkan angka ini. Untuk indikator 1.400 Kkal/kapita/hari capaian Kota Balikpapan pada tahun 2013 sebesar 28,11% meskipun melebihi target MDGs namun dibawah angka tahun dasar yang sebesar 30,86%. Untuk indikator 2.000 Kkal/kapita/hari pada tahun 2013 sebesar 75,23% melebihi target MDGs yang ditarget sebesar 35,32%.

Tujuan Kedua mencapai pendidikan untuk semua dengan target **menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar** maka dari 3 (tiga) indikator hanya 1 (satu) indikator yang sudah tercapai dan 2 (dua) indikator masih perlu kerja keras untuk mencapai target MDGs. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar pada tahun 2015 sebesar 98,14% belum mencapai target MDGs yaitu 100%, demikian juga dengan Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar pada tahun 2014 baru mencapai 99,96% dari target MDGs sebesar 100%. Untuk indikator ini digunakan data 2014 mengingat data 2015 baru akan dapat dihitung pada bulan juni atau juli 2016. Indikator Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki sebesar 100% pada tahun 2015 dan sesuai target MDGs.

Tujuan Ketiga Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 dari 5 (lima) indikator, 3 (tiga) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator perlu kerja keras dan 1 (satu) indikator tidak tercapai. Indikator Rasio perempuan terhadap laki- laki di tingkat pendidikan

dasar, menengah dan tinggi berdasar data tahun 2013 yang tercapai adalah pada rasio APM perempuan/laki-laki tingka SD dan SMA yaitu sebesar 104,76% dan 119,30% sedangkan target MDGs adalah 100%. Untuk rasio APM perempuan/laki-laki di SMP baru mencapai 95,06%. Untuk tingkat perguruan tinggi belum tersedia atas sehingga tidak dapat dianalisa apakah target MDGs tercapai atau belum. Indikator Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun pada tahun 2015 mencapai 100% yang artinya target MDGs tercapai. Sedangkan indikator Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian pada tahun 2013 sebesar 19,66% meningkat dari tahun 2011 sebesar 27,77% dan target MDGs tercapai. Khusus untuk indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada tahun 2015 dengan menggunakan data tahun 2014 yaitu 17,78% yang artinya menurun dari tahun 2011 yang sebesar 24,4% dan artinya tidak mencapai target MDGs.

Tujuan Keempat menurunkan angka kematian anak dijabarkan dalam target Menurunkan Angka Kematian balita (AKABA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015 dengan 4 (empat) indikator. Dari 4 (empat) indikator tersebut, 3 indikator tercapai dan 1 belum tercapai. Indikator Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebanyak 7 jiwa target MGDs 32 jiwa. Untuk indikator Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, pada tahun 2015 sebanyak 6 jiwa sedangkan target MDGs adalah 23 jiwa. Angka kematian neonatas per 1.000 kekahiran hidup pada tahun 2015 sebanyak 5,7 jiwa dan target MDGs yang seharusnya menurun belum tercapai karena pada tahun 2011 juga sebanyak 5,7 jiwa. Untuk Indikator presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sesuai target MDGs yaitu meningkat dari tahun 2011 sebesar 94,00% menjadi 99,10% pada tahun 2015.

Tujuan kelima meningkatkan kesehatan ibu dijabarkan melalui 3 (tiga) target dengan 8 (delapan) indikator. Dari 8 (delapan) indikator, 4 (empat) indikator MDGs tercapai, 2 (dua) indikator belum tercapai dan 1 (satu) indikator tidak dapat dievaluasi karena tidak tersedia data, Target **Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 akan dievaluasi melalui 2 (dua) indikator yaitu** Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup yang pada tahun 2015 sebanyak 70 jiwa melampaui target MDGs yaitu sebanyak 102 jiwa. Untuk indikator Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih target MDGs adalah meningkat, namun pada tahun 2015 justru menurun dari 93,90% pada tahun

2011 menjadi 91,73% pada tahun 2015. Target **Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015** dicapai melalui indikator Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara yang pada tahun 2015 mencapai 77,08 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 namun tidak dapat dibandingkan dengan angka tahun dasar. Sedangkan target MDGs untuk indikator angka pemakaian kontrasepsi/CPR pada perempuan menikah usia 15-49 cara modern belum tercapai karena pada tahun 2015 pada baru mencapai 70,46 dari target MDGs yang seharusnya meningkat dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 76,4%. Khusus indikator angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun belum dapat diukur karena belum tersedia data. Target selanjutnya adalah Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 dengan indikator cakupan pelayanan Antenetal (sedikitnya satu kali kunjungan) untuk 1 kali kunjungan target MDGs tercapai yaitu terjadi peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Tahun 2012 sebesar 94,01% meningkat pada tahun 2013 menjadi 87,74% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 98,03%. Sedangkan cakupan pelayanan Antenetal (sedikitnya satu kali kunjungan) untuk 4 kali kunjungan juga meningkat dan target MDGs terpenuhi yaitu pada tahun 2012 sebesar 91,98%, menjadi 94,87% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 menjadi 95,44% selanjutnya pada tahun 2015 meningkat menjadi 97,30%.

Tujuan keenam Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya dijabarkan dalam 11 (sebelas) indikator. Dari 11 (sebelas) indikator tersebut, 4 indikator tercapai, 2 indikator belum tercapai dan 7 indikator tidak dapat dievaluasi karena tidak tersedia data pembandingan.

Target Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 berdasarkan indikator Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi untuk Kota Balikpapan menurun sesuai target MDGs dari 0,15% pada tahun 2011 menjadi 0,02% pada tahun 2015. Demikian juga indikator pengguna kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir terjadi peningkatan sesuai target MDGs dari 20% pada tahun 2011 menjadi 74,50% pada tahun 2015. Untuk indikator proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS baik yang menikah maupun belum menikah tidak tersedia data untuk dilakukan evaluasi.

Target mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang

membutuhkan sampai dengan tahun 2010 berdasarkan indikator proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral tidak dapat dievaluasi karena tidak tersedia data.

Target mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 berdasarkan indikator angka kejadian malaria per 1000 penduduk terjadi penurunan sesuai target MDGs yaitu tahun 2011 sebesar 0,3% menjadi 0,02% pada tahun 2015. Sedangkan beberapa indikator yaitu angka kejadian dan tingkat kematian malaria, proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida, proporsi anak balita dengan demam dan diobati dengan obat anti malaria yang tepat tidak di evaluasi karena tidak tersedia data. Untuk penyakit tuberkulosis target MDGs belum tercapai dengan semakin meningkatkan angka kejadian tuberkulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun) dari hanya 4 (empat) kasus pada tahun 2011 menjadi 122,23 kasus pada tahun 2015. Indikator lainnya yaitu angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberkulosis, tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) dan tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) tidak tersedia data yang akurat sehingga tidak dapat dievaluasi.

Tujuan ketujuh memastikan kelestarian lingkungan hidup dijabarkan dalam 3 target dan 13 indikator, Dari 13 (tiga belas) indikator, 10 indikator tidak dapat dievaluasi dan 3 (tiga) indikator dinilai memenuhi target MDGs. Target **Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang tidak dapat dilakukan evaluasi karena data-data yang mendukung indikator tidak tersedia. Meskipun ada data namun data tersebut tidak dapat dibandingkan. Indikator tersebut adalah** Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan, Jumlah emisi karbondioksida (CO₂) (per kapita) yang pada tahun 2015 pada angka 1,79, Jumlah konsumsi energi primer (perkapita), Intensitas Energi, Elastisitas Energi, Bauran energi untuk energi terbarukan, Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton, Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan yang sejak tahun 2012-2015 tetap sebesar 76,9% dan Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial yang pada tahun 2015 sebesar 23%.

Target Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa

akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 berdasar indikator Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan sudah mencapai 91,12% yang melebihi target MDGs yaitu 75,29%. Demikian juga berdasarkan indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan pedesaan maka target MDGs yang ditetapkan sebesar 76,82% tercapai dengan capaian Kota Balikpapan pada tahun 2015 adalah 98,30%. Target **Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin dipermukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020** maka berdasar indikator proporsi rumah tangga kumuh perkotaan pada tahun 2015 sebanyak 1,36% yang berarti melampaui target MDGs yang ditetapkan 6% pada tahun 2020.

Tujuan delapan Mengembangkan Kemitraan Global Untuk Pembangunan merupakan tujuan terakhir dan sebagian besar indikator merupakan indikator nasional sehingga yang dievaluasi pada bagian ini difokuskan pada target yang indikatornya dapat dihitung untuk skala kota. Target Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi dari 4 (empat) indikator), 2 (dua) indikator belum memenuhi target MDGs yaitu Proporsi penduduk yang memiliki jaringan PSTN (Kepadatan fasilitas telepon per jumlah penduduk) dari target meningkat kondisi yang ada justru terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 23,24% menjadi 14,59% pada tahun 2013. dan indikator proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler dari target MDGS sebanyak 100% baru tercaai 98% pada tahun 2013. Indikator proporsi rumah tangga dengan akses internet melampaui target MDGs yang hanya 50% mampu mencapai 63,94% pada tahun 2013. Demikian juga indikator proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi sesuai target MDGs terjadi peningkatan dari 34,29% pada tahun 2011 menjadi 39% pada tahun 2013.

2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Hingga tahun 2014 dan Realisasi RPJMD 2011 – 2016

Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 untuk implementasi tahun ke-1 sesuai dengan Agenda Pembangunan berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam RKPD 2012 dapat dijabarkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.68
Jumlah Program, Pagu, Realisasi, Rata-rata Capaian
Target dan Predikat Kinerja

Jumlah Program	Pagu (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Rata-rata Capaian Target (persen)		Predikat Kinerja	
			Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1.008	2.353.610.037,029	1,909,303,473,523	96,80	85,86	Sangat Tinggi	Tinggi

Sumber: Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2015 yang disampaikan seluruh SKPD kepada Bappeda Kota Balikpapan

Secara lebih rinci, hasil pelaksanaan program RKPD Kota Balikpapan Tahun 2014 yang dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan, seperti tabel 2.21.

Tabel 2.69
Hasil Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

No.	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program Pada RKPD	Capaian Rata-rata Kinerja Target RKPD		Predikat Kinerja RKPD	
			Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urusan Wajib					
1.01.01	Dinas Pendidikan	16	97,77	86,83	ST	T
1.02.01	Dinas Kesehatan	20	84,24	78,03	T	T
1.02.02	RSKB Sayang Ibu	7	86,74	76,32	T	T
1.02.03	RSUD Balikpapan	1	90,57	69,48	T	SD
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	17	94,56	82,89	ST	T
1.04.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	97,40	85,43	ST	T
1.05.01	Dinas Tata Kota dan Perumahan	12	82,22	65,11	T	SD
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	96,00	80,37	ST	T
1.07.01	Dinas Perhubungan	16	97,39	90,84	ST	T
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	10	92,33	61,36	ST	SR
1.08.02	Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Permakaman	9	99,54	89,62	ST	T
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6	97,16	81,55	ST	T
1.12.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB	18	99,81	85,71	ST	T
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	13	81,64	69,38	T	SD
1.15.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	14	99,07	87,03	ST	T
1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	9	95,55	74,15	ST	SD

No.	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program Pada RKPD	Capaian Rata-rata Kinerja Target RKPD		Predikat Kinerja RKPD	
			Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01	Kantor Kesbang dan Politik	9	94,80	80,06	ST	T
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	9	100,00	81,42	ST	T
1.20.03	Sekretariat Daerah	52	93,46	71,84	ST	SD
1.20.04	Sekretariat DPRD	6	96,28	81,07	ST	T
1.20.05	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10	88,67	69,67	T	SD
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah	7	88,33	70,14	T	SD
1.20.07	Inspektorat	10	99,04	77,99	ST	T
1.20.08	Dinas Pendapatan Daerah	8	98,00	86,94	ST	T
1.20.09	Kec. Balikpapan Timur	23	97,37	84,59	ST	T
1.20.10	Kec. Balikpapan Barat	16	97,84	85,55	ST	T
1.20.11	Kec. Balikpapan Utara	19	95,32	81,74	ST	T
1.20.12	Kec. Balikpapan Tengah	18	98,96	85,88	ST	T
1.20.13	Kec. Balikpapan Selatan	20	97,60	88,50	ST	T
1.20.14	Kec. Balikpapan Kota	20	99,89	88,34	ST	T
1.20.15	Kelurahan Manggar	15	100,00	89,87	ST	T
1.20.16	Kelurahan Lamaru	15	99,00	82,91	ST	T
1.20.17	Kelurahan Teritip	16	100,00	87,06	ST	T
1.20.18	Kelurahan Manggar Baru	17	97,87	92,11	ST	ST
1.20.19	Kelurahan Baru Ilir	15	99,23	89,64	ST	T
1.20.20	Kelurahan Baru Tengah	18	100,00	79,75	ST	T
1.20.21	Kelurahan Baru Ulu	18	100,00	95,83	ST	ST
1.20.22	Kelurahan Kariangau	16	99,01	95,61	ST	ST
1.20.23	Kelurahan Margo Mulyo	19	100,00	85,18	ST	T
1.20.24	Kelurahan Margasari	15	100,00	93,11	ST	ST
1.20.25	Kelurahan Batu Ampar	17	100,00	96,28	ST	ST
1.20.26	Kel. Gunung Samarinda	17	100,00	93,97	ST	ST
1.20.27	Kelurahan Karang Joang	15	100,00	91,11	ST	ST
1.20.28	Kelurahan Muara Rapak	15	95,53	91,57	ST	ST
1.20.29	Kel. Gn. Samarinda Baru	15	99,59	92,62	ST	ST
1.20.30	Kelurahan Graha Indah	15	98,77	92,66	ST	ST
1.20.31	Kelurahan Gunung Sari Ulu	16	100,00	87,83	ST	T
1.20.32	Kelurahan Gunung Sari Ilir	16	100,00	95,86	ST	ST
1.20.33	Kelurahan Karang Rejo	15	97,63	88,30	ST	T
1.20.34	Kelurahan Karang Jati	16	98,25	85,96	ST	T
1.20.35	Kelurahan Mekar Sari	15	100,00	96,36	ST	ST
1.20.36	Kelurahan Sumber Rejo	16	94,50	89,25	ST	T
1.20.37	Kelurahan Sepinggian	16	87,73	84,64	T	T
1.20.38	Kelurahan Gunung Bahagia	16	100,00	89,92	ST	T
1.20.39	Kelurahan Sepinggian Baru	16	98,39	90,16	ST	T
1.20.40	Kelurahan Sepinggian Raya	17	98,10	88,41	ST	T
1.20.41	Kelurahan Sungai Nangka	16	100,00	89,78	ST	T
1.20.42	Kelurahan Damai Baru	17	98,97	94,20	ST	ST
1.20.43	Kelurahan Damai Bahagia	16	99,51	91,57	ST	ST
1.20.44	Kelurahan Prapatan	16	98,76	89,77	ST	T
1.20.45	Kelurahan Telaga Sari	16	91,79	89,50	ST	T

No.	Urusan / Bidang Urusan	Jumlah Program Pada RPKD	Capaian Rata-rata Kinerja Target RPKD		Predikat Kinerja RPKD	
			Kinerja (%)	Keuangan (%)	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.46	Kelurahan Klandasan Ulu	15	100,00	94,88	ST	ST
1.20.47	Kelurahan Klandasan Ilir	16	98,00	93,43	ST	ST
1.20.48	Kelurahan Damai	15	97,96	92,47	ST	ST
1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan	7	99,72	90,93	ST	T
2.	Urusan Pilihan					
2.01.01	DPKP	20	98,10	86,86	ST	T
2.04.01	Disporabudpar	14	98,20	93,71	ST	ST
2.06.01	Dinas Pasar	9	99,96	87,79	ST	T
JUMLAH		1008	96,80	85,86		

Sumber: Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2014 yang disampaikan seluruh SKPD Kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan:

ST	=SangatTinggi	(91persen≤100persen)
T	=Tinggi	(76persen≤90persen)
S	=Sedang	(66persen≤75persen)
R	=Rendah	(51persen≤65persen)
SR	=SangatRendah	(≤50persen)

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan 19 urusan wajib dan 3 urusan pilihan oleh 68 SKPD.
2. Tidak terdapat program khusus untuk melaksanakan urusan pertanahan dan urusan statistik. Pelaksanaan urusan tersebut dilakukan melalui kegiatan pada beberapa program tertentu.
3. Urusan perencanaan pembangunan, kelautan dan perikanan, serta urusan ketransmigrasian memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi”, baik untuk capaian target dan anggaran.
4. Urusan perumahan, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral memperoleh predikat kinerja “sangat rendah”, baik untuk capaian target dan anggaran.

Rincian capaian kinerja masing-masing bidang urusan sesuai predikat kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan RPKD Kota Balikpapan seperti tabel 2.70.

Tabel 2.70
Predikat Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Hasil Pelaksanaan
Program RKPD Kota Balikpapan Tahun 2015

Predikat Kinerja	Capaian Target Kinerja		Realisasi Keuangan	
Sangat Tinggi	1	Dinas Pendidikan	1	Kelurahan Manggar Baru
	2	Dinas Pekerjaan Umum	2	Kelurahan Baru Ulu
	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	Kelurahan Kariangau
	4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Kelurahan Margasari
	5	Dinas Perhubungan	5	Kelurahan Batu Ampar
	6	Badan Lingkungan Hidup	6	Kelurahan Gunung Samarinda
	7	DKPP	7	Kelurahan Karang Joang
	8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	8	Kelurahan Muara Rapak
	9	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB	9	Kelurahan Gunung Samarinda Baru
	10	Diperindagkop	10	Kelurahan Graha Indah
	11	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	11	Kelurahan Gunung Sari Ilir
	12	Kantor Kesbang dan Politik	12	Kelurahan Mekar Sari
	13	Satuan Polisi Pamong Praja	13	Kelurahan Damai Baru
	14	Sekretariat Daerah	14	Kelurahan Damai Bahagia
	15	Sekretariat DPRD	15	Kelurahan Klandasan Ulu
	16	Inspektorat	16	Kelurahan Klandasan Ilir
	17	Dinas Pendapatan Daerah	17	Kelurahan Damai
	18	Kec. Balikpapan Timur	18	Disporabudpar
	19	Kec. Balikpapan Barat		
	20	Kec. Balikpapan Utara		
	21	Kec. Balikpapan Tengah		
	22	Kec. Balikpapan Selatan		
	23	Kec. Balikpapan Kota		
	24	Kelurahan Manggar		
	25	Kelurahan Lamaru		
	26	Kelurahan Teritip		
	27	Kelurahan Manggar Baru		
	28	Kelurahan Baru Ilir		
	29	Kelurahan Baru Tengah		
	30	Kelurahan Baru Ulu		
	31	Kelurahan Kariangau		
	32	Kelurahan Margo Mulyo		
	33	Kelurahan Margasari		
	34	Kelurahan Batu Ampar		
	35	Kel. Gunung Samarinda		
	36	Kelurahan Karang Joang		
	37	Kelurahan Muara Rapak		
	38	Kel. Gn. Samarinda Baru		
	39	Kelurahan Graha Indah		
	40	Kelurahan Gunung Sari Ulu		
	41	Kelurahan Gunung Sari Ilir		
	42	Kelurahan Karang Rejo		

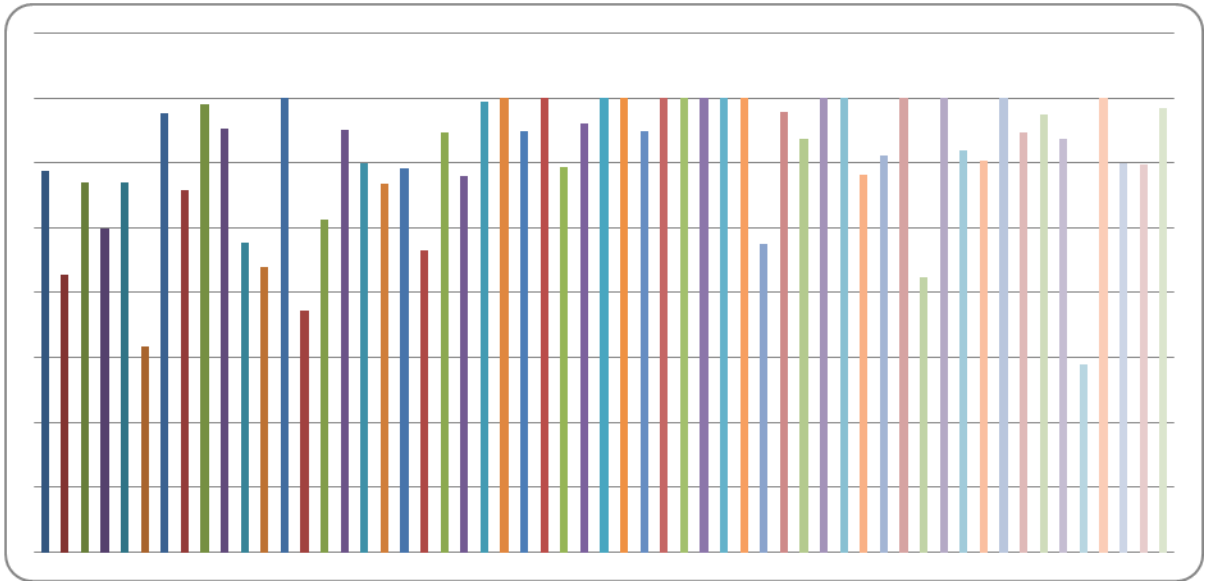
Predikat Kinerja	Capaian Target Kinerja		Realisasi Keuangan	
	43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	Kelurahan Karang Jati Kelurahan Mekar Sari Kelurahan Sumber Rejo Kelurahan Gunung Bahagia Kelurahan Sepinggan Baru Kelurahan Sepinggan Raya Kelurahan Sungai Nangka Kelurahan Damai Baru Kelurahan Damai Bahagia Kelurahan Prapatan Kelurahan Telaga Sari Kelurahan Klandasan Ulu Kelurahan Klandasan Ilir Kelurahan Damai Kantor Arsip dan Perpustakaan DPKP Disporabudpar Dinas Pasar		
Tinggi	1 2 3 4 5 6 7 8	Dinas Kesehatan RSKB Sayang Ibu RSUD Kota Balikpapan Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial BPKAD Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Sepinggan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSKB Sayang Ibu Dinas Pekerjaan Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan DKPP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Disperindagkop Kantor Kesbang dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Inspektorat Dinas Pendapatan Daerah Kec. Balikpapan Timur Kec. Balikpapan Barat Kec. Balikpapan Utara Kec. Balikpapan Tengah Kec. Balikpapan Selatan Kec. Balikpapan Kota Kelurahan Manggar Kelurahan Lamaru Kelurahan Teritip Kelurahan Baru Ilir Kelurahan Baru Tengah Kelurahan Margo Mulyo Kelurahan Gunung Sari Ulu Kelurahan Karang Rejo

Predikat Kinerja	Capaian Target Kinerja	Realisasi Keuangan
		31 Kelurahan Karang Jati 32 Kelurahan Sumber Rejo 33 Kelurahan Sepinggan 34 Kelurahan Gunung Bahagia 35 Kelurahan Sepinggan Baru 36 Kelurahan Sepinggan Raya 37 Kelurahan Sungai Nangka 38 Kelurahan Prapatan 39 Kelurahan Telaga Sari 40 Kantor Arsip dan Perpustakaan 41 DPKP 42 Dinas Pasar
Sedang		1 RSUD Kota Balikpapan
Sedang		2 Dinas Tata Kota dan Perumahan
Sedang		3 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Sedang		4 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Sedang		5 Sekretariat Daerah
Sedang		6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sedang		7 Badan Kepegawaian Daerah
Rendah		1 Badan Lingkungan Hidup

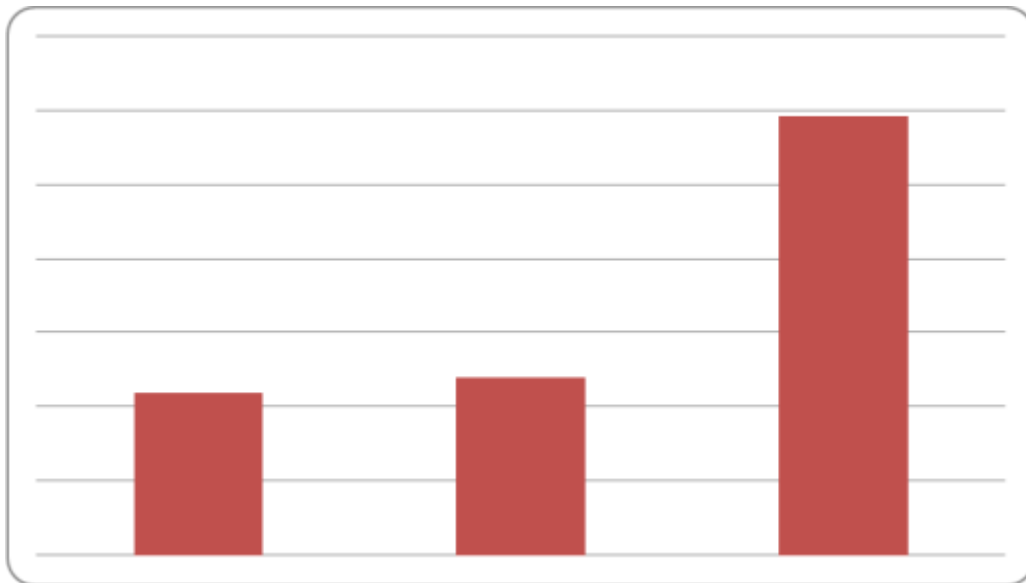
Sumber: Diolah dari hasil Evaluasi Hasil renja SKPD Tahun 2015 yang disampaikan seluruh SKPD Kepada Bappeda Kota Balikpapan

Bidang urusan yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” untuk pencapaian target kinerja adalah 57 bidang urusan wajib dan 3 urusan pilihan, dan predikat “tinggi” dicapai 8 bidang urusan. Sedangkan untuk realisasi anggaran, bidang urusan yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” adalah 18 bidang urusan wajib dan 1 urusan pilihan, predikat “tinggi” dicapai 42 bidang urusan wajib dan 2 bidang urusan pilihan, predikat “sedang” diperoleh 7 bidang urusan, predikat “rendah” diperoleh 1 bidang urusan.

Grafik.2.18
Tingkat Capaian Rata-rata Target Kinerja Program RKPD Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dengan Predikat Sangat Tinggi



Grafik.2.19.
Capaian Rata-Rata Target Untuk Urusan Wajib



2.2.2. Capaian 19 Sasaran dan 119 Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Proivnsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018, terdapat 19 sasaran dan 119 program pembangunan yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur. Mengingat Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang RKPD Tahun 2014 terlebih dahulu ditetapkan dari Perda Nomor 7 tentang RPJMD, maka tidak seluruh program yang bersifat prioritas tersebut dilaksanakan pada

tahun 2014. Program yang belum dilaksanakan pada tahun 2014 tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2015.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 telah mengamanatkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terbagi pada penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan merefleksikan Pencapaian Kinerja Misi Pembangunan dan sembilan Agenda Prioritas Kota Balikpapan tahun 2015.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Secara umum Pemerintah Kota Balikpapan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2013 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 50 sasaran dan jumlah indikator kinerja sebanyak 276 indikator.

Menindak lanjuti hasil evaluasi Lakip Kota Balikpapan Tahun 2012, maka Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2016 direview kembali dan ditetapkan bahwa tahun 2013 dan seterusnya, Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan memiliki sasaran sebanyak 46 (empat puluh enam) dan indikator kinerja sebanyak 181 indikator kinerja. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Tahun 2014 sasaran dan indikator kinerja sasaran tersebut dipadatkan kembali menjadi 16 sasaran dan 20 Indikator Kinerja sasaran.

Dari 16 sasaran dengan 20 indikator kinerja, pencapaian target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Balikpapan pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.71
PENCAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			Target Akhir Rpjmd	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kualitas/mutu pendidikan	1. Angka Melek Huruf	98.84	98.86	100.02	98.49	81.19%
		2. Rata - Rata Lama Sekolah	10.39	10.41	102.35	10.20	102.05%
2	Meningkatnya lapangan usaha dan lapangan kerja	1. Tingkat pengangguran	7.90%	8.17%	96.16	5.2%	63.64%
3	Meningkatnya Status kesehatan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	72.26	73.94	102.32	72.3	102.26%
4	Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan	1. Penurunan Konflik	0	0	100%	0	100%
5	Meningkatnya pertanian dalam arti luas	1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	428M	669M	156	550M	121%
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	1. Indeks Kemiskinan Manusia				**	***
7	Meningkatnya kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat	1. Pertumbuhan ekonomi	4.6%	3.98%	86.53%	7.92%	50.25%
		2. Inflasi	7.38% ± 1	6.26%	159,7%	7.46%	119%
8	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial	95%	78,8%	83%	100%	78.85%
9	Meningkatnya Kapasitas penyelenggara pelayanan publik	1. Skor Survei Kepuasan Masyarakat	80	79.36	99.2%	85	93.36

10	Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat	1	Rasio Ketersediaan daya listrik	435.5KW	432.35KW	99.27	**	**
11	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan	1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	39481688	39481688	100%	**	**
12	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	1	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	-
13	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2	Indeks Persepsi Korupsi					
		1	Nilai akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan	BB	CC	-	BB	-
		2	Nilai LPPD	3.0926	3.0829	99.82%	3.0926	99.82%
14	Terwujudnya Infrastruktur Dasar	1	Persentase Panjang Jalan	80%	100%	125%	100%	100%
15	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam keluarga	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88	90.05	102.32 %	90	100.05
16	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	1.	Skor Survei Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan Keindahan kota	80	84.2	105.25 %	85	99.05%

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2015 disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas/ Mutu Pendidikan

Indikator : 1. Angka Melek Huruf
2. Rata- rata Lama Sekolah

Tabel. 2.72
Realisasi Kinerja Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka melek Huruf	98.84	98.86	100.02%	98.49%	81.19
2.	Rata – rata Lama Sekolah	10.17	10.41	102.3%	10.20	102.50%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran 1, yaitu meningkatnya kualitas/mutu pendidikan secara umum telah tercapai dan melebihi dari target.

1). Angka Melek Huruf

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, Angka Melek Huruf (AMH) digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Angka Melek Huruf pada dokumen RPJMD 2011-2016 sebagai salah satu indikator yang menunjang pencapaian misi Walikota yaitu, Meningkatnya Kualitas Daya Saing Manusia yang Beriman.

Dari tabel di atas, dapat dilihat realisasi pencapaian target Angka Melek Huruf pada tahun 2015 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi kinerja tahun 2015 menunjukkan bahwa Angka Melek Huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 100,02% dari target 98,84. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk sasaran ini. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 98,49% dari rencana kinerja tahun 2016.

Tabel. 2.73
Angka Melek Huruf Kota Balikpapan Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Angka Melek Huruf	79.70	79.97	98.64	99.83	99.84

Sumber: Dinas pendidikan Kota Balikpapan

Jika dibandingkan dengan Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Timur yang telah mencapai 98,64 persen atau melebihi target tahun 2014 yang diprediksikan sebesar 98,40 persen. Namun, rata-rata lama sekolah masih dibawah target dari 10 tahun atau hanya mencapai 9,6 tahun, sedangkan Pemerintah Kota Balikpapan telah mencapai target 10 tahun untuk rata-rata lama sekolah.

Upaya Pemerintah Kota Balikpapan:

Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan kemudahan pada akses pendidikan sebagai efek kebijakan pendidikan pemerintah pusat yang diaplikasikan oleh pemerintah kota Balikpapan. Komitmen untuk mengalokasikan 20 persen dari APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan. Realisasi dari anggaran pendidikan ini dapat berupa bantuan seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS) . Dengan adanya BOS, biaya pendidikan dasar dan wajib belajar sampai pada tingkat SLTA menjadi lebih ringan. Bantuan lain dapat berupa buku-buku, dan beasiswa. Penambahan jumlah dan kualitas sarana serta prasarana pendukung pendidikan seperti penambahan jumlah sekolah, jumlah gedung sekolah, kelengkapan lab-lab penunjang pelajaran serta transportasi siswa. Meningkatnya kualitas pendidik dan kesejahteraan pendidik. Peningkatan kualitas melalui pemberian pelatihan bagi guru dan beasiswa guru untuk melanjutkan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan dengan pemberian insentif dan lain-lain.

2). Rata- rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya sangat baik, karena mencapai 102,3% dari target yang dirumuskan Pada tahun 2015. Realisasi capaian di tahun 2015 juga telah melebihi target yang di tetapkan di akhir tahun 2016 penyelenggaraan RPJMD yaitu rata- rata lama sekolah selama 10 tahun.

Tabel. 2.74
Matrik Rata- rata Lama Sekolah
Kota Balikpapan Tahun 2011-2014

Skala	2011	2012	2013	2014
Balikpapan	10.16	10.29	10.39	10.41
Kalimantan Timur	8.79	8.83	8.87	9.04
Nasional	7.52	7.59	7.61	7.73

sumber: ipm.go.id

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Pemerintah Kota Balikpapan, selama 2011-2014 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 10.28 di tahun 2011 menjadi 10.41 di tahun 2014 (setara SLTA). Peningkatan rata-rata lama sekolah di Pemerintah Kota Balikpapan ini dapat

dimaknai bahwa penduduk Kota Balikpapan semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Selain Rata-rata lama sekolah, akses pendidikan juga bisa digambarkan oleh beberapa data lain seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Selain itu, juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau, seperti data tentang rasio antara jumlah murid dengan jumlah guru atau sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Bagian berikut akan menguraikan situasi untuk beberapa aspek tersebut di atas.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator untuk melihat angka pendidikan di setiap jenjangnya tanpa melihat umur penduduk yang mengenyam bangku sekolah. APK Pemerintah Kota Balikpapan dalam 3 tahun terakhir untuk SD/MI mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk diluar usia SD/MI (7-12 tahun) yang bersekolah di jenjang SD/MI semakin menurun mengingat persentase sudah melebihi 100 persen namun meningkat di tiap tahunnya. Sedangkan pada APK jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA secara umum terlihat trendnya meningkat di tiap tahunnya. dapat dilihat dari gambar berikut berikut:

Tabel 2.75

Data APK Kota Balikpapan Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Data APK SD/MI	103.31%	106.26%	111.40%	106.19%	112.65%
Data APK SMP/MTs	103.01%	95.45%	104.80%	97.56%	103.38%
Data APK SMA/MA	70.39%	83.15%	93.29%	82.19%	83.17%

Sumber: kemendikbud.go.id

Tabel. 2.76

Data APM Kota Balikpapan tahun 2011- 2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Data APM SD/MI	103.31%	106.26%	111.40%	106.19%	112.65%
Data APM SMP/MTs	74.67%	78.29%	74.91%	80.59%	86.59%
Data APM SMA/MA	52.51%	60.88%	67.68%	57.91%	67.38%

Sumber: kemendikbud.go.id

4. Rasio Murid Terhadap Guru

Rasio ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid dimana memperlihatkan kecukupan jumlah guru disuatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar.

Tabel. 2.77
Rasio Murid Terhadap Guru Kota Balikpapan Tahun 2011-2015

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI	21.95	22.13	21.96	17.15	21.15
SMP/MTS	15.69	16.88	17.13	7.96	18.34

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Balikpapan

5. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan Kota Balikpapan dapat dihitung dari jumlah lulusan pada jenjang sekolah (SD/SMP/SMA) dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi pada ajaran sebelumnya.

Tabel. 2.78
Angka Kelulusan Kota Balikpapan Tahun 2015

SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	orang	10901	100 %
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	orang	10901	
SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	orang	9924	100 %
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	orang	9924	
SMA/SMK/MA	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	orang	7936	99.70%
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	orang	7960	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 adalah:

1. Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD);
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
3. Program pendidikan menengah;
4. Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hambatan/Masalah:

Indikator jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesi melampaui target, sebab selain melalui APBD, terdapat program sertifikasi profesi yang dilaksanakan melalui anggaran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun demikian jumlah tersebut jika dibandingkan dengan total jumlah guru keseluruhan guru yang bersertifikasi baru 60 %, hal ini dikarena terbatasnya kuota sertifikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur atau Pemerintah Pusat, sehingga proses sertifikasi guru harus dilaksanakan secara bertahap.

Masih ada sekolah yang menerapkan *double shift* dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, terutama pada sekolah yang diminati masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan:

Melaksanakan Verifikasi berkas tenaga pendidik dan mengoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk meminta kuota program sertifikasi, disamping tetap mengalokasikan program sertifikasi melalui APBD.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015 sudah diputuskan untuk menerapkan PPDB on-line, sehingga jumlah siswa yang diterima sekolah-sekolah terdata riil time di Dinas Pendidikan, dengan demikian jumlah siswa per rombel akan dapat dijaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran 2 : Meningkatkan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja

Indikator : Tingkat Pengangguran

Tabel. 2.79
Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tingkat Pengangguran	7.90%	8.17%	96.69%	5.2%	63.64%

Tingkat Pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam

persen. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Hambatan/Masalah:

- Lesunya pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur;
- Ketidaksesuaian antara lulusan sekolah dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga semakin banyak lulusan sekolah yang menganggur karena tidak diterima bekerja di perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan.
- Masih rendahnya kualitas SDM menjadi penilaian tersendiri bagi perusahaan penerima calon pekerja. Masih banyaknya pelamar kerja dan bahkan karyawan yang sudah dipekerjakan tidak memenuhi standar yang diinginkan perusahaan terkait.

Langkah pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam rangka mengurangi jumlah pencari kerja adalah dengan mengadakan Bursa tenaga kerja. Mengadakan pelatihan gratis, dan pemagangan kerja serta bimbingan bagi para pencari kerja dalam meningkatkan skill/kemampuan kerja bagi para pencari kerja.

Sasaran 3 : Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
Indikator : Angka Harapan Hidup

Tabel. 2.80
Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka Harapan Hidup	72.26	73.95	102.33%	72.5	102 %

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan Tahun 2015 mencapai angka 73.95, capaian tahun ini melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yaitu 72.26, bahkan telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir tahun RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Balikpapan memberikan perhatian yang besar dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel. 2.81
Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan Terhadap Nasional dan Provinsi

Skala	2010	2011	2012	2013	2014
Balikpapan	73.90	73.91	73.92	73.93	73.94
Kalimantan Timur	72.89	73.10	73.32	73.52	73.62
Nasional	69.81	70.01	70.20	70.40	70.59

Sumber : ipm.bps.go.id

Pencapaian AHH yang tinggi juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi tercapainya Angka Harapan Hidup adalah:

a).Menurunnya angka Kesakitan

Menurunnya angka pesakitan ditandai dengan Meningkatnya jumlah penduduk usia >18 Tahun yang diperiksa faktor resiko terhadap Penyakit Tidak Menular dari 5% menjadi 25% serta Meningkatnya jumlah pos pembinaan terpadu (POSBINDU) PTM menjadi 21 Pkm.

b). Peningkatan gizi masyarakat

Peningkatan Gizi masyarakat dapat dilakukan dengan adanya peningkatan pemahaman, kesadaran kemandirian masyarakat dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyarakat. Selain itu pula terdapat beberapa aspek yang menjadi penunjang keberhasilan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 2.82
Matrik Aspek Penunjang Tercapainya Peningkatan gizi masyarakat

No	Hal yang akan dicapai	Aspek Penunjang	Capaian Kinerja	
			2014	2015
1	Meningkatnya pemahaman, kesadaran kemandirian masyarakat dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyarakat	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Swasta dalam penanggulangan masalah gizi masyarakat yang ditandai dengan:		
		Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%	100 %	100 %

	Cakupan kunjungan bayi dan balita ke posyandu dari 79,78% menjadi 84%	80,5%	78,46%
	Cakupan ASI eksklusif dari 40% menjadi 70%	71,4%	73,07%
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin mencapai 100%	100%	100%
	Cakupan balita 6-59 bulan yang mendapat vitamin A dari 80% menjadi 84%	77,1%	81,11%
	Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe dari 66,68% menjadi 82%	93,9%	92,12%
	Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium mencapai 100%	97,5%	97,54%
	Tercapainya pelaksanaan surveilans gizi hingga 100%	100%	100%
	Cakupan keluarga sadar gizi (kadarzi) dari 60% menjadi 75%	71,4%	73,07%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Balikpapan 2015

c). Pelayanan kesehatan yang baik

Pelayanan Kesehatan yang baik dapat dicapai apabila telah memenuhi beberapa aspek, diantaranya adalah dengan tersedianya fasilitas serta sarana dan prasarana kesehatan yang mendukung pelayanan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat mulai dari Rumah Sakit Umum (1 unit) Hingga Puskesmas. Jumlah Puskesmas dibalikpapan sebanyak 27 Puskesmas untuk 34 Kelurahan dan 6 Kecamatan sekiranya cukup memadai untuk melakukan pelayanan kesehatan cepat tanggap terhadap masyarakat kota Balikpapan. Peningkatan pelayanan puskesmas juga terus dilakukan, diantaranya dengan Meningkatkan Puskesmas Perawatan mampu PONED dari 4 Puskesmas menjadi 7 Puskesmas.

d). Menurunnya angka kematian bayi

Angka Kematian Bayi di Kota Balikpapan tahun 2015 berjumlah 78 Kasus. Jumlah kasus kematian bayi ini menurun jika dibandingkan dengan

tahun 2014 (68 kasus). Penyebab kematian tertinggi adalah BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, sepsis, kelainan kongenital, pneumonia, dan diare serta penyebab lainnya.

e). Menurunnya angka kematian Ibu

Jumlah Angka Kematian Ibu di Kota Balikpapan tahun 2015 berjumlah 9 Kasus. Jumlah kasus ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu berjumlah 14 kasus. Penyebab kematian tertinggi adalah penyebab langsung yaitu eklampsia dan perdarahan.

Sasaran 4 : Mewujudkan Kondusifitas Di Daerah Dengan Mensinergikan Peran-Peran Masyarakat Dan Pemerintahan Dalam Pembangunan

Indikator : Penurunan Konflik

**Tabel. 2.82
Realisasi Kinerja Sasaran 4 Tahun 2015**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penurunan Konflik	0	0	100%	0	100%

Dari data dan informasi pada tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran ke-4 yaitu mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan telah tercapai. Karena tidak ada konflik antar agama yang terjadi di masyarakat. Hal ini karena upaya yang dilakukan oleh kota Balikpapan dalam mengatasi konflik dilaksanakan mulai dari tingkat RT, selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam menangani konflik, sangat tinggi.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pertanian dalam arti luas

Indikator : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

**Tabel. 2.83
Realisasi Kinerja Sasaran 5 Tahun 2015**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	428M	669M	156%	550M	121%

Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2015 Sektor pertanian telah melebihi target yang ditetapkan dalam pencapaian kinerjanya. dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD realisasi kinerja tahun ini juga telah melebihi target akhir tahun RPJMD yang telah ditetapkan.

Hambatan/masalah:

- Kondisi iklim/cuaca yang tidak menentu dan musim kering yang cukup lama;
- Kondisi iklim/cuaca yang tidak menentu dan musim kering yang cukup lama, sehingga pertanaman padi untuk musim gadum (April-September) tidak optimal;
- Karena keterbatasan modal peternak, maka penyediaan sapi yang ada di peternak Balikpapan masih fokus hanya untuk penyediaan sapi potong pada hari Raya Idul Adha.
- Peternak ayam petelur Kota Balikpapan sebagian besar tutup sejak tahun 2014, hanya tersisa 2 peternak saja yang masih bertahan. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga pakan ayam petelur.
- Menurunnya produksi rumput laut karena adanya serangan penyakit rumput laut yaitu serangan “ice-ice” (sejenis bakteri) yang muncul akibat fluktuasi parameter kualitas air yang ekstrim (salinitas, suhu air laut, bahan organik terlarut dan intensitas cahaya matahari). Juga disebabkan oleh serangan hama seperti ikan baronang, penyu hijau, bulu babi dan bintang laut.
- Menurunnya produksi budidaya ikan terutama tambak karena ada beberapa tambak tidak aktif, sedangkan yang sudah aktif juga masih belum menggunakan teknik budidaya padat tebar secara optimal.
- Musim selatan pada tahun 2015 cukup panjang dan tidak menentu, kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, juga ditambah adanya peraturan tentang larangan transshipment (penghentian sementara perdagangan hasil tangkapan ikan di laut), sehingga mengakibatkan penurunan produksi perikanan tangkap.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan:

Dalam kondisi iklim/cuaca yang tidak menentu, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain: dengan meningkatkan pertanaman padi ladang,

sehingga dapat menambah produksi padi. Juga dapat dilakukan perbaikan tanggul dan pintu irigasi sebagai antisipasi pengaturan air untuk padi sawah.

Meningkatkan populasi sapi yang ada di peternak, baik melalui pengembangan sapi bibit maupun penggemukan sapi potong yang didanai secara swadaya, dukungan pemerintah (APBD dan APBN) dan atau pihak ketiga.

Peternak ayam telur Kota Balikpapan agar mengurangi ketergantungan pakan dari luar (impor) yang notabene harganya tinggi, dan segera mencari alternatif pakan yang dapat diproduksi sendiri dengan formula nutrisi yang berbasis pada bahan baku dari Kota Balikpapan dan sekitarnya.

Pengendalian hama dan penyakit dalam budidaya rumput laut harus secara terpadu dan intensif, terutama pengendalian secara preventif (pencegahan).

Tambak-tambak yang masih belum aktif sebaiknya didukung agar aktif kembali dan sudah menggunakan teknik budidaya yang tepat, sehingga produktifitasnya dapat mencapai 1 ton per ha per 1 kali budidaya.

Dukungan terhadap sarana dan prasarana tangkap akan terus ditingkatkan melalui dukungan pemerintah, sehingga kemampuan tangkap nelayan akan meningkat dan tidak bergantung pada transshipment.

Sasaran 6 : Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Indikator : Indeks Kemiskinan Manusia

Tabel. 2.84
Realisasi Kinerja Sasaran 6 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kemiskinan Manusia	5.60	5.61	99.82%	5	89.12%

Pada Tahun 2015 Indeks Kemiskinan Manusia Kota Balikpapan berada di angka 5.61%, angka ini telah mencapai 99.82% dari target yang ditetapkan di Tahun 2015 dan telah mencapai 89.12% bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD di tahun 2016.

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) didefinisikan sebagai indeks komposit yang mengukur deprivasi (keterbelakangan) dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan dan (3) standar hidup layak, yang dianggap

sebagai indikator inti dari ukuran deprivasi manusia. IKM pada dasarnya adalah bentuk pengukuran kemiskinan yang relatif baru dan lebih luas dari sekedar mengukur kemiskinan dari indikator pendapatan dan pengeluaran. Skala IKM terletak antara 0 (terbaik) hingga 100 (terburuk). Artinya, makin besar skor IKM suatu wilayah, maka makin besar derajat keparahan kemiskinan wilayah itu, dan sebaliknya.

Tabel. 2.85
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kota Balikpapan dan
Komponen Penyusunnya, Tahun 2012-2014

Variabel IKM	2012	2013	2014
Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 th (%)	7,23	7,21	7,20
Angka buta huruf usia dewasa (%)	1,09	0,90	0,89
Penduduk tanpa akses terhadap air bersih (%)	2,93	2,82	2,80
Penduduk tanpa akses terhadap sarana kesehatan (%)	0,5	0,5	0,5
Balita kurang gizi (%)	13,7 [*])	13,7 [*])	13,5 [*])
IKM	5,70	5,68	5,65

Penghitungan Indeks Kemiskinan (IKM) kabupaten/kota di Indonesia untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1998. Secara nasional Kota Balikpapan menduduki peringkat ke 290, dimana semakin kecil angka IKM nya maka semakin besar peringkat IKM suatu kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2002-2014, angka IKM Kota Balikpapan terus membaik. Tercatat tahun 2002 sebesar 7,98 mengalami perbaikan hingga mencapai 5,75 di tahun 2010, 5,71 tahun 2011, 5,70 tahun 2012, 5,68 persen tahun 2013 dan 5,65 persen tahun 2014. Hal ini didorong oleh membaiknya komponen-komponen pendukung dalam penghitungan IKM.

Upaya yang dilakukan:

- Dalam upaya memperpanjang Angka Harapan Hidup diperlukan gizi masyarakat yang baik dan pola kualitas kesehatan oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan dengan membentuk pola kemitraan antara

tenaga kesehatan dan non kesehatan dan meningkatkan peran swasta yang terlibat didalamnya.

- Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bersih dan sehat, pemerintah melakukan peningkatan fasilitas penunjang dan meningkatkan peran serta stakeholders, tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai unsur terdekat dalam lingkungan.
- Pembebasan biaya pendidikan disertai dengan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Sasaran 7 : Meningkatkan Kekuatan perekonomian pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat

Indikator :

1. Pertumbuhan Ekonomi

2. Inflasi

Tabel. 2.86
Realisasi Kinerja Sasaran 7 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4.6%	3.98%	86.53%	7.92%	50.25%
2.	Inflasi	7.38%	6.26%	159.74%	7.46%	119%

Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2015 mengalami perlambatan, dengan capaian 86.53% dari target 4.6%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian tahun 2015 juga masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami tren menurun karena dampak kontraksi sektor pertambangan di Kalimantan Timur yang berpengaruh kepada sektor-sektor utama di Balikpapan (Konstruksi, Transportasi dan Perdagangan).

Tabel. 2.87
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan
Tahun 2011-2016

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4.60	5.57	3.60	4.67	3.98

Sumber : Bagian Perekonomian Setdakot Balikpapan

Hambatan:

- Penurunan nilai Produksi Batubara dan nilai jual Sawit di daerah Hinterland kota Balikpapan tidak secara langsung mempengaruhi geliat aktifitas ekonomi Kota Balikpapan akan tetapi aktifitas pendukung di sektor pertambangan dan aktifitas ekonomi pekerja ada di Balikpapan. Hal inilah yang berpengaruh langsung pada sektor perdagangan, jasa, dan perumahan.
- Perlambatan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2015 secara global dipengaruhi oleh menurunnya nilai jual minyak mentah dan menguatnya mata uang dolar terhadap mata uang Negara lain termasuk mata uang Rupiah.

Upaya Mengatasi Hambatan:

- Mempercepat proses pengembangan Coastal Road dan Kawasan industri Kariangau;
- Mempermudah dan mempercepat Proses Perizinan UMKM;
- Membuat Program *City Branding* dalam rangka *Tourism Tread Investment*, menarik investor di bidang pariwisata.

2). Inflasi

Tahun 2015, Kota Balikpapan mengalami inflasi sebesar 6,26%. Masih diatas inflasi nasional yang sebesar 3,35%. Namun angka tersebut merupakan yang terendah dalam kurun 5 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 2011: 6.45%, 2012: 6.41%, 2013: 8.56%, dan 2014: 7.43%. Lebih rendahnya inflasi pada tahun 2015 dibandingkan beberapa tahun terakhir disebabkan Pemerintah Daerah yang semakin concern tentang pentingnya pengendalian inflasi.

Kelompok inflasi inti masih menjadi pemberi andil inflasi terbesar yaitu sebesar 2,51%, yang diantaranya disumbang oleh sewa rumah. Sementara itu, Kelompok volatile foods memberi kontribusi inflasi sebesar 2,43% (yoy) yang disumbang oleh kelompok bahan makanan. Sedangkan kelompok *administered price* memberi kontribusi inflasi sebesar 1,32% yang disumbang oleh kenaikan tarif angkutan udara, cukai rokok, tarif LPG, dan tarif Listrik.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan:

- Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) Kota Balikpapan dalam rangka menekan Inflasi di kota Balikpapan;
- Mengintruksikan kepada Bulog untuk melakukan operasi pasar beras;
- Mengintruksi kepada Pertamina untuk melakukan operasi gas elpigi 3 kg;
- Bersama Unsur Pimpinan Daerah melakukan rapat koordinasi dan melakukan sidak pasar menjelang hari-hari besar keagamaan;
- Mengintruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk siswa baru untuk Sekolah Dasar yang masuk ke sekolah menengah selama 6 bulan masih dapat menggunakan seragam SD nya begitu pula SMP ke SMA;

Sasaran 8 : Meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

Indikator : Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial

Tabel. 2.88
Realisasi Kinerja Sasaran 8 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase PMKS yang menerima Bantuan Sosial	95%	78,85%	83%	100%	78.85%

Peningkatan Pelayanan dan perlindungan terhadap PMKS dalam pengukuran capaian Kinerjanya mempergunakan angka PMKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial sebagai tolak ukur. Sedangkan ditingkat nasional tolak ukurnya mempergunakan jumlah penerimaan manfaat yang memiliki kemampuan dasar melakukan aktifitas harian dan jumlah penerima manfaat yang terpenuhinya kebutuhan dasar.

PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun 2015 sebanyak 13.888 orang. Target kinerja sebanyak 10.913 orang. Target tersebut dicapai melalui program pelayanan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial, serta program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

PMKS di Balikpapan yang mendapatkan bantuan di Balikpapan terdiri dari: Anak balita terlantar (ABT), Anak terlantar (ANTAR), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak jalanan (Anjal), Anak yang memerlukan perlakuan Khusus (AMPK), Lanjut usia Terlantar, Penyandang cacat, Tuna susila, Gelandangan, Pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, Orang

dengan HIV/AIDS, Korban penyalahgunaan Narkoba, Korban Tindak kekerasan, Pekerja Migran dan Orang terlantar di perjalanan, Korban bencana alam, Korban Bencana Sosial, Wanita Rawan Sosial ekonomi, Fakir Miskin, keluarga bermasalah sosial Psikologis, keluarga berumah tak layak huni.

Sasaran 9 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara pelayanan Publik
Indikator : Skor Survei Kepuasan Masyarakat

Tabel. 2.89
Realisasi Kinerja Sasaran 9 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skor Survei Kepuasan Masyarakat	80	79.36	99.2%	85	93.36%

Capaian realisasi dari indikator Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Tahun 2015 mencapai 99.2% dari target nilai 80. Skor survey Kepuasan masyarakat kota Balikpapan tahun 2015 berada di angka 79.36, termasuk dalam kategori Baik. Skor ini mengalami kenaikan tiap tahunnya, walaupun jumlah responden dan instansi pelayanan yang disurvei berubah di setiap tahun. Tahun 2012 sebanyak 6 unit Pelayanan, Tahun 2013 sebanyak 130 unit Pelayanan, Tahun 2014 dengan 140 unit pelayanan, dan Tahun 2015 sebanyak 250 unit pelayanan.

Tabel. 2.90
Skor Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2012-2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015
1.	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	73	75.71	76.73	79.36

Sumber : Bagian Organisasi Setdakot Kota Balikpapan

Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Balikpapan dilaksanakan secara mandiri dengan membuat Tim Survei yang melibatkan pengawas sekolah, Penyuluh Keluarga Berencana, dan Staf Bagian Organisasi, serta unsur Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman dan Dinas Kesehatan. Pada Tahun

2015, Tim SKM melakukan Survei terhadap 250 unit pelayanan yang terdiri dari 162 sekolah, 34 Kelurahan, 27 Puskesmas, 6 Kecamatan dan 20 SKPD.

Survey dilakukan dengan menyebarkan *questioner* yang jenis pertanyaannya disesuaikan dengan unit yang akan disurvei. Lembar questioner diberikan kepada responden yang dipilih secara acak sederhana yang disesuaikan dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh dapat seobjektif mungkin. Untuk menghindari bias, maka pemilihan responden adalah responden yang telah mendapatkan layanan selama dalam waktu referensi survey.

Tabel. 2.91
Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100	A	Sangat baik

Hasil yang diharapkan dari survey kepuasan masyarakat adalah terukurnya kepuasan masyarakat untuk mengetahui pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tertatanya sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna serta tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran 10 : **Meningkatnya cakupan layanan persediaan daya listrik kepada masyarakat**

Indikator : **Rasio ketersediaan listrik**

Tabel. 2.92
Realisasi Kinerja Sasaran 10 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rasio ketersediaan Listrik	435.5 KW	432.35KW	99.27%		

Kondisi pasokan listrik Kota Balikpapan pada Tahun 2015 adalah: Dari 400 megawatt yang tersedia, beban yang digunakan mencapai titik puncak sebesar 420 megawatt. Ketersediaan listrik saat ini masih terbatas. Sehingga, menjadi salah satu faktor dilakukannya pemadaman. Dengan keterbatasan pasokan listrik.

Tabel. 2.93
Data kelistrikanPT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Balikpapan

No.	Uraian	Satuan	jumlah
1	Daya Listrik terpasang 2015	VA	558.065.782
	Daya Listrik terpasang saat ini	VA	562.696.082
2.	Jumlah Kebutuhan listrik 2015	kWH	1.15.240.402
	Jumlah kebutuhan listrik th.2016-2021	kWH	
3.	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik th. 2015	Plg	257.898
	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sampai saat ini	Plg	259.645

Sasaran 12 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi

Indikator : Opini BPK Indeks persepsi Korupsi

Tabel. 2.94
Realisasi Kinerja Sasaran 12 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	100%
2.	Indeks Persepsi Korupsi	6.0	6.62	110.3%	6.5	101.84%

1). Opini BPK

Opini BPK merupakan penilaian pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sasaran 13 : Meningkatkan kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nilai LPPD

**Tabel. 2.95
Realisasi Kinerja Sasaran 13 Tahun 2015**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	CC	-	BB	-
2.	Instansi Pemerintah	3.0926	3.0829	99.82%	3.0926	99.82
	Nilai LPPD	(10 besar)	(11 Besar)			

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseran baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusan-urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, perhatian Pemerintah Kota Balikpapan akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Pelayanan Publik dan Melaksanakan Reformasi Birokrasi”.

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga kata kunci ini menunjukkan juga pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah yang lain. Karenanya, partisipasi dan transparansi juga menjadi kunci selain akuntabilitas untuk membuat pengelolaan publik dengan lebih terbuka dan memberi ruang bagi berbagai pihak.

1). Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

Berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang terdiri dari 5 komponen besar yaitu (1) Perencanaan kinerja (2) Pengukuran Kinerja (3) Pelaporan kinerja (4) Evaluasi Kinerja dan (5) Capaian Kinerja, pada tahun 2015 (LKjIP Tahun 2014) diperoleh nilai/skor rata-rata 55.19 atau dengan predikat penilaian “CC”, dari yang telah ditargetkan B. Pemerintah Kota Balikpapan bertekad akan meningkatkan

kinerja melalui program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja. Menurut penilaian Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kota Balikpapan beserta unit kerja telah menyusun dokumen perencanaan berupa RPJMD, Renstra tingkat SKPD, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Hal yang perlu diperhatikan baik ditingkat kabupaten maupun SKPD adalah kualitas perencanaan, dimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang berorientasi hasil, relevan dan terukur.

Perjanjian Kinerja dibuat walaupun baru sampai level SKPD, dan belum sepenuhnya selaras dengan Perjanjian Kinerja di Level Kota, hal tersebut disebabkan karena masih banyak sasaran dan indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja baik di level kota maupun SKPD masih belum berorientasi hasil.

Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pemerintah dan SKPD di lingkungan kota Balikpapan, namun IKU yang digunakan masih belum sepenuhnya berorientasi hasil dan belum cukup untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian tujuan/sasaran strategis, khususnya ditingkat SKPD.

Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level SKPD, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan pada capaian kinerjanya. Mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum dapat diandalkan.

Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui Inspektorat. Hasil evaluasi secara internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait dengan simpulan hasil yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di SKPD. Evaluasi atas program baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program.

Upaya yang dilakukan:

- Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan Reviu dan Penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama yang awalnya memiliki 46 Sasaran Strategis dan 182 Indikator kinerja Utama telah direvisi menjadi 16 sasaran strategis dan 24 IKU. Hal ini dilakukan dengan mengkaji

ulang Sasaran Strategis dan indikator yang dianggap kurang relevan, kurang spesifik, tidak terukur dan masih jauh dari kata cukup.

- Perjanjian Kinerja (PK) yang semula hanya dibuat pada level Eselon saja, saat ini telah dibuat hingga ke level Esselon III dan IV. Hal ini dimaksudkan agar SKPD terkait memahami tugas dan fungsinya hingga sampai ke level pelaksana kegiatan.

2). Nilai LPPD

LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai sarana laporan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka paling tidak ada 3 (tiga) substansi pokok capaian kinerja disajikan, yaitu: (1) capaian kinerja penyelenggaraan tugas desentralisasi yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), (2) capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan (3) capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Kota Balikpapan meraih posisi 11 besar Nasional dalam pelaporan LPPD tahun 2015 dengan jumlah nilai 3.0829. Capaian ini merupakan sebuah keberhasilan tersendiri bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyajikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Dibanding tahun sebelumnya Kota Balikpapan hanya berada di peringkat 1 Tingkat Provinsi tanpa masuk peringkat Nasional. Dari hasil ini dapat dikatakan capaian kinerja kota Balikpapan terhadap indikator “nilai LPPD” menunjukkan hasil yang positif.

Sasaran 14 : Terwujudnya Infrastruktur Dasar

Indikator : Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik

Tabel. 2.96
Realisasi Kinerja Sasaran 14 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	80%	100%	125%	100%	100%

Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015 di Kota Balikpapan telah mencapai angka 100%, hal ini melebihi target yang ditetapkan pada dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yaitu sebesar 80%. Dan Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian yang dicapai pada tahun 2015 masih melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran 15 : Meningkatnya kemampuan Perempuan dalam keluarga
Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tabel. 2.97
Realisasi Kinerja Sasaran 15 Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88	90.05**	102.32%	90	100.05

***Angka sementara*

Berdasarkan data BPS tahun 2015 Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG) Kota Balikpapan berada di angka 90,05. Angka ini tiap tahun sejak tahun 2011 mengalami kenaikan hingga tahun 2014.

Tabel. 2.98
Indeks Pengarusutamaan gender Kota Balikpapan Tahun 2011- 2014

No	Keterangan	2011	2012	2013	2014
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86.22	86.72	87.14	90.05

Sumber: BPS Kota Balikpapan

Sampai saat ini, keberhasilan peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia umumnya diukur melalui dua standar pengukuran yang dikembangkan oleh UNDP, yaitu Indeks Pembangunan Gender/IPG (Gender-related Development Index) dan Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (Gender Empowerment Measurement), yang kemudian sejak 2010 disempurnakan menjadi Indeks Ketidaksetaraan Gender/IKG (Gender Inequality Index). IKG mengombinasikan elemen dari IPG dan IDG dan menawarkan perbaikan metodologi dan alternatif indikator untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pencapaian pendidikan dan Keterwakilan dalam jabatan publik.

Kesehatan Reproduksi

Aspek kesehatan reproduksi diukur dari angka kematian Ibu, alasannya adalah karena keselamatan ibu (safe motherhood) mencerminkan pentingnya perhatian masyarakat (terutama para suami) dan negara terhadap peran reproduktif perempuan. Dengan demikian, isu kesehatan reproduksi adalah isu gender yang timbul akibat adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, yaitu adanya diskriminasi dan kegagalan pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak seksual dan reproduksi perempuan. Jumlah Angka Kematian Ibu di Kota Balikpapan tahun 2015 berjumlah 9 Kasus. Jumlah kasus ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu berjumlah 14 kasus. Penyebab kematian tertinggi adalah penyebab langsung yaitu eklampsia dan perdarahan.

Pencapaian pendidikan

Dalam aspek ini, kesetaraan dan keadilan gender diukur melalui proporsi penduduk perempuan dan laki-laki usia 25 tahun pendidikan minimal tamat SLTP dan rata-rata lama bersekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka kelulusan Kota Balikpapan Tahun 2015 untuk tingkat SLTP adalah 100%, dihitung dari jumlah siswa yang mengikuti ujian dibagi jumlah seluruh siswa tingkat akhir di SLTP.

Keterwakilan dalam jabatan Publik

Dalam aspek ini, kesetaraan dan keadilan gender diukur dengan melihat persentase keterwakilan perempuan dibanding laki-laki di dalam lembaga legislatif dan eksekutif, hal ini dikarenakan akses dan peluang perempuan dalam kedua lembaga tersebut juga masih sangat lemah/kecil, terutama untuk mencapai posisi pengambil keputusan. Di Kota Balikpapan jumlah pejabat Wanita di lembaga legislatif dan eksekutif sudah menunjukkan angka yang positif. Di lembaga eksekutif, hanya sebanyak 8 orang pejabat Wanita yang menduduki Eselon II. Sedangkan dilembaga legislatif Jumlah Anggota dewan Perempuan adalah 8 orang dari 45 Anggota dewan atau sebanyak 17% dari jumlah Anggota dewan Laki- laki.

Sasaran 16 : Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup

Indikator : Skor survey Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan Kota

**Tabel. 2.99
Realisasi Kinerja Sasaran 16 Tahun 2015**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Akhir RPJMD	Capaian 2015 Terhadap RPJMD 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skor survey Kepuasan masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan Kota	80	84.2	105.25%	85	99.05%

Kebersihan dan Keindahan Kota Balikpapan merupakan program utama dalam rangka memenuhi visi walikota untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kebersihan dan keindahan kota dilakukan selain sebagai wadah masyarakat untuk menyampaikan dan menyalurkan keluhan pelayanan, survei ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Daerah.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial yang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja, maka melalui kerangka ekonomi makro daerah dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta tantangan dan prospek perekonomian guna penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah guna mencapai pembangunan ekonomi dimaksud.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang integral dari proses yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal ini dapat terwujud bila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, dalam sub bab ini diuraikan kondisi ekonomi, perkembangan, perkiraan, serta resiko perlambatan ekonomi yang dihadapi Kota Balikpapan dalam tahun 2017.

3.1.1. Kondisi ekonomi daerah

Secara umum kondisi perekonomian kota Balikpapan pada tahun 2015 secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut:

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Balikpapan Atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2014 sebesar Rp71,61 Trilyun dan pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp72,11 Trilyun. PDRB per kapita kota Balikpapan pada tahun 2014 adalah

sebesar Rp118,35 juta, dan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp122,47 juta.

Sementara pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2014 sebesar 4,67% dan pada tahun 2015 diproyeksi melambat menjadi sebesar 4,28%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 disebabkan antara lain oleh turunnya harga batu bara dan minyak kelapa sawit sehingga berimbas pada penurunan produksi yang secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas dan mobilisasi kegiatan perekonomian di Kota Balikpapan yang merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur. Selain itu pula, adanya pengaruh perekonomian nasional dan global yaitu kebijakan Bank Sentral yang menaikkan BI Rate serta nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap Dollar Amerika Serikat turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan.

Tingkat inflasi Kota Balikpapan di tahun 2015 sebesar 6,26% lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2014 sebesar 7,43%. Adapun penyumbang inflasi kota Balikpapan adalah dari kelompok bahan makanan dan transportasi. Sementara itu Gini Ratio Kota Balikpapan tahun 2014 tercatat sebesar 0,34 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih tergolong sedang. Demikian pula jika dilihat dari distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia, 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kota Balikpapan menikmati 20,07% dari total pengeluaran, menunjukkan tingkat kemiskinan yang tergolong rendah

Indikator perekonomian yang semakin membaik diindikasikan juga berefek pada indikator kesejahteraan sosial masyarakat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.

Kondisi perekonomian kota Balikpapan dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan sosial masyarakat yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.

Tabel 3.1**IPM, Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran
Kota Balikpapan Tahun 2011-2015**

Tahun	IPM	Penduduk Miskin (BPS)	Pengangguran (TPT)
2011	76,02	3,39	12,14
2012	76,56	3,30	7,95
2013	77,53	2,48	8,95
2014	77,93	2,46	7,56
2015	78,05*)	2,35	6,73

Sumber: BPS, 2014 (data diolah Bappeda), *) angka sementara

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia. Capaian IPM Kota Balikpapan terus menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun, hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. Di tahun **2014** nilai IPM sebesar **77,93**. Perbaikan kondisi ekonomi dan program-program dari Pemerintah Kota Balikpapan yang terkait dengan pembangunan manusia dapat meningkatkan indek pembangunan manusia pada tahun 2015 IPM menjadi sebesar 78,05.

Jumlah penduduk miskin, berdasarkan indikator dan kriteria dari BPS dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) mengalami penurunan. Pada tahun 2011 penduduk miskin berjumlah 19.815 Jiwa atau 3,39% dari jumlah penduduk. Pada tahun 2012 jumlah tersebut menurun menjadi 19.539 jiwa atau **3,30%**. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2013 yakni menjadi 14.900 jiwa atau 2,48%. Jumlah ini meningkat pada tahun 2014 menjadi 15.100 jiwa namun secara persentase terjadi penurunan menjadi 2,46%. Penduduk miskin Kota Balikpapan pada tahun 2015 menurun menjadi 14.342 jiwa atau 2,35%. Prosentase ini merupakan yang terendah di Provinsi Kalimantan Timur dan berada dibawah rata-rata nasional.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT), dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) mengalami penurunan. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran terbuka mencapai 12,14% atau sebanyak 34.773 jiwa. Pada tahun 2012 menurun menjadi 8,95% atau sebanyak 24.963 jiwa.

TPT pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun 2012 yakni 7,95% atau sebanyak 22.150 jiwa. Jumlah ini meningkat pada tahun 2014 menjadi 22.315 jiwa namun secara persentase terjadi penurunan menjadi 7,56%. TPT Kota Balikpapan pada tahun 2015 menurun menjadi 16.823 jiwa atau 2,35%.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017

Kondisi perekonomian Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional provinsi Kalimantan Timur.

3.2.1. Nasional

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian nasional masih dan sedang dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat, khususnya yang berasal dari persoalan gejolak dan ketidakpastian ekonomi global. Menurunnya kinerja ekspor akibat pelemahan permintaan global dan merosotnya harga komoditas internasional merupakan faktor utama melambatnya aktivitas ekonomi nasional. Melemahnya kinerja ekspor juga telah berdampak pada kondisi neraca pembayaran Indonesia, khususnya neraca transaksi berjalan (*current account*), yang terus mengalami defisit cukup besar. Berdasarkan kondisi ekonomi global ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional diantaranya:

1. Pelemahan ekonomi Amerika Serikat, sehingga berdampak pada besarnya arus dana asing (*capital inflow*) yang masuk ke Indonesia;
2. Pelemahan pertumbuhan ekonomi global. IMF merevisi dari 3,4 persen menjadi 3,2 persen;
3. Ketidakpastian di Tiongkok baik dari pertumbuhan ekonomi ataupun pasar keuangan yang sering kali memberikan kejutan kepada pasar keuangan global;
4. Pelemahan harga komoditas global, diperkirakan harga komoditas merosot hingga 9 – 11 persen;
5. Pelonggaran moneter di Jepang dan Eropa, lewat penggelontoran dana saat Amerika Serikat mengambil kebijakan pengetatan moneter;
6. Kenaikan Fed Fun Rate;
7. Rata-rata harga minyak diperkirakan masih bergerak pada kisaran 40 dolar AS per barrel.

Meskipun kondisi perekonomian global belum memberikan kepastian yang positif, namun berdasarkan rancangan awal kerangka ekonomi makro 2017, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan membaik yang dicerminkan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diprediksi tumbuh sekitar 5,6-5,9%. Hal ini sejalan dengan tingginya belanja dalam negeri. Sehingga, gejolak ekonomi global tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi domestik demand-lah yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dari fiskal sehingga pihak swasta mulai bergerak. Untuk itu, pemerintah akan menggenjot belanja pada berbagai sektor, salah satunya adalah pada sektor infrastruktur;
2. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,8 - 4,0 persen yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil;
3. Target pertumbuhan investasi di tahun 2017 diproyeksi sebesar 6,0 - 6,6%. Target ini diharapkan tercapai melalui peningkatan aktivitas investasi, khususnya infrastruktur yang lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Penyederhanaan proses perizinan, transparansi proses perizinan secara konsisten dan penerapan standar pelayanan PTSP di seluruh Indonesia dan pelimpahan kewenangan perizinan.
4. Pertumbuhan ekspor diupayakan mencapai 4,5%-5,0%, hal ini dapat tercapai melalui asumsi penurunan harga komoditas global dari 11 persen menjadi 9 persen. Penyebab turunnya harga komoditas dikarenakan membaiknya harga CPO. Di sisi lain harga bahan komoditas seperti timah dan produk kebutuhan global lainnya juga telah berangsur naik;
5. Dari sisi keuangan negara, pendapatan negara diproyeksi tahun 2017 mencapai Rp1.786,0 – Rp1.825,9 Trilyun atau sebesar 12,6% - 12,8% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp299,0 – 302,6 trilyun dengan persentase 2,1%. Untuk Belanja Kementerian/Lembaga (KL) diproyeksi meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp922 trilyun dari Rp784,2 trilyun pada tahun 2016, sedangkan belanja Non KL sebesar Rp540,1 trilyun meningkat menjadi Rp592,7 trilyun di tahun 2017 serta transfer ke daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp770,2 trilyun menjadi Rp889,5 trilyun pada tahun 2017;
6. Dari sisi moneter, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan harus didukung oleh laju inflasi yang rendah dan

stabil serta nilai tukar rupiah yang stabil pula. Pemerintah mengupayakan inflasi berada pada kisaran 3,8% - 4,0% dengan nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp13.700 – 13.875 per dolar AS. Rata-rata Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berkisar 4,0 persen hingga 6,0 persen.

Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami perlambatan akibat dari perkembangan kinerja ekonomi global yang berdampak cukup nyata pada perekonomian nasional. Bahkan dalam tahun 2014, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan tiga tahun sebelumnya yang masih di atas 6 persen. Namun di lain sisi melemahnya perekonomian global mendapat respon yang positif bagi perekonomian Indonesia. Bergesernya status Indonesia sebagai negara tujuan investasi dunia tentu berimplikasi positif bagi pengembangan industri dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah menargetkan pertumbuhan industri mencapai 6,50% pada tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 21,7% terhadap pembentukan PDB, adapun sasaran dan arah kebijakan pembangunan industri yang tertuang dalam RPJMN 2015 - 2019 yaitu:

1. pengembangan perwilayahan industri di luar pulau jawa;
2. penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha;
3. peningkatan daya saing serta produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).

Sesuai arah kebijakan pengembangan perwilayahan industri di luar pulau jawa guna mendukung pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa yang ditargetkan mencapai 12 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan 14 kawasan industri luar pulau jawa pada tahun 2017, pemerintah telah menyusun strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengelolaan SDA;
2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur;
3. Pengembangan SDM dan IPTEK;
4. Pengembangan regulasi kebijakan;
5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, salah satunya melalui pelayanan terpadu satu pintu dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal Indonesia.

Selain memberikan efek positif, tetap harus diwaspadai dampak negatif dari melemahnya perekonomian dunia yang dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Stabilitas ekonomi difokuskan pada upaya mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan memberikan insentif fiskal. Paket kebijakan ekonomi juga dikombinasikan dengan kebijakan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah juga menyiapkan antisipasi krisis yang mungkin terjadi, untuk menghindarkan Indonesia dari *middle income trap* yaitu:

1. Untuk mempertahankan daya beli dan penguatan pasar domestik dilakukan langkah *keep buying strategy* dengan penyiapan paket stimulus untuk mencegah PHK;
2. Mengendalikan laju inflasi;
3. Menganggarkan dana cadangan risiko fiskal sebagai langkah antisipasi apabila asumsi makro berbeda dengan realisasi dan menghambat pelaksanaan realisasi langkah kebijakan serta berpengaruh negatif terhadap APBN;
4. Memberdayakan hilirisasi serta mengembangkan industrialisasi dalam negeri yang berorientasi ekspor;
5. Diversifikasi tujuan ekspor;
6. Kebijakan defisit yang akan ditempuh Pemerintah masih akan bersifat ekspansif namun terukur dan terarah untuk peningkatan kapasitas perekonomian dan penguatan daya saing. Kebijakan fiskal ekspansif tersebut diwujudkan dengan menempuh kebijakan defisit anggaran yang terkendali berkisar 1,7-2,1 persen terhadap PDB.

3.2.2. Kalimantan Timur

Perekonomian Kalimantan Timur sepanjang 2015 mengalami penurunan sebesar - 0,85% lebih rendah dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 perekonomian mengalami pertumbuhan sebesar 2,02%, melambatnya perekonomian kaltim dikarenakan eksplosure ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Di lain sisi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 mencapai Rp564,7 Trilyun berdasarkan harga berlaku mengalami sedikit penurunan dibanding PDRB tahun 2014 sebesar Rp579,01 Trilyun.

Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi Kaltim dipengaruhi oleh penurunan kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang terkoreksi minus 4,69 persen, kemudian sektor konstruksi turun 0,56 persen,

dan lapangan usaha jasa perusahaan juga terkoreksi turun 3,41 persen. Adapun pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 20,84 persen. Struktur perekonomian Kaltim menurut lapangan usaha pada 2015 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yang mencapai 43,03 persen, kemudian industri pengolahan 19,50 persen. Peranan lapangan usaha pertambangan dan penggalian terus menurun selama tiga tahun terakhir akibat berbagai faktor. Sebaliknya, untuk industri pengolahan justru mengalami peningkatan.

Sedangkan dari sisi pengeluaran sebagai dampak menurunnya kinerja komponen ekspor luar negeri dan konsumsi pemerintah, masih terkoreksi yang masing-masing turun 13,32 persen dan 11,32 persen. Permintaan batubara dari mitra dagang utama Kaltim pada tahun 2015 relatif mengalami penurunan kecuali permintaan batubara ASEAN yang menunjukkan peningkatan, yaitu dari tahun 2011 sebesar 22,67 juta ton meningkat menjadi 32,99 juta ton, adapun share ekspor batubara Kalimantan Timur meliputi India sebesar 29%, Tiongkok 28% diikuti Negara ASEAN sebesar 12 % dan Taiwan serta Jepang sebesar 9%. Sementara komponen net ekspor antar daerah justru mengalami pertumbuhan signifikan hingga mencapai 114,19 persen.

Meskipun beberapa komponen dari sisi pengeluaran tumbuh positif, namun secara keseluruhan belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015. Ini sebagai akibat dominannya ekspor luar negeri pada perekonomian Kaltim yang memberi kontribusi 47,93 persen terhadap total PDRB. Perekonomian Kalimantan Timur diproyeksi tumbuh hanya sekitar 0,1% hingga 0,5% dikarenakan sulit untuk berakselerasi tinggi karena selama ini Kalimantan Timur hanya berfokus pada sektor migas dan batubara saja, sehingga tantangan dan risiko yang akan dihadapi Kalimantan Timur pada tahun 2017 antara lain:

1. Harga komoditas yang diperkirakan masih belum membaik sehingga akan berdampak pada penurunan kinerja ekspor kaltim;
2. Penurunan lifting migas akibat *natural declining* di sebagian besar lapangan migas di wilayah kaltim;
3. Pertumbuhan ekonomi Negara mitra dagang utama cenderung melambat (Tiongkok);
4. Anggaran daerah yang terbatas;
5. Kerawanan konflik akibat meningkatnya pengangguran.

Di sisi yang lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap optimistis bahwa prospek perekonomian Kaltim akan membaik dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,0 - 6,5% pada tahun 2017 yang meningkat dari tahun 2016 sebesar 5,2% - 5,6% dan menjaga laju inflasi di level 4,1% di tahun 2016 dan 2017. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi dimaksud akan didorong melalui:

1. Belanja daerah sehingga diharapkan berpengaruh pada investasi swasta;
2. Percepatan penyelesaian infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara;
3. Mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih besar sehingga berdampak pada perekonomian.

Sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018 terdapat 12 prioritas pembangunan, salah satunya yaitu percepatan transformasi ekonomi yang dapat dicapai melalui kebijakan sebagai berikut yaitu:

1. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. percepatan pengentasan kemiskinan;
4. peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
5. pengembangan ekonomi kerakyatan;
6. percepatan transformasi ekonomi;
7. pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan;
8. pengembangan agribisnis;
9. peningkatan produksi pangan;
10. peningkatan kualitas infrastruktur dasar;
11. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah;
12. peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi maka disusunlah kebijakan proyek strategis nasional provinsi Kalimantan timur yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdiri dari:

1. TOL BALIKPAPAN – SAMARINDA
Operasional : tahun 2017 Mengurangi biaya transportasi sampai dengan 32%;

2. KEK MALOY

Operasional: tahun 2018, Industri pengolahan CPO menjadi oleokimia

3. KILANG MINYAK BONTANG

Operasional: tahun 2020, Pengolahan minyak mentah menjadi BBM untuk substitusi impor BBM. Kapasitas: 300 ribu bph

4. JEMBATAN PULAU BALANG

Operasional: tahun 2017, Mengurangi biaya transportasi sampai dengan 12%.

Tahun 2017 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2018 dan sesuai dengan tema RKPD Kalimantan Timur tahun 2017 yaitu pemanfaatan industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas, maka pembangunan memiliki fokus terhadap perkembangan perekonomian daerah dimana kualitas struktur ekonomi diperhatikan secara seksama. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian karena menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi

Kondisi keuangan Kalimantan Timur

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang saat ini terkontraksi, penyaluran kredit yang berlokasi proyek di Kaltim juga terkontraksi disertai dengan peningkatan risiko. Hal serupa terjadi pada sistem pembayaran tunai yang menunjukkan perlambatan.

Pada Januari 2016, pertumbuhan kredit terkontraksi sebesar - 0,21% (yoy) dengan tingkat NPL sebesar 5,76% Transaksi tunai di Kaltim (inflow dan outflow) menunjukkan adanya perlambatan sejak tahun 2014.

Perkembangan fiskal Kalimantan Timur

Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh APBD Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013. Pada tahun 2016,

anggaran pendapatan turun sebesar -1,9% dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp10,5 triliun menjadi Rp10,3 triliun. Sementara untuk anggaran belanja mengalami penurunan sebesar - 3,4% dibandingkan tahun 2015 dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11 triliun.

Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhi kemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan mengakibatkan APBD 2016 mengalami defisit yang membesar. Hal ini berdampak pada penundaan beberapa pos belanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.

Oleh karena itu diperlukan strategi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Mendorong upaya percepatan pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35 GW melalui penajaman identifikasi terhadap kendala yang dihadapi dan membentuk Tim Percepatan Pembangunan di daerah;
2. Mendorong percepatan penyerapan fiskal, terutama proyek infrastruktur daerah;
3. Peningkatan Pendidikan;
4. Memperkuat dan memperbanyak sekolah kejuruan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang lebih spesifik;
5. Memperluas dan mengoptimalkan pemanfaatan lembaga pendidikan non-formal;
6. Hilirisasi SDA;
7. Komitmen pemerintah pusat, antara lain prioritas alokasi anggaran dan insentif untuk swasta dalam melakukan pembangunan di luar Jawa;
8. Memperkuat komitmen pemerintah daerah yang tercantum di dalam arah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan tahapan yang jelas untuk pengembangan industrialisasi;
9. Percepatan penyelesaian dan harmonisasi RTRW antara pusat dan provinsi serta kabupaten/kota;
10. Melanjutkan percepatan reformasi birokrasi untuk mendukung perbaikan iklim investasi, terutama dalam hal memberikan kemudahan perizinan, pengadaan lahan, dan kepastian usaha;

11. Mempercepat penerapan PTSP di daerah sehingga proses perizinan dapat terlaksana dengan cepat dan efisien. Membangun persepsi positif investor melalui penerapan program investor relations yang terarah;
12. Mempercepat pembangunan infrastruktur listrik, jalan dan bandara serta pelabuhan yang mendukung daya saing industri domestik;
13. Pemerintah diharapkan mendukung penelitian dan teknologi untuk pengembangan hilirisasi.

3.2.3 Kota Balikpapan

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota Balikpapan serta mempertimbangkan pengaruh kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka indikator makro ekonomi kota Balikpapan diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Balikpapan

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017
Pertumbuhan Ekonomi	4,02	5,82
PDRB ADHK	Rp74.609.574,34 juta	Rp78.951.747,59 juta
Inflasi	5 ± 1	5 ± 1

- Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2017 diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,82%, tumbuh sebesar 1,8% dari target pertumbuhan di tahun 2016 sebesar 4,02%. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang masih dapat tumbuh meskipun mengalami perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, diharapkan akan ikut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan berdasarkan kriteria dari Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan akan menurun menjadi **19%**.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan di tahun 2017 diprediksikan akan berada di kisaran **3,5 - 4 %** melalui upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi.

- Sedangkan laju inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2017 diperkirakan akan berada pada nilai 5,3%. Nilai tersebut sedikit di atas prediksi inflasi di tingkat provinsi (5 + 1) dan nasional (4%). Inflasi di kota Balikpapan diperkirakan masih dipengaruhi oleh andil *volatile food* dan kewaspadaan extra pada *administered price* yang akan memberikan tekanan inflasi pada indeks harga konsumen karena rencana pemerintah pusat menyesuaikan tarif dasar listrik dan gas.

Memperhatikan proyeksi indikator ekonomi kota Balikpapan, maka terdapat tantangan yang harus dihadapi perekonomian kota Balikpapan meliputi:

- Kondisi perekonomian Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, Nasional maupun global khususnya terkait kebijakan pemerintah mengenai Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika terjadi perubahan terhadap kebijakan tersebut, maka akan mengganggu distribusi barang dan jasa yang dapat berdampak pada peningkatan inflasi.
- Kondisi infrastruktur yang masih buruk di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kota Balikpapan yang telah, sedang dan akan dikerjakan diharapkan akan dapat mendukung peningkatan perekonomian lokal, Provinsi dan Nasional mengingat posisi strategis Kota Balikpapan dalam konstelasi ekonomi regional dan nasional.
- Adanya bonus demografi, yaitu menurunnya angka ketergantungan yang ditunjukkan dengan peningkatan penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Hal ini merupakan keuntungan sekaligus tantangan untuk memanfaatkan bonus demografi bagi peningkatan perekonomian Kota Balikpapan secara umum.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Balikpapan di tahun 2017 antara lain:

Posisi Kota Balikpapan yang sangat strategis, sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan fasilitas lainnya yang sangat berpotensi terhadap kondisi perekonomian di daerah.

- Dukungan infrastruktur kota, antara lain keberadaan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan, Pelabuhan Semayang (penumpang), Pelabuhan Peti Kemas Kariangau dan Terminal bus merupakan faktor strategis sebagai daya dukung perekonomian di daerah.
- Peluang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.
- Pembangunan Coastal Area merupakan kawasan reklamasi sebagai lahan investasi baru yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana modern sepanjang 7,5 km dari kawasan pelabuhan hingga kawasan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan seluas 329 ha.
- Pembangunan Kawasan Industri Kariangau dengan luas lahan 2.721 ha. Hingga saat ini jumlah perusahaan yang telah mengajukan izin sebanyak 52 perusahaan dan telah beroperasi sebanyak 12 perusahaan.
- Akan dilakukannya peningkatan kapasitas produksi kilang minyak Pertamina dari 260 ribu barrel/hari menjadi 360 ribu barrel/hari pada tahun 2016-2017 dan dapat menghimpun investasi sebesar ±35 trilyun.
- Keamanan kota yang kondusif dengan adanya Markas Kodam VI Mulawarman dan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Kota Balikpapan.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Balikpapan serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 maka kerangka perekonomian daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan cara meningkatkan nilai tambah produksi industri dan peningkatan kualitas serta kuantitas UMKM dan koperasi yang mandiri;
2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (integrasi proses hulu dan hilir);
3. Menciptakan kemudahan dan pengembangan berinvestasi melalui peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global;
4. Peningkatan ekspor produk olahan berbahan baku lokal;
5. Pengembangan ekowisata, dengan mengembangkan destinasi dan kelembagaan industri wisata yang berwawasan lingkungan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan. Hal inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Bab III Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, ditegaskan bahwa “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, artinya dana APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintah daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilimpahkan atau yang sudah didesentralisasikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Termasuk struktur APBD yang harus disesuaikan dengan kondisi keuangan

daerah. Struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap mengedepankan kebijakan untuk tidak membebani masyarakat.

Tabel. 3.3
Proyeksi target pendapatan s/d tahun 2017

Uraian	2015	%	2016	%	2017
	Realisasi	kenaikan/ penurunan	Target	kenaikan/ penurunan	Proyeksi
1.PENDAPATAN	2,229,963,480,257.84	14.00	2,542,120,647,000.00	(21.20)	2,003,266,466,100.00
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH	578,957,501,513.84	(3.98)	555,915,503,000.00	(3.04)	538,992,000,000.00
- Pajak Daerah	385,432,289,529.31	(0.74)	382,567,098,263.00	0.01	382,600,000,000.00
- Retribusi Daerah	48,132,803,944.63	24.62	59,983,859,440.00	2.35	61,392,000,000.00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	25,716,622,557.65	(8.62)	23,500,000,000.00	(14.89)	20,000,000,000.00
- Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	119,675,785,482.25	(24.91)	89,864,545,297.00	(16.54)	75,000,000,000.00
b.DANA PERIMBANG-AN	1,145,301,044,119.00	31.18	1,502,367,507,000.00	(23.73)	1,145,825,222,800.00
- Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	125,038,354,850.00	722.03	1,027,855,700,000.00	(26.65)	753,926,365,800.00
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam	622,563,917,269.00	(100.00)	-	#DIV/0!	-

- Dana Alokasi Umum	388,230,396,000.00	0.94	391,898,857,000.00	-	391,898,857,000.00
- Dana Alokasi Khusus	9,468,376,000.00	772.51	82,612,950,000.00	(100.00)	-
c. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	505,704,934,625.00	(4.32)	483,837,637,000.00	(34.18)	318,449,243,300.00
- Pendapatan Hibah	1,185,000,000.00	153.16	3,000,000,000.00	(100.00)	-
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah	222,438,963,625.00	(3.57)	214,503,937,000.00	(10.00)	193,053,543,300.00
- Dana Daerah Lainnya		#DIV/0!		#DIV/0!	
- Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	146,023,971,000.00	(14.13)	125,395,700,000.00	-	125,395,700,000.00
- Bantuan Keuangan Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	136,057,000,000.00	3.59	140,938,000,000.00	(100.00)	-

Terlihat pada tabel diatas peranan PAD terhadap APBD masih tergolong kecil dibandingkan dana perimbangan yaitu berkisar antara 20-25%. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 diproyeksi senilai Rp538.992.000.000,00 dengan total pendapatan daerah diproyeksi sebesar Rp2.003.266.466.100,00 atau menurun kurang lebih 26% dibandingkan tahun 2015. Terdapat beberapa alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan PAD yaitu:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

- a) Melakukan Migrasi Sistem Pelayanan dari Sistem yang lama ke SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). SISMIOP merupakan Sistem Aplikasi yang telah dipakai oleh Dirjen Pajak dalam mengelola PBB sampai tahun 2012 (tahun pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah). Kedepannya SISMIOP ini dapat dikembangkan dari saat ini berbasis dekstop menjadi berbasis web. Sehingga Wajib Pajak Dapat mengakses datanya melalui web secara online;
- b) Workshop Penilaian Individu Objek Khusus bekerjasama dengan Kanwil DJP Kaltim. Objek Khusus berbeda Objek PBB yang ditetapkan secara Massal. Dari sisi nilai pemanfaatannya secara ekonomis membuat NJOP objek khusus lebih tinggi dari NJOP PBB yang ditetapkan. Serta mengadakan workshop penilaian objek khusus antara lain terhadap objek Apartemen/Hotel, Kilang Pertamina, Mall, Menara BTS, Bandara, Pelabuhan, Pabrik, Gudang/workshop, SPBU, Kantor dan Rumah Sakit;
- c) Melakukan kegiatan pemetaan 3 Dimensi dengan melakukan survey objek pajak PBB di sebagian wilayah kota Balikpapan, yaitu Kecamatan Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan

Kota (21 Kelurahan). Melakukan *Updating* peta ZNT (Zona Nilai Tanah) karena selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun peta tersebut belum pernah diperbaharui;

- d) Melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Perda Kota Balikpapan tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pokok perubahan yang diajukan diantaranya mengenai penurunan tarif pengenaan pajak PBB-P2 terkait rencana kenaikan NJOP Bumi sesuai harga pasar untuk keperluan BPHTB;
- e) Melaksanakan Pelayanan Administrasi proses pendaftaran objek PBB-P2 se-Kota Balikpapan dengan target percepatan penyelesaian 3 bulan menjadi 1 bulan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pajak sesuai SPPT PBB-P2, dan menekan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk transportasi dan lain-lain;
- f) Melakukan pemeriksaan atas omzet yang diperoleh wajib pajak pada saat kegiatan penungguan berlangsung dan melaksanakan pendataan fasilitas obyek pajak (uji petik) untuk pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran.

2. Pengembangan kerjasama dalam menggali PAD

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka perlu dikembangkan strategi baru yang hanya berorientasi pada intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah dan pajak daerah.

3. Optimalisasi Perusahaan Daerah

Memformulasikan regulasi-regulasi ekonomi baru terutama mengarah pada optimalisasi perusahaan daerah serta merevitalisasi badan usaha daerah yang sudah ada.

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
3. Dana Alokasi Umum; dan

4. Dana Alokasi Khusus.

Dari tabel proyeksi pendapatan selama kurun waktu tahun 2015 - 2016, sumber pembiayaan APBD Kota Balikpapan masih didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan memberikan kontribusi sebesar 51% pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 59%. Sementara itu Dana Perimbangan pada tahun 2017 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 57,2%. Kebijakan yang ditempuh sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
2. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2017 diasumsikan mencapai proporsi sebesar 15,9% yang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari dana bagi hasil pajak dari Provinsi, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari Provinsi ataupun dari dana hibah dan dana darurat. Upaya peningkatannya antara lain:

1. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, maka terkait dengan efektifitas belanja daerah dapat menjadi salah satu tolak utama terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, terutama sejauh mana kebijakan desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah mampu mendorong tercapai tujuan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan umum di daerah. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Arah kebijakan belanja dipilah dalam belanja langsung dan tidak langsung sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja subsidi dan belanja tidak terduga menyesuaikan dengan kebutuhan nyata seperti kenaikan gaji PNS dan diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah;

2. Belanja Langsung

Belanja hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak serta didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif haruslah menjadi fokus agar tercapainya siklus anggaran yang tepat waktu termasuk cakupan rencana kerja dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Belanja Daerah tidak hanya menggambarkan kebijakan umum pemerintah daerah tetapi juga mencakup detail program yang komprehensif dalam hal estimasi pembiayaannya dan penetapan mekanisme penyaluran serta administrasi dana tersisa (SILPA) yang dikaitkan dengan perubahan rencana kerja agar penyesuaian antara APBD dan realisasi anggaran dapat menghilangkan pemborosan pengeluaran dan juga untuk menjaga keberlanjutan dari suatu program pembangunan. Secara keseluruhan target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2015 dan 2016 serta asumsi belanja tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan belanja daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.4
Proyeksi Belanja Daerah s.d Tahun 2017

Uraian	%	2015	%	2016	%	2017
	Kenaikan/ penurunan	Realisasi	Kenaikan/ penurunan	target	Kenaikan/ penurunan	Proyeksi
2.BELANJA	16.32	2,907,590,320,776.55	7.04	3,112,335,120,000.00	(36.28)	1,983,266,466,100.00
a. BELANJA TDK LANGSUNG	30.56	1,022,778,944,312.37	(2.57)	996,529,968,282.00	(9.95)	897,385,000,000.00
- Belanja Pegawai	7.43	697,690,227,970.37	12.69	786,240,848,282.00	2.49	805,800,000,000.00
- Belanja Bunga	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
- Belanja Hibah	142.78	292,942,600,346.00	(34.32)	192,404,120,000.00	(60.50)	76,000,000,000.00
- Belanja Bantuan Sosial	(10.40)	6,254,308,000.00	35.91	8,500,000,000.00	-	8,500,000,000.00
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota	32.90	998,806,796.00	8.63	1,085,000,000.00	-	1,085,000,000.00
- Belanja Subsidi	-	800,000,000.00	-	800,000,000.00	25.00	1,000,000,000.00
- Belanja Tidak Terduga	406.42	24,093,001,200.00	(68.87)	7,500,000,000.00	(33.33)	5,000,000,000.00
b. BELANJA LANGSUNG	9.83	1,884,811,376,464.18	12.26	2,115,805,151,718.00	(48.68)	1,085,881,466,100.00
- Belanja Pegawai	(100.00)	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
- Belanja Barang Dan Jasa	62.57	794,398,873,850.90	(100.00)	-	#DIV/0!	1,085,881,466,100.00
- Belanja Modal	5.58	1,090,412,502,613.28	94.04	2,115,805,151,718.00	(100.00)	-

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam penganggaran, pembiayaan daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2017 meliputi:

1. Apabila APBD surplus, maka dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
2. Apabila APBD defisit, maka memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan

rasionalisasi belanja tetapi jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit maka ditutupi dengan dana pinjaman dan atau transfer penarikan dana cadangan daerah.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2017 adalah setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal BUMD dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil kajian serta ditindaklanjuti dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Proyeksi Target Pembiayaan Daerah s.d Tahun 2017

Uraian	2015	%	2016	%	2017
	Realisasi	Kenaikan/ penurunan	target	Kenaikan/ penurunan	Proyeksi
3. PEMBIAYAAN					
a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	935,696,004,130.80	(36.33)	595,714,473,000.00	(100.00)	-
- Penerimaan Pinjaman Daerah	935,696,004,130.80	(36.33)	595,714,473,000.00	(100.00)	-
b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
- Penyertaan Modal	30,180,000,000.00	(15.51)	25,500,000,000.00	(21.57)	20,000,000,000.00
- Pembayaran Pokok Utang	30,180,000,000.00	(15.51)	25,500,000,000.00	(21.57)	20,000,000,000.00

Rencana Penggunaan Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah untuk mengalokasikan Dana Program Pembangunan pada tahun 2017 seperti tercantum di dalam tabel berikut:

Tabel. 3.6
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah s.d 2017

No	Uraian	Proyeksi RKPD Tahun 2017 (Rp)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	897.385.000.000
1.	Gaji dan Tunjangan PNS	805.800.000.000
2.	Belanja Hibah	76.000.000.000
3.	Belanja Subsidi	1.000.000.000
4.	Belanja Bantuan Sosial	8.500.000.000
5.	Belanja Bantuan Keuangan	1.085.262.000
6.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
C.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000
1.	Penyertaan Modal (investasi) PEMDA	20.000.000.000
TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT (A+B+C)		917.385.000.000

Total pengeluaran wajib dan mengikat diatas menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk analisis kerangka pendanaan. Dengan demikian, ketersediaan dana untuk mendanai program dan kegiatan tahun 2017, yaitu:

a. Total penerimaan daerah (I)	Rp 2.003.266.466.100,-
b. Total Pengeluaran belanja wajib/ Mengikat (II)	Rp 917.385.000.000,- (-)
Kapasitas keuangan daerah riil (III)	Rp 1.085.881.446.100,-

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, dengan Visi:

“MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN”.

Sebagaimana Visi tersebut dirumuskan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016– 021. Adapun rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1. Penjabaran Misi Ke-1 pada RKPDP Tahun 2017

Misi ke-1 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 memiliki fokus pembangunan utama yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi**. Sejalan dengan focus pembangunan tersebut, dalam pencapaiannya memiliki tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Pada Misi Kesatu sesuai dengan rancangan awal RPJMD Tahun 2016-2021 dijabarkan atas 3 Tujuan, 4 Sasaran, 9 Strategi dan 12 Arah Kebijakan yang terdeskripsi pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi ke-1 atas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing	1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1 Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ	1 Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal berbasis IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ
			2 Peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau	2 Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik usia sekolah

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3 Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	3 Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan 4 Peningkatan kualitas dan kuantitas SARPRAS Pendidikan
		2 Menurunnya jumlah pengangguran	4 Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	5 Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja yang produktif dan kreatif serta berdaya saing
				6 Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan 7 Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja
Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	2 Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan	3 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan	5 Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan.	8 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan serta pengembangan prilaku hidup sehat
	3 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan	4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	6 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 7 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 8 Pengendalian kependudukan	9 Perluasan Program Penanggulangan Kemiskinan 10 Percepatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 11 Pengendalian angka kelahiran

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			9 Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender	12 Penguatan kelembagaan koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender, pengembangan Kota Layak Anak dan meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan

Sumber: Rancangan awal RPJMD Tahun 2016-2021, Bappeda Kota Balikpapan.

Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi 1 dalam RKPD Kota Balikpapan 2017 adalah sebagai berikut:

1.1. Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing

Sumber daya manusia menjadi komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus penentu keberhasilan pembangunan daerah. SDM yang berkualitas tidak hanya cerdas intelektual, namun juga harus cerdas emosional dan cerdas spiritual sehingga kombinasi ketiga kecerdasan tersebut akan menghasilkan SDM yang berdaya saing dan membentuk *smart people* atau masyarakat cerdas. Sektor pembangunan yang paling berpengaruh terhadap sumber daya manusia adalah pendidikan. Pembangunan pendidikan Kota Balikpapan pada tahun 2017 diperluas pada konsep pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ yang diarahkan pada Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal berbasis IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ, Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik usia sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SARPRAS Pendidikan. Pendidikan non formal berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ akan diwujudkan melalui upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana belajar berbasis IT di beberapa sekolah dan penerapan muatan lokal yang berbasis IMTAQ di semua jenjang pendidikan di Kota Balikpapan, pemberian insentif guru PAUD dan insentif ustadzh/ustadzah. Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik diharapkan memperluas akses pendidikan untuk semua penduduk umur

sekolah terutama keluarga kurang mampu melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin, Beasiswa Stimulan Pendidikan dan Hibah bantuan pembangunan sarana prasarana sekolah swasta. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui kualifikasi guru, sertifikasi guru serta pelatihan pengelolaan anggaran dan manajemen sekolah bagi tenaga kependidikan.

Sasaran dari tujuan diatas adalah Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021 yaitu:

- a. **Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 10,45 Tahun dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah 10,43 Tahun.** Artinya Capaian kinerja kualitas pendidikan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,02 tahun pada RKPD Tahun 2017. Diharapkan pada tahun 2017 seluruh usia sekolah di Kota Balikpapan dapat sampai pada tingkat pendidikan menengah yang mendukung program pendidikan 12 tahun sebagai Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur.
- b. **Angka Harapan Lama Sekolah ditargetkan 15,73 Tahun dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah 13,73 Tahun.** Artinya Capaian kinerja kualitas pendidikan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Harapan Lama Sekolah memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 2 (dua) tahun pada RKPD Tahun 2017. Target pencapaian pada tahun 2017 ini akan mendukung peningkatan IPM Kota Balikpapan.

Terkait capaian sasaran kualitas pendidikan pada Indikator Sasaran Rata-rata Lama Sekolah dengan peningkatan sebesar 0,02 tahun dan Indikator Sasaran Angka Harapan Lama Sekolah dengan peningkatan sebesar 0,02 Tahun. Target dan capaian setiap strategi adalah sebagai berikut:

- a. Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ.
Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ merupakan cara memolakan pendidikan 12 tahun secara berjenjang bagi siswa disetiap sekolah untuk mampu menyerap IPTEK dan mengimplemantasikan IMTAQ secara tuntas. Sejalan hal tersebut, pola Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ memiliki maksud menciptakan sumber daya manusia yang memiliki ilmu dan teknologi yang mampu mewujudkan kreatifitas dan inovasi yang berkelanjutan dengan didasarkan atas nilai keimanan dan budi pekerti luhur dalam pembangunan

masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Capaian dan target strategi ini sebagaimana dalam table 4.2. berikut:

Tabel 4.2. Capaian dan Target Strategi Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ

Indikator	Realisasi Tahun 2015	Target Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1					
Persentase Sekolah Yang menerapkan pengembangan karakter berbasis IPTEK					
SD/MI/Sederajat					
SMP/MTs/Sederajat					
SMA/SMK/MA/ Sederajat					
2					
Persentase Sekolah Yang menerapkan pengembangan karakter berbasis IMTAQ					
SD/MI/Sederajat	57,62%	57,62%	100%	-	100%
SMP/MTs/Sederajat	40%	40%	100%	-	100%
SMA/SMK/MA/ Sederajat	71,42%	71,42%	100%	-	100%
3					
Angka Melek Huruf	99,88%	99,89	99,90%	-	99,91%
4					
Angka Partisipasi Kasar					
PAUD/TK/ Sederajat	55,24%	55,24%	76,00%	-	76,00%
SD/MI/Sederajat	112,65%	112,65 %	112,65%	-	112,65%
SMP/MTs/Sederajat	103,38%	103,38 %	104,00%	-	104,25%
SMA/SMK/MA/ Sederajat	83,17%	83,17%	84,17%	-	85,17%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

- b. Strategi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang Terjangkau.

Strategi peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau merupakan cara pemerintah kota untuk mencapai sasaran kualitas pendidikan seperti hanya strategi mengembangkan pola pendidikan berbasis IPTEK dan berlandaskan IMTAQ. Strategi ini memiliki penekanan pada akses layanan pendidikan dalam ruang lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi (disingkat “TIK”) yang diarahkan untuk e-pembelajaran dan e-administrasi.

Berdasarkan hal diatas, bahwa strategi peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang terjangkau sangat penting untuk diimplementasikan secara luas jejaringnya dalam menghubungkan semua satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan semua kantor pemerintahan yang menangani bidang pendidikan baik di pusat maupun di daerah.

Capaian dan target strategi peningkatan akses layanan pendidikan (berbasis TIK) 12 tahun yang terjangkau yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.3. Capaian dan Target Strategi Peningkatan Akses Layanan Pendidikan (berbasis TIK) 12 Tahun yang Terjangkau

Indikator	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1 Angka Partisipasi Murni					
SD/MI/ Sederajat	96,39%	96,50%	96,50%	-	97,37%
SMP/MTs/ Sederajat	86,59%	87,59%	87,59%	-	88,50%
SMA/SMK/MA/ Sederajat	67,38%	68,38%	68,38%	-	69,38%
2 Angka Partisipasi Sekolah				-	
SD/MI/ Sederajat	93,37%	94,37%	94,37%	-	95,37%
SMP/MTs/ Sederajat	84,29%	85,29%	85,29%	-	86,29%
SMA/SMK/MA/ Sederajat	78,03%	79,03%	79,03%	-	80,03%
3 Angka Putus Sekolah:				-	
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02%	0,02%	0,02%	-	0,02%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,20%	0,19%	0,19%	-	0,18%
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,06%	0,05%	0,05%	-	0,05%
4 Angka Kelulusan :				-	
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	-	100%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	-	100%
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	-	100%
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	-	-	-	-	-
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel 4.3. diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator program sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPJMD) telah memenuhi

target capaiannya, sehingga secara persentase pencapaian terukur untuk tiap indikator sampai dengan periode IV RPJMD sebesar 100% (hasil evaluasi RPJMD tahun 2016). Sehubungan dengan pencapaian pada indikator program pada RPJMD Tahun 2011-2016, pada RKPD tahun 2017 indikator program yang sama dituangkan pada rancangan awal RPJMD tahun 2016-2021 sebagaimana tersaji pada tabel 4.2.

c. Strategi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan.

Strategi peningkatan mutu pendidikan merupakan strategi yang berkelanjutan dengan tujuan memperbaiki mutu pendidikan pada tiap periode waktu perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sehubungan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tersebut perlu direncanakan secara baik dan tepat sasaran agar penyelenggaraan bukan semata-mata bersifat input oriented yang bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output kurang dapat memberikan perbaikan yang signifikan pada mutu penyelenggaraan pendidikan karena tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Capaian dan target strategi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. Capaian dan target Strategi Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan

No	Indikator	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D					
	SD/MI/ Sederajat	2.848	2.848	2.888	-	2.908
	SMP/MTs/ Sederajat	526	526	533	-	533
	SMA/SMK/MA/ Sederajat	1.285	1.285	1.325	-	1.325
2	Rasio guru/murid per kelas rata-rata					

	PAUD/TK	1 : 100	1 : 100	1 : 100	-	1 : 100
	SD/MI/Sederajat	1 : 27	1 : 27	1:26	-	1:25
	SMP/MTs/Sederajat	1 : 18	1 : 18	1 : 18	-	1 : 18
	SMA/SMK/MA/ Sederajat	1 : 14	1 : 14	1 : 14	-	1 : 14
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah					
	PAUD/TK	42.16	42.16	40.05	-	40.50
	SD/MI/Sederajat	26.81	30.13	26.81	-	26.81
	SMP/MTs/Sederajat	20.57	30.31	20.57	-	20.57
	SMA/SMK/MA/ Sederajat	17.52	17.52	17.52	-	17.52
4	Fasilitas Pendidikan :					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	11.11%	10.10%	11.13%	-	11.15%
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	25%	30.31	37.90%	-	37.90%
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	26.31%	29.84%	29.86%	-	29.88%

Berdasarkan tabel 4.4. diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator program sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPJMD) telah memenuhi target capaiannya, sehingga secara persentase pencapaian terukur untuk tiap indikator sampai dengan periode IV RPJMD sebesar 100% (hasil evaluasi RPJMD tahun 2016). Sehubungan dengan pencapaian pada indikator program pada RPJMD Tahun 2011-2016, pada RKPD tahun 2017 indikator program yang sama dituangkan pada rancangan awal RPJMD tahun 2016-2021 sebagaimana tersaji tabel 4.2.

1.2. Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan

Salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual dan berdaya saing adalah faktor kesehatan. Masyarakat yang sehat jasmani sangat mendukung pembentukan manusia cerdas intelektual, sedangkan cerdas emosional dan cerdas spiritual membutuhkan jiwa yang sehat.

Sasaran tujuan tersebut adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan diharapkan tercapai melalui strategi peningkatan aksesibilitas, kualitas dan

manajemen pelayanan kesehatan dengan rumusan operasional akan dilakukan dengan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan pengelola kesehatan masyarakat, peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat FKTP dan rujukan dan optimalisasi regulasi pelayanan kesehatan. Peningkatan aksesibilitas dimaksudkan untuk kemudahan seluruh lapisan masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Kualitas pelayanan kesehatan difokuskan ketersediaan dan profesionalisme sumber daya manusia serta sarana prasarana kesehatan. Manajemen pelayanan kesehatan diharapkan masyarakat semakin pasti dan mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, tanggap, akurat dan nyaman.

Sasaran dari tujuan mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan adalah Meningkatkan derajat Kesehatan dengan target yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Usia Harapan Hidup ditargetkan 73,96 Tahun dari pencapaian indikator sasaran *baseline* tahun 2015 adalah 73,95 Tahun. Artinya Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Usia Harapan Hidup memberikan pengaruh peningkatan (+) sebesar 0,01 tahun pada RKPD Tahun 2017;
- b. Angka Kematian Bayi (AKB) ditargetkan 6 per 1000 kelahiran hidup dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 6 per 1000 kelahiran hidup. Artinya Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) tidak memberikan pengaruh karena nilai capaian indikator sasaran sebesar 0% atau pencapaian pada RKPD Tahun 2017 sama dengan pencapaian *baseline* tahun 2015;
- c. Angka Kematian Ibu (AKI) ditargetkan 68 Jiwa dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 70 Jiwa kelahiran hidup. Artinya Capaian Sasaran Kinerja Derajat Kesehatan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI) memberikan pengaruh penurunan (-) sebesar 2 jiwa pada RKPD Tahun 2017.

Strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkelanjutan adalah Pengembangan Pola Hidup Sehat dan Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, serta memiliki peran

penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai permasalahan penting antara lain disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masalah penting lainnya yang perlu ditangani segera adalah peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, penanganan masalah gizi buruk, penanggulangan wabah penyakit menular, pelayanan kesehatan di daerah bencana, dan pemenuhan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis, peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio dan flu burung, peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, penjaminan mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan, penanganan kesehatan di daerah bencana, serta peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan strategi aksesibilitas kesehatan, Pemerintah Kota bersama jajarannya dalam hal ini tanggungjawab berada pada SKPD Dinas Kesehatan berusaha mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Balikpapan seperti pelaksanaan jamkesda, JPK-PNS, Jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dan kurang mampu.

Sejalan hal tersebut, pelayanan kesehatan masyarakat memerlukan pengaturan yang baik, agar tujuan tiap kegiatan atau program itu tercapai dengan baik. Proses pengaturan kegiatan ilmiah atau ilmu seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif serta rasional untuk mencapai tujuan ini disebut manajemen, sedangkan untuk mengatur kegiatan-kegiatan atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut "Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat". Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan keperawatan. Pelayanan yang dilakukan di Rumah sakit meliputi: gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap, sedangkan di Puskesmas hanya pelayanan gawat darurat (kearah pertolongan pertama) dan rawat jalan.

Sejalan dengan reformasi dibidang kesehatan melalui Paradigma Sehat, pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di Puskesmas lebih difokuskan pada upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif) dengan tidak mengabaikan upaya kuratif-rehabilitatif. Selain itu, pelayanan

kesehatan di rumah sakit dan puskesmas bukan hanya kepada individu (pasien), tetapi juga keluarga dan masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna (komprehensif dan holistik).

Berdasarkan penjelasan diatas, pada RKPD tahun 2017 Pemerintah Kota Balikpapan menyusun strategi Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan yang dirumuskan dalam rumusan operasional berdasarkan strategi tersebut yaitu:

- Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui lembaga dan pengelola kesehatan masyarakat difokuskan pada pelayanan puskesmas dan tenaga kesehatan yang ada di masyarakat termasuk kelompok perempuan;
- Peningkatan manajemen layanan kesehatan di tingkat FKTP dan Rujukan harus ditingkatkan sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat dilayani dengan cepat, tanggap, akurat dan nyaman; dan
- Optimalisasi regulasi Pelayanan Kesehatan sangat diperlukan untuk kepastian dan kenyamanan layanan.

Capaian dan target dari strategi peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen layanan kesehatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.5. Capaian dan target strategi peningkatan aksesibilitas, kualitas dan manajemen layanan kesehatan RKPD TA.2017

No	Indikator	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	Angka Kesakitan	98,11%	98,11%	98,25%		98,25%
2	Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	92,80%	96%	98%		98%
3	Prevalensi HIV dan AIDS	0,03	< 1	< 1		< 1
4	Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	348,46/ 100.000	300/ 100.000	300/ 100.000		275/ 100.000
5	Prevalensi TBC	122,3/ 100.000	125/ 100.000	125/ 100.000		125/ 100.000
6	AKB	6/1.000 KH	6/1.000 KH	5/1.000 KH		4/1.000 KH
7	AKABA	7/1.000 KH	7/1.000 KH	6/1.000 KH		5/1.000 KH
8	AKI	72/100.000 KH	72/100.000 KH	72/100.000 KH		69/100.00 0 KH

9	% Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	0	51,85%	74,07%		75%
10	% Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	50%	60%	65%		70%
11	% Pemenuhan SDM RS	60%	70%	70%		75%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

1.3. Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan

Kesejahteraan masyarakat secara harfiah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemenuhan sandang, pangan dan papan. Untuk dapat memenuhi sandang, pangan dan papan, masyarakat harus mempunyai penghasilan yang diperoleh dari usaha dan pekerjaan. Selain itu pemerataan kesejahteraan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang akhirnya berpengaruh pada kualitas kehidupan masyarakat. Pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan diarahkan pada semakin tingginya kesadaran seluruh unsur masyarakat bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dibutuhkan peran masyarakat luas dan bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Masyarakat harus memiliki daya juang tinggi dan pantang menyerah untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan kehidupan dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual. Lembaga-lembaga masyarakat berperan aktif membangun masyarakat untuk mampu membantu sesamanya. Dunia usaha meningkatkan rasa solidaritas dan penghargaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Upaya pembentukan karakter tersebut harus dilakukan menyeluruh dan berkesinambungan sehingga terwujud Kota Balikpapan yang madani.

Sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah menurunnya jumlah pengangguran serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penurunan jumlah pengangguran menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat usia kerja yang bekerja dan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan kehidupan yang berarti mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri, Untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan difokuskan pada

pengendalian kependudukan, penurunan tingkat kemiskinan dan kesetaraan gender.

Sasaran dari tujuan Mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan, adalah menurunnya jumlah pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Target sasaran menurunnya pengangguran yang akan dicapai pada tahun ini adalah yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021 adalah:

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan 7,95 % dari pencapaian *baseline* Indikator Sasaran tahun 2015 adalah 6,73 % artinya Capaian kinerja pada tahun 2017 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 0,22%. Terkait dengan peningkatan TPT dari 6,73 % menjadi 7,95% berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan perlu mengambil langkah preventif dan bekerja keras untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja. Untuk mengantisipasi peningkatan TPT dibutuhkan dan arah kebijakan.
- b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditargetkan 66,92 % dari pencapaian *baseline* Indikator Sasaran tahun 2015 adalah 6,42 % artinya Capaian kinerja RKPD pada tahun 2017 direncanakan mengalami peningkatan sebesar 0,50%. Terkait dengan peningkatan APAK dari 6,42 % menjadi 6,92%, Pemerintah Kota Balikpapan memperluas lapangan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan angkatan kerja akan lapangan pekerjaan dan melaksanakan pemerataan pembangunan disegala sektor serta membangun relationship antar stake holder untuk turut serta membangun lapangan pekerjaan yang memadai.

Strategi untuk menurunkan jumlah pengangguran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluas kesempatan kerja.

Peningkatan produktivitas kerja sangat penting dalam kondisi semakin banyaknya pengurangan tenaga kerja di beberapa sektor terutama pertambangan sehingga tenaga kerja yang ada dituntut mengoptimalkan hasil produksi. Program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2017 adalah pembinaan dan pengawasan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Balikpapan.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk menjamin perusahaan memperhatikan karyawan melalui lingkungan kerja yang baik, memberikan pelatihan yang cukup, optimalisasi mesin dan peralatan kerja, dan mendukung kesejahteraan karyawan. Dan yang terpenting adalah penetapan kebijakan pengupahan yang melindungi baik pekerja maupun dunia usaha.

Peningkatan kompetensi ketenagakerjaan diarahkan baik pada pekerja maupun yang belum bekerja dengan target menghasilkan tenaga kerja yang kompeten baik dari segi keterampilan, skill, bahasan dan perilaku. Untuk pada pekerja diarahkan pada perusahaan tempat bekerja, pelatihan usaha-usaha masyarakat, pelatihan tenaga kerja dan kerjasama antar dunia usaha.

Sedangkan untuk yang belum bekerja maka harus dilakukan pemetaan tenaga kerja yang selanjutnya dilakukan tindakan lanjutan yaitu pelatihat tenaga kerja untuk seluruh lapisan masyarakat, penempatan tenaga kerja, kerjasama dengan dunia usaha dan kegiatan magang.

Perluasan kesempatan kerja merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran. Upaya perluasan kesempatan kerja berkaitan erat pertumbuhan investasi usaha. Investasi usaha akan memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Untuk mendukung upaya tersebut maka upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan antara lain pemetaan lapangan kerja dan pemetaan tenaga kerja harus dilakukan dalam rangka sinkronisasi antara upaya penyediaan lapangan usaha baru.

Pembinaan usaha kecil masyarakat sehingga semakin meningkat yang akhirnya mampu menyerap tenaga kerja, pembinaan untuk mengembangkan jiwa usaha masyarakat sehingga masyarakat mampu berinovasi dalam menciptakan usaha baru, Job Marketing Fair sebagai upaya memfasilitasi antara dunia usaha dan pencari kerja. Capaian dan target strategi meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana disajikan tabel 4.4. dibawah ini.

Tabel 4.6. Capaian dan target Strategi meningkatkan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja.

No	Indikator	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	% Tenaga kerja yang terserap di dunia kerja baik dalam negeri maupun luar negeri	77 Orang	140 Orang	80 Orang	-	80 Orang

2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	73 Kasus	32 Kasus	75 Kasus		75 Kasus
3	% Angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri (wirausaha)	25 Orang	60 Orang	60 Orang	-	60 Orang

Sumber: Disnakersos Kota Balikpapan

Target sasaran meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021:

- a. Penanganan Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditargetkan 23,91% Jiwa dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 21,91 %. Artinya Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Sasaran Penanganan Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memberikan pengaruh penurunan (-) sebesar 2% pada RKPD Tahun 2017;
- b. Penurunan Tingkat Kemiskinan ditargetkan 2,34 % dari pencapaian *baseline* tahun 2015 adalah 2,35 %. Artinya Capaian Sasaran Kinerja Kesejahteraan Masyarakat terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Penurunan Tingkat Kemiskinan memberikan pengaruh penurunan (-) sebesar 0,01% pada RKPD Tahun 2017;
- c. Persentase pemakaian alat Kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) ditargetkan 65.8% dari pencapaian *baseline* data tahun 2015 sebesar 65.2%;
- d. Peningkatan Indeks Partisipasi Gender (IPG) ditargetkan 90,05 dari pencapaian *baseline* tahun 2015 sebesar 90,05. Artinya Capaian Sasaran Kinerja Kesejahteraan Masyarakat terhadap visi dan misi ke-1 pada indikator Peningkatan Indeks Partisipasi Gender (IPG) tidak memberikan pengaruh karena nilai capaian indikator sasaran sebesar 0% atau pencapaian pada RKPD Tahun 2017 sama dengan pencapaian *baseline* tahun 2015.

Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh adalah:

- a. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan kemiskinan merupakan

permasalahan global.

Pemerintah Kota Balikpapan memiliki perhatian yang penuh dalam penanggulangan kemiskinan yang ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kemiskinan pada tahun 2013 lalu sebanyak 23.700 jiwa. Terdiri dari 7.872 Kepala Keluarga (KK). Jumlah itu meningkat 26,75 persen dari hasil pendataan periode 2011 yang tercatat sebanyak 17.360 warga miskin yang terdiri dari 6.013 KK. Terkait dengan pendataan tersebut, pemerintah kota menurunkan strategi berupa 3 program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015 yakni program Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program bantuan siswa miskin menggunakan dana APBD Kota senilai Rp 6 miliar yang diberikan lewat tabungan siswa SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi serta program bedah rumah sebanyak 60 unit bagi keluarga miskin. Semua program itu diberikan kepada masyarakat yang belum tersentuh program pemerintah. Selain program tersebut untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan Pemerintah Pusat juga mengguyurkan dananya pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional. Capaian dan target dari strategi tersebut dapat dilihat dalam table. 4.7.

Tabel 4.7 Capaian dan target strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dalam RKPD TA.2017

No	Indikator	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	% Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	63.87%	64%	65%	-	66%
2	% Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	100%	100%	100%	-	100%
3	% PMKS miskin yang terlayani	100%	100%	100%	-	100%
4	% Rumah Tangga miskin yang memiliki sarpras dasar rumah sehat	24%	21.91%	10%	-	10%
5	Rumah Tidak Layak Huni	1075	1055	1035	-	1015

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan

b. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Pemerintah Kota Balikpapan dan jajarannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan. Program dan kegiatan dimaksud mengacu pada program pemerintah dalam rangka memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat di Kota Balikpapan.

Program pemerintah yang diberikan kepada lanjut usia, selain itu juga untuk mengubah sikap dan perilaku agar hidup sehat dan mandiri sebagai cerminan peningkatan kesejahteraan lanjut usia khususnya di Kota Balikpapan. Dalam program pemerintah ada beberapa model pelayanan sosial lanjut usia yang berbasis keluarga, yaitu *home care and day care* perawatan lanjut usia dalam keluarga ini mendapatkan bantuan berupa sembako dan pakaian (siang dan malam). Selain itu ada pula pelayanan yang disebut *family support kesejahteraan sosial lanjut usia (FSKSLU)*, program ini teruntuk bagi lansia yang memiliki usaha dan dirawat oleh keluarga yang tidak mampu yang mempunyai dan merawat lanjut usia (LU), ditambah lagi program pemerintah yang disebut ASLUT (*Asisten Sosial Lanjut Usia*) untuk yang satu ini masyarakat yang menjadi rekan dari pemerintah mendapatkan bantuan honor Rp200.000/bulan.

Program dan kegiatan pembangunan keluarga melalui peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan Tribina yaitu BKB, BKR dan BKL. Sedangkan kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui kegiatan Kelompok UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga). Kegiatan Karya Bhakti ini adalah dapat mendinamisasikan pembangunan infrastruktur dan berdaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budidaya Pepaya Miba Borneo sebagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Balikpapan. Capaian dan target strategi tersebut adalah sebagaimana dalam tabel.4.8.

**Tabel.4.8. Capaian dan target strategi Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat**

No	Indikator	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	% PMKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	78.80%	-	13%	-	79.00%
2	% PSKS yang telah dibina	37.96%	26.59%	49.08%	-	50.35%

Sumber: Disnakersos Kota Balikpapan

c. Strategi Pengendalian kependudukan

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Terkait perkembangan tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah dalam pengendalian penduduk terutama ditinjau dari kuantitasnya, karena hal ini akan berdampak terhadap jalannya pemerataan pembangunan.

Pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu aspek penting pembangunan untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas keluarga kecil, yang dilaksanakan melalui pembangunan keluarga berencana bersama dengan pembangunan di berbagai bidang lainnya.

Terkait dengan pengendalian kependudukan di Kota Balikpapan, Pemerintah Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menyusun sistem kependudukan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasi razia KTP bagi penduduk pendatang di Kota

Balikpapan. Selain itu melalui program BPMP2KB terus mencanangkan program pemerintah dalam membangun keluarga yang sejahtera melalui program KB dan sejenisnya. Hal ini memberikan dampak terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan sampai dengan tahun 2014, dimana rata-rata pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan mencapai 5,01% dengan kondisi jumlah 610.313 jiwa mengalami peningkatan dari 599.685 jiwa. (sumber: Balikpapan dalam angka, BPS Balikpapan).

Tabel. 4.9 Capaian dan target strategi pengendalian kependudukan dalam RKPD TA.2017

No	Indikator	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15 - 49 thn)	2.37	2.36	2.33	-	2.31
2	Jumlah institusi masyarakat pendukung program KKBPK (BKB, BKL, BKR, UPPKS)	205	213	229	-	237
3	Jumlah kelompok remaja pendukung KKBPK (PIK RM)	36	41	51	-	56
4	% kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13.45%	10.48%	10.26%	-	10.14%

Sumber: BPMP2KB Kota Balikpapan

- d. Strategi Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender

Pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak

dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa.

Berdasarkan hal diatas, bahwa sangat pentingnya kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam pembangunan bangsa. Terkait hal ini, Pemerintah Kota Balikpapan bersama masyarakat dan stakeholder melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam hal ini, dibangunnya mekanisme kota layak anak, mengangkat kesetaraan gender, mencegah terjadinya permasalahan rumah tangga yang dapat berdampak timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kegiatan dalam mendukung strategi ini adalah BPMP2KB kota Balikpapan meluncurkan layanan Konseling ramah anak dan remaja (Konsera) di kantor BPMP2KB, dengan tujuan membantu masyarakat untuk memecahkan permasalahan dan memberikan solusi yang berkaitan dengan permasalahan dan memberikan solusi berkaitan dengan permasalahan anak dan remaja. Persoalan anak dan remaja makin kompleks hal ini berpengaruh pada perkembangan mental masyarakat. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembentukan Kampung Keluarga berencana (KB) di 5 RT yang ada di Kelurahan Manggar Balikpapan Timur dan Bimbingan Teknik (Bintek) dalam rangka meningkatkan Manajemen Posyandu yang terintegrasi dari sisi kelembagaan dan tata kelola administrasi.

Tabel.4.10. Capaian dan target Strategi Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender

No	Indikator	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	Penilaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	-	Pratama
2	Prosentase Penyelesaian Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	47	60	70	-	80

Sumber: BPMP2KB Kota Balikpapan

4.1.2. Penjabaran Misi Ke-2 pada RKPD Tahun 2017

Misi ke-2 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 memiliki fokus pembangunan utama yaitu **Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Di Huni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman**. Sejalan dengan fokus pembangunan tersebut, dalam pencapaiannya memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Pada Misi Kedua sesuai dengan rancangan awal RPJMD Tahun 2016-2021 dijabarkan atas 1 Tujuan, 2 Sasaran, 4 Strategi, dan 5 Arah Kebijakan yang terdeskripsi pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.11. Penjabaran Misi Ke-2 atas Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan	1 Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang
			2 Mewujudkan <i>clean air, clean water, and clean land</i>	1 Menurunkan dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
	2 Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan	1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan	1 Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perumahan	
			2 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	

				2	Meningkatkan kebersihan, keindahan, kondusifitas, keamanan, dan ketertiban kota	1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas, keamanan, dan ketertiban Kota
--	--	--	--	---	---	---	--

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016 – 2021

Terkait dengan tabel diatas, bahwa Misi Ke-2 memiliki pokok tujuan yaitu meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan. Sehubungan dengan pokok tujuan misi ke-2 memiliki korelasi dalam perwujudan Visi yang terukur atas capaian dalam 2 (dua) sasaran dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang akan dicapai pada RKPDP Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021 adalah meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2107 menjadi 61,49 dari baseline pada tahun 2015 sebesar 60,13.

Adapun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Efisien, Berkelanjutan

Strategi Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Efisien, Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah Kota untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tata ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan mempunyai arti bahwa penataan ruang wilayah dilaksanakan secara tepat, cermat, berdaya guna, dan hasil guna sesuai dengan arah pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, serta menjamin kelestarian dan kelangsungan lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Agar poin efisien dan berkelanjutan dapat tercapai, maka strategi ini memiliki penekanan pada memperkuat dokumen rencana tata ruang sebagai pedoman pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang, menyediakan data dan informasi spasial daerah yang terintegrasi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta kesiagaan dan pencegahan bahaya bencana dan kebakaran.

Capaian sasaran kualitas lingkungan hidup yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017, dipengaruhi oleh pencapaian indikator program pada strategi ini yang merupakan pendorong keberhasilan pada indikator sasaran sebagaimana disajikan tabel berikut.

Tabel 4.12. Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang Efisien dan Berkelanjutan

Indikator	Realisasi Tahun 2015 (n-2)	Target Tahun 2016 (n-1)	Target Tahun 2017 (n)	Realisasi Tahun 2016 (n-1)	Proyeksi Tahun 2018 (n+1)
Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disinsentif)	-	-	1 Perda RDTR	-	-
Persentase Penertiban Pemanfaatan Ruang	98,0%	98,0 %	98,1%	-	98,2%

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan

Pada strategi Perwujudan Tata Ruang Wilayah yang Efisien dan Berkelanjutan untuk tahun 2017 terdapat tambahan indikator kinerja program mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu pada indikator tersedianya Peraturan Daerah untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Insentif dan Disinsentif dimana ditargetkan penyelesaian Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan untuk indikator persentase penertiban pemanfaatan ruang berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPMD 2011-2016) telah memenuhi target capaiannya yang akan terus ditingkatkan capaiannya pada tahun 2017.

b. Mewujudkan Clean Air, Clean Water, Clean Land

Strategi mewujudkan clean air, clean water, clean land merupakan upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik untuk masyarakat demi tercapainya sebuah kota yang layak huni dan berkelanjutan. Berbagai permasalahan lingkungan telah banyak terjadi karena berbagai pihak tidak memikirkan dampak yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang mengeksploitasi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan pengawasan serta pengendalian yang ketat agar mencegah terjadinya perusakan lingkungan Selain itu juga diperlukan

penegakan hukum bagi perusak lingkungan agar memberikan sebuah efek jera dan pengrusakan lingkungan tidak kembali terjadi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui kemudahan masyarakat dalam akses data dan informasi mengenai SDA dan Lingkungan Hidup. Keterbukaan akses data dan informasi ini juga akan mampu meningkatkan peran masyarakat untuk ikut dalam pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta penggalian inovasi masyarakat terkait cara pengelolaan lingkungan. Selanjutnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawas dan pengendali kerusakan lingkungan akan berkontribusi pada upaya pencegahan kerusakan lingkungan terutama dalam hal respon dan tindakan terhadap pengaduan masyarakat.

Capaian sasaran kualitas lingkungan hidup yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017, dipengaruhi oleh pencapaian indikator program pada strategi ini yang merupakan pendorong keberhasilan pada indikator sasaran sebagaimana disajikan tabel berikut.

Tabel. 4.13 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Perwujudan Clean Air, Clean Water, Clean Land

Indikator	Realisasi Tahun 2015 (n-2)	Target Tahun 2016 (n-1)	Target Tahun 2017 (n)	Realisasi Tahun 2016 (n-1)	Proyeksi Tahun 2018 (n+1)
Indeks tutupan lahan (hutan lindung, hutan kota, mangrove, RTH, hutan wisata, taman dan jalur hijau)	60,13	60,81	61,49	-	62,17
Penurunan Indeks Pencemaran Udara	90,84	91,34	91,84	-	92,34
Penurunan Indeks Pencemaran Air	40,30	40,80	41,30	-	41,80
Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya	26,00%	28,57%	45,24%	-	62,00%
Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%
Informasi Lingkungan yang mudah diakses	1	1	1	-	1
Persentase Sekolah Adiwiyata	35,61%	44,51%	48,96%	-	53,41%
Tingkat Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan	83,72%	84,22%	84,72%	-	85,22%
Persentase pengangkutan sampah ke TPA	63,91%	63,41%	62,91%	-	62,41%
Persentase pengolahan sampah di sumber	19,80%	20,80%	21,80%	-	23,80%

Sumber: BLH dan DKPP Kota Balikpapan

Strategi mewujudkan clean air, clean water, clean land, yang di dukung melalui arah kebijakan penurunan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan kebijakan umum Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan Lingkungan, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan. Berdasarkan indikator pada tabel di atas, dapat dilihat upaya pada tahun 2017 untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan Kota Balikpapan baik kualitas tanah, air dan udara.

2. Capaian Sasaran Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021 adalah meningkatkan livable city index pada tahun 2017 menjadi 72,50 dari baseline pada tahun 2014 sebesar 71,12. Livable City Index diperoleh dari survey terhadap persepsi penduduk kota tentang kenyamanan tinggal di kota tersebut yang terdiri dari aspek tata ruang, lingkungan, transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur, ekonomi, keamanan dan sosial. Pada sasaran ini juga merupakan salah satu guna pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Adapun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkelanjutan

Strategi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah Kota untuk mencapai sasaran meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Perkembangan permukiman hendaknya memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan agar tercipta permukiman yang tidak hanya nyaman tetapi juga berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar perumahan serta kesiapsiagaan kawasan permukiman dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang akan terjadi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi ini menekankan pada peningkatan layanan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, pengembangan data dan informasi perumahan dan permukiman, serta meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman.

Capaian sasaran kenyamanan, keamanan, dan ketertiban lingkungan yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017, dipengaruhi oleh pencapaian

indikator program pada strategi ini yang merupakan pendorong keberhasilan pada indikator sasaran sebagaimana disajikan tabel berikut.

Tabel. 4.14 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkelanjutan

Indikator	Realisasi Tahun 2015 (n-2)	Target Tahun 2016 (n-1)	Target Tahun 2017 (n)	Realisasi Tahun 2016 (n-1)	Proyeksi Tahun 2018 (n+1)
Penurunan luasan kawasan kumuh (Ha)	282 Ha	282 Ha	277 Ha	-	272 Ha
Penurunan backlog perumahan (%)	-	50,11%	49%	-	48%
Rumah tidak layak huni	1075	1055	1035	-	1030
Kapasitas air baku (liter/detik)	1,154.28	1,220	1,480	-	1,500
Cakupan layanan air minum (%)	77.20%	77.80%	78.40%	-	79.00%
Cakupan layanan air limbah (%)	91%	92%	93%	-	94%
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	89.81%	89.92%	90.10%	-	90.41%
Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	37.5%	43.75%	62.50%	-	75%
Penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	89%	90%	95%	-	100%
Cakupan pemenuhan kebutuhan dasar korban dampak bencana (%)	87%	90%	95%	-	100%
Cakupan pemulihan perumahan rusak berat dan roboh (%)	50%	55%	60%	-	65%

Sumber: DTKP Kota Balikpapan

Indikator sasaran dan indikator program tersebut menunjukkan bahwa untuk pencapaian indikator digunakan strategi peningkatan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan, yang didukung melalui arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana dasar perumahan, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

b. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang harmonis, berkarakter dan berkebudayaan.

Masyarakat Balikpapan yang heterogen membawa pengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakatnya yang apabila tidak dijaga akan mengakibatkan pergesekan antar suku yang dapat mengganggu kondusifitas kota. Untuk mencegah hal tersebut maka Pemerintah Kota

perlu mendorong masyarakat agar dapat saling menjaga keamanan dan ketertiban bersama sehingga terbentuk karakter yang baik serta berkebudayaan sehingga dapat mengembangkan diri baik di bidang kepemudaan, olahraga, budaya dan keagamaan.

Pemerintah Kota berkewajiban untuk menyediakan sarana prasarana untuk mendukung pengembangan diri masyarakat seperti gedung kepemudaan, gedung olahraga, gedung kesenian dan ruang terbuka hijau serta pembangunan rumah ibadah serta membenahi cagar budaya sebagai pelestarian budaya lokal.

Capaian dan Target Strategi Pengembangan kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Berkarakter dan Berkebudayaan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 4.15 Capaian dan Target Strategi Pengembangan kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Berkarakter dan Berkebudayaan

Indikator		Realisasi Tahun 2015 (n-2)	Target Tahun 2016 (n-1)	Target Tahun 2017 (n)	Realisasi Tahun 2016 (n-1)	Proyeksi Tahun 2018 (n+1)
1	Prosentase Poskamling Aktif	48,62%	49%	49,5%	-	50%
2	Penurunan Angka Kriminalitas	20,09	19,09	18,09	-	17,09
3	Rasio Petugas Linmas	0,8%	1%	1,5%	-	2%
4	Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba	3,23	3,27	3,3	-	3,2
5	Peningkatan Jumlah Pemuda Berprestasi	-	44	45	-	46
6	Peningkatan Prestasi Olahraga	6 Cabor Tk.Prov 18 Cabor Tk.Nasional	6 Cabor Tk.Prov 18 Cabor Tk.Nasional	6 Cabor Tk.Prov 18 Cabor Tk.Nasional	-	6 Cabor Tk.Prov 18 Cabor Tk.Nasional
7	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	97,01%	97,01%	97,01%	-	97,01%
8	Peningkatan event kebudayaan	14 Event (luar 6; Dalam 8)	14 Event (luar 6; Dalam 8)	14 Event (luar 6; Dalam 8)		14 Event (luar 4; Dalam 10)
9	Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	4	6	6		6

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan

Indikator sasaran program yang akan ditargetkan untuk mencapai target indikator sasaran pada RPJMD Tahun 2016-2021 untuk strategi Pengembangan kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Berkarakter dan Berkebudayaan pada RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan prosentase poskamling aktif sebesar 49,5%, dengan capaian 2015 sebesar 48,62%;
- b. Penurunan angka kriminalitas menjadi 18,09 dimana pada tahun 2015 mencapai 20,09;
- c. Peningkatan rasio petugas linmas diharapkan mengalami kenaikan menjadi 1,5% dibandingkan dengan capaian tahun 2015 hanya 0,8%;
- d. Khusus untuk Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba capaian tahun 2015 adalah sebesar 3,23 namun dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan maka diprediksi akan terjadi peningkatan sebesar 0.07 poin menjadi 3,30;
- e. Untuk pemuda berprestasi tidak ada capaian pada tahun 2015 mengingat indikator sasaran program ini baru mulai dimasukkan dalam RPJMD 2016-2021, sehingga target untuk tahun 2017 hanya sebanyak 44 orang;
- f. Peningkatan prestasi olahraga yang ditargetkan adalah 6 cabor untuk tingkat provinsi dan 18 cabor untuk tingkat nasional dimana pada tahun 2015 capaian sebanyak 6 cabor untuk tingkat provinsi dan 18 cabor untuk tingkat nasional;
- g. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga ditargetkan sama dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 97,01%;
- h. Peningkatan event kebudayaan ditargetkan sama dengan capaian tahun 2015 yaitu 14 event dengan rincian 6 event nasional dan 8 event internasional;
- i. Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan ditargetkan sebanyak 6 orang dengan capaian tahun 2015 sebanyak 4 orang.

c. Peningkatan pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.

Pemerintah Kota tidak akan mampu membangun tanpa peran serta masyarakat, sehingga untuk mencapai sasaran pembangunan maka Pemerintah harus membangun jiwa kegotongroyongan masyarakat melalui pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Untuk meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

perwujudan tata pemerintahan yang baik maka pemerintah kota perlu memperkuat dan mengembangkan sistem inovasi daerah dengan mendorong kemandirian masyarakat untuk menciptakan inovasi baru di berbagai bidang. Adapun Capaian dan target strategi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 4.16. Capaian dan Target Strategi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan

Indikator		Realisasi Tahun 2015 (n-2)	Target Tahun 2016 (n-1)	Target Tahun 2017 (n)	Realisasi Tahun 2016 (n-1)	Proyeksi Tahun 2018 (n+1)
1	Nilai Potensi swadaya masyarakat (Dalam Milyaran Rupiah)	89,32	90	91,50		91,50
2	Peningkatan jumlah inovasi daerah	9	10	11		12

Sumber : Bappeda Kota Balikpapan

Indikator sasaran program yang akan ditargetkan untuk mencapai target indikator sasaran pada RPJMD Tahun 2016-2021 untuk strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada RKPD 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Nilai Potensi Swadaya Masyarakat yaitu untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar 91,50 Milyar sedangkan capaian pada tahun 2015 sebesar 89,32 Milyar;
- b. Peningkatan jumlah inovasi daerah ditargetkan sebesar 11 inovasi, dengan capaian pada tahun 2015 sebanyak 9 inovasi.

4.1.3. Penjabaran Misi Ke-3 pada RKPD Tahun 2017

Misi ke-3 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 memiliki fokus pembangunan utama yaitu **Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman di Huni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman**. Sejalan dengan fokus pembangunan tersebut, dalam pencapaiannya memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Pada Misi Ketiga sesuai dengan rancangan awal RPJMD Tahun 2016-2021 dijabarkan atas 1 Tujuan, 2 Sasaran, 1 Strategi, dan 2 Arah Kebijakan yang terdeskripsi pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.17. Penjabaran Misi Ke-3 atas Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan

Misi	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Misi 3: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	1	Meningkatkan pelayanan infrastruktur	1	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1	Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	1	Menyediakan infrastruktur transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah Kota Balikpapan
							2	Mewujudkan infrastruktur yang nyaman dan berkualitas

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016-2021

Terkait dengan tabel diatas, bahwa Misi Ke-3 memiliki pokok tujuan yaitu meningkatkan pelayanan infrastruktur. Sehubungan dengan pokok tujuan misi ke-3 memiliki korelasi dalam perwujudan Visi yang terukur atas capaian dalam 1 (satu) sasaran yakni Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur. Target yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021 adalah meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar pada tahun 2017 menjadi 75 dari baseline pada tahun 2014 sebesar 73,40 atau dalam kategori baik. Mengingat tidak adanya hasil survey kepuasan infrastruktur di Kota Balikpapan pada Tahun 2015, maka sebagai baseline digunakan hasil penilaian Most Livable City Index oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) untuk Kota Balikpapan pada tahun 2014 yaitu pada aspek persepsi masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana dengan indeks kenyamanan sebesar 73,40.

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur atas pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan. Indeks pengukuran infrastruktur secara agregat yang merupakan penjumlahan dari masing-masing infrastruktur setelah dibobot ($S = (Total\ Index\ type\ A + B + C + D + E) / n$) dapat dikelompokkan skala penilaian berikut ini:

ASUMSI PENILAIAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR (IKLI)			
NILAI INDEKS	RENTANG NILAI		KETERANGAN
1	0 - 10	0 - 20	Buruk
2	11 - 20		
3	21 - 30	21 - 40	Sedang
4	31 - 40		
5	41 - 50	41 - 60	Cukup
6	51 - 60		
7	61 - 70	61 - 80	Baik
8	71 - 80		
9	81 - 90	81 - 100	Baik Sekali
10	91 - 100		

Adapun strategi adalah dengan mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan wilayah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Dalam hal ini pembangunan infratraktur yang dimaksudkan adalah jalan dan transportasi yang akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas harus didukung dengan upaya pengembangan data dan informasi infrastruktur melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Dengan adanya data dan informasi yang valid mampu memberikan data yang akurat terkait kondisi pemerataan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga diperlukan penguatan dalam prosedur percepatan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar infrastruktur yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dapat ditangani dengan segera. Selanjutnya juga dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang berkualitas juga diperlukan sosialisasi kepada pengguna dalam hal keselamatan dan ketertiban.

Capaian sasaran infrastruktur yang handal yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017, dipengaruhi oleh pencapaian indikator program pada strategi ini yang merupakan pendorong keberhasilan pada indikator sasaran sebagaimana disajikan tabel berikut.

Tabel. 4.18 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Perwujudan Pemerataan Infrastruktur yang Berkualitas

Indikator	Realisasi Tahun 2015 (n-2)	Target Tahun 2016 (n-1)	Target Tahun 2017 (n)	Realisasi Tahun 2016 (n-1)	Proyeksi Tahun 2018 (n+1)
Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan	1.415	1.422	1.436	-	1.450
Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	20%	20%	20%	-	40%
Jumlah Koridor SAUM	1	1	1	-	2
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek	93,63%	95%	96%	-	97%
Kemantapan Jalan	79,07%	79,13%	79,15%	-	79,65%
Persentase penyediaan rambu jalan	21,95%	27,30%	27,30%	-	32,30%
Persentase Penyediaan Titik Zona Aman Sekolah	11,11%	16,67%	22,22%	-	33,33%
Menurunnya Titik Banjir	50	49	47	-	46
Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	42,40%	43,15%	44,09%	-	45,03%
% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar bagi warga berkebutuhan khusus	5,92%	6,60%	7,29%	-	7,98%
Rasio Penyediaan Jalur Sepeda	63,91%	63,41%	62,91%	-	62,41%
Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor	51,52%	55%	60%	-	65%

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan

Indikator sasaran dan indikator program tersebut menunjukkan bahwa untuk pencapaian indikator digunakan strategi perwujudan pemerataan infrastruktur yang berkualitas, yang didukung melalui arah kebijakan penyediaan infrastruktur transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah Kota Balikpapan.

4.1.4. Penjabaran Misi Ke-4 pada RKPD Tahun 2017

Misi ke-4 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 memiliki fokus pembangunan utama yaitu **Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif**. Sejalan dengan fokus

pembangunan tersebut, dalam pencapaiannya misi ini dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Pada Misi Keempat sesuai dengan rancangan awal RPJMD Tahun 2016-2021 dijabarkan atas 2 Tujuan, 2 Sasaran, 6 Strategi dan 11 Arah Kebijakan yang terdeskripsi pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.19. Penjabaran Misi ke-4 atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif	1 Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat	1 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	1 Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	1 Meningkatkan nilai tambah produksi Industri
				2 Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan Koperasi yang mandiri
			2 Meningkatkan kelancaran distribusi/pemasaran dan pengamanan perdagangan	3 Pengembangan jaringan distribusi/pemasaran dan keamanan perdagangan
	2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	2 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	3 Pengembangan ekowisata	4 Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata berwawasan lingkungan
			4 Menciptakan dan mengembangkan kemudahan berinvestasi	5 Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global
			5 Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan	6 Meningkatkan produksi pertanian
				7 Meningkatkan sarana prasarana pertanian
				8 Meningkatkan produk unggulan perkebunan
				9 Meningkatkan produksi hasil peternakan

						10	Meningkatkan produksi perikanan
				6	Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan	11	Peningkatan dan pengembangan energi baru terbarukan

Sumber: Rancangan awal RPJMD Tahun 2016 – 2021

Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi 4 dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1.1. Tujuan: Menggerakkan Sendi-sendi Perekonomian Masyarakat

Salah satu tujuan dari misi 4 adalah menggerakkan Sendi-sendi Perekonomian Masyarakat. Perkembangan perekonomian kota sangat tergantung pada pergerakan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah perlu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dengan menciptakan kreatifitas yang dapat menimbulkan nilai tambah bagi usaha masyarakat. Kreatifitas usaha yang tercipta dalam konsep ekonomi kreatif, yakni mengembangkan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan daya inovasi dan kreasi masyarakat melalui pemanfaatan sumber-sumber potensial masyarakat dan sumber daya alam yang terbarukan. Peningkatan aktifitas sendi ekonomi masyarakat dapat menjadi dasar peningkatan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu perlu didorong upaya diversifikasi ekonomi kreatif sehingga dapat pula membentuk dan mewujudkan *branding* perekonomian sebagai identitas yang khas kota Balikpapan.

Sendi-sendi perekonomian masyarakat diharapkan dapat bersinergis, yakni merupakan wujud dari keterkaitan antara hulu dan hilir aktifitas ekonomi, sehingga perekonomian yang ada saling mendukung dan pada akhirnya akan dapat menambah nilai jual ekonomi itu sendiri. Untuk meningkatkan kreatifitas ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan SDM yang berjiwa entrepreneur, berdaya saing dan kreatif. Dengan SDM berjiwa entrepreneur, berdaya saing dan kreatif akan dapat menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing dalam menghadapi pasar bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sehingga dengan demikian perekonomian dapat berkembang yang pada akhirnya diharapkan output secara makro adalah **terciptanya pemerataan pendapatan di masyarakat** Kota Balikpapan

yang dapat dinikmati semua golongan.

Sasaran dari tujuan diatas adalah meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Target dari sasaran tersebut yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021 yaitu:

- a. Peningkatan PDRB perkapita yang ditargetkan sebesar **Rp137,51 Juta dari pencapaian baseline tahun 2015 adalah Rp.122,46 Juta**. Artinya, capaian kinerja PDRB Perkapita pada tahun 2017 ditargetkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB Perkapita semakin baik pula tingkat perekonomian, dengan adanya penambahan output dari produksi barang dan jasa. Namun demikian ukuran ini belum dapat menggambarkan kenyataan karena harus pula dilihat dari jumlah penduduk miskin dan pengangguran, sehingga belum sepenuhnya mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk yang tergambar dari indeks Gini Ratio. PDRB Perkapita yang meningkat pada tahun 2017 menunjukkan nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Kota Balikpapan sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku yang memperlihatkan tren yang positif.
- b. Indeks Gini Ratio tahun 2017 ditargetkan **sama dengan pencapaian baseline tahun 2015 yaitu sebesar 0,34**. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Balikpapan masih tergolong kategori sedang. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya diupayakan adanya penurunan indeks Gini ratio sesuai dengan target Indikator RPJMD, sehingga komposisi yang menikmati pemerataan pendapatan adalah golongan bawah dan menengah.

Terkait capaian Sasaran meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat pada Indikator **peningkatan PDRB perkapita** dengan peningkatan sebesar Rp15,04 Juta dan Indikator Sasaran Penurunan Indeks Gini dengan indeks 0,34, untuk pencapaian 2 indikator tersebut, digunakan strategi dan arah kebijakan pada RKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Strategi Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi didasarkan pada pendekatan Penguatan SDM dan IPTEK pelaku usaha, mempersiapkan sarana prasarana, meningkatkan kemandirian koperasi, menjadikan UMKM mandiri, Pengembangan kawasan/sentra industri. Diharapkan dengan pendekatan tersebut dapat tercipta kualitas dan kuantitas produk, diversifikasi usaha, usaha kreatif, usaha yang berdaya

saing sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk yang dapat diterima di pasar bebas yang pada akhirnya pergerakan ekonomi masyarakat dapat tumbuh.

Capaian dan target strategi Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.20. Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Realisasi Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Realisasi Renstra SKPD	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1 Persentase IKM menerapkan teknologi industri	15%	15%	17%	-	19%
2 Pertumbuhan IKM	852	862	872		882
3 Prosentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT)					
a. KIK	19%	23%	24%		25%
b. SIKS	50%	60%	65%		70%
c. SIKT	0%	0%	5%		10%
4 Industri yang beroperasi (SIKS+SIKT)	75	75	89		98
5 Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	7%	7%	5%		7%
6 Jumlah KUKM yang bermitra dengan perusahaan	50	100	125		135
7 Persentase Jumlah Koperasi aktif	77,6%	78,1%	78,7%		79,2%
8 Jumlah kredit UMKM dari Bank (Rp.jt)	8.333.935	8.750.632	9.188.163		9.647.572
9 Jumlah Pengurus/ pengawas / pengelola Koperasi bersertifikasi	60	60	60		60

Sumber: Disperindagkop Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator program sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPJMD) telah memenuhi target capaiannya, sehingga secara persentase pencapaian terukur untuk tiap indikator sampai dengan periode IV RPJMD sebesar 100% (hasil evaluasi RPJMD tahun 2016). Sehubungan dengan pencapaian pada indikator program diatas, pada RKPD tahun 2017 indikator program yang

sama dituangkan pada rancangan awal RPJMD tahun 2016-2021 sebagaimana tersaji pada table 4.20.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antara lain, melalui:

- Program peningkatan kemampuan teknologi industri. Diharapkan setiap pelaku usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri yang dapat mendukung penciptaan efisiensi dan peningkatan nilai produksi;
- Program pengembangan industri kecil dan menengah. Diharapkan program tersebut akan didukung dengan kegiatan-kegiatan yang outputnya meningkatkan jumlah IKM yang berkualitas dan menghasilkan produk yang berkualitas pula;
- Program penataan struktur industri, diharapkan akan mewujudkan industri yang terpadu berwawasan lingkungan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan meningkatkan jumlah usaha di kawasan dan sentra Industri yang beroperasi (Kawasan Industri Kariangau, Sentra Industri Kecil Sumber dan Sentra Industri Kecil Teritip);
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan;
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, diharapkan dapat meningkatkan jumlah koperasi aktif sebagai penggerak perekonomian masyarakat;
- Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, diharapkan dampak program tersebut mampu meningkatkan jumlah kredit UMKM dari Bank sebagai modal pengembangan berusaha dan Bergeraknya investasi;
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, diharapkan program ini mampu menciptakan jumlah pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang berkualitas guna menggerakkan, menjalankan dan mengembangkan koperasi tersebut.

b. Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan

Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan didasarkan pada pendekatan memperkuat sarana prasarana jaringan distribusi, menyiapkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga, mengembangkan kapasitas dan kualitas logistik perdagangan dan sarana distribusi, pengembangan kelembagaan dan pelaku usaha distribusi

perdagangan, dan meningkatkan kualitas keamanan barang.

Di Kota Balikpapan 95% kebutuhan barang dipenuhi dari luar kota Balikpapan yang berarti sangat tinggi ketergantungannya dari daerah lain. Diharapkan dengan pendekatan tersebut Kota Balikpapan dapat menjaga stabilitas harga dan menjaga ketersediaan stok barang guna mencukupi kebutuhan barang dan keterjaminan keamanan suatu barang kebutuhan masyarakat di Kota Balikpapan.

Capaian dan target strategi “Strategi meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan” yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.21. Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan

Indikator	Realisasi Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Realisasi Renstra SKPD	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)					
2 Laju Inflasi	6,26	<2 digit	5 ₊ 1	-	5 ₊ 1
3 Nilai ekspor bersih (Milyar dollar)	1,51	3,25	1,97		2,22
4 Cakupan unit usaha dagang	82	120	100		110
5 % pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	26%	28%	30%	-	32%
5 % Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang	50%	55%	61%		67%
6 % pasar berklasifikasi A	0%	0%	11,11%		11,11%
7 Nilai pasar terhadap penilaian adipura	70,63	71	71,5	-	72

Sumber: Disperindagkop Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator program sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPJMD) telah memenuhi target capaiannya, sehingga secara persentase pencapaian terukur untuk tiap indikator sampai dengan periode IV RPJMD rata-rata sebesar 100% (hasil evaluasi RPJMD tahun 2016), terkecuali untuk indikator nilai ekspor yang ditarget tidak mencapai 100%. Hal ini dapat diasumsikan secara realistis bahwa di Kota Balikpapan distribusi produk kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar kota dan produk yang diekspor melalui pelabuhan dan bandara merupakan produk dari daerah hinterland,

bukan produk dari Kota Balikpapan sendiri. Sehubungan dengan pencapaian target pasar yang berklasifikasi A, semula pada tahun 2015 ditargetkan 11,11 % atau terdapat satu pasar yaitu Pasar Pandan Sari terjadi musibah kebakaran pada tahun 2015 sehingga Kota Balikpapan belum memiliki pasar yang berklasifikasi A. Selanjutnya dengan pencapaian pada indikator program pada RPJMD Tahun 2011-2016, pada RKPD tahun 2017 indikator program yang sama dituangkan pada rancangan awal RPJMD tahun 2016-2021 sebagaimana tersaji pada tabel tersebut.

Langkah-langkah yang akan ditempuh melalui strategi meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan, antara lain adalah:

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan, diharapkan setiap pelaku usaha IKM mampu menerapkan teknologi industri yang dapat mendukung menciptakan efisiensi dan peningkatan nilai produksi;
- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, diharapkan kedua program tersebut dapat mewujudkan strategi untuk menjaga stabilitas harga dan kebutuhan pangan serta meningkatkan keamanan pangan di Kota Balikpapan;
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program tersebut diharapkan dapat menambah nilai produk yang akan diekspor yang nanti dapat memberi kontribusi perkembangan perekonomian di Kota Balikpapan;
- Program Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri, diharapkan akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki usaha dengan produk terstandarisasi dan terciptanya perlindungan bagi konsumen dengan upaya peningkatan kegiatan tera/tera ulang terhadap alat ukur wajib tera;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar, dengan program ini diharapkan tercipta pasar yang berkualitas dan tertata serta meningkatkan jumlah pedagang yang berusaha didalam pasar;
- Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar, diharapkan pasar rakyat dapat mewujudkan kondisi pasar yang bersih, nyaman dan mendukung salah satu kriteria penilaian adipura serta mampu bersaing dengan toko swalayan.

1.2. Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi akan menghasilkan perbaikan ekonomi, tetapi berimplikasi lain terhadap sosial dan lingkungan misalnya meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu meningkatkan pertumbuhan produksi dengan penerapan ekonomi hijau diharapkan akan menghasilkan perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Sasaran dari tujuan diatas adalah **Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan**. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021 yaitu:

- Target capaian RKPD pada indikator meningkatkan nilai PDRB non migas adalah Rp40.58 trilyun dari pencapaian baseline tahun 2015 yaitu Rp40,21 trilyun;
- Target capaian RKPD pada indikator jumlah sumber energi terbarukan adalah pengembangan terhadap 2 sumber energi baru terbarukan yang telah ada pada baseline tahun 2015.

Terkait capaian Sasaran meningkatkan nilai PDRB non migas dengan peningkatan sebesar 0,37 trilyun dan pengembangan sumber energi terbarukan, untuk pencapaian 2 indikator tersebut digunakan strategi dan arah kebijakan pada RKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Strategi Pengembangan Ekowisata

Posisi Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur menjadi salah satu peluang yang menjadikan Kota Balikpapan semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik regional, nasional maupun internasional. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan, peningkatan dan promosi destinasi wisata di kota Balikpapan. Bentuk promosi yang digunakan bisa berbentuk brosur, souvenir, website ataupun mengikuti even-even yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu upaya yang perlu terus ditingkatkan adalah dengan melakukan kerjasama dengan para pelaku usaha pendukung pariwisata seperti perhotelan, rumah makan, kafe, travel agen dan usaha-usaha lainnya. Semua usaha diatas bila berjalan dengan baik pada akhirnya akan berimplikasi langsung terhadap

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Berikut capaian dan target strategi ini sebagaimana dalam tabel 4.1

Tabel 4.22 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Pengembangan Ekowisata

Indikator		Realisasi Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Realisasi Renstra SKPD	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.253.943	2.253.943	2.299.022		2.345.002
2	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	28 destinasi	28 destinasi	30 destinasi	-	32 destinasi
3	Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan	5 obyek wisata	5 obyek wisata	7 obyek wisata		8 obyek wisata
4	Jumlah asosiasi yang bermitra	5 asosiasi	5 asosiasi	6 asosiasi	-	

Sumber: Disporabudpar Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator program sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPJMD) telah memenuhi target capaiannya, sehingga secara persentase pencapaian terukur untuk tiap indikator sampai dengan periode IV RPJMD sebesar 100% (hasil evaluasi RPJMD tahun 2016). Sehubungan dengan pencapaian pada indikator program diatas, pada RKPD tahun 2017 indikator program yang sama dituangkan pada rancangan awal RPJMD tahun 2016-2021 sebagaimana tersaji tabel di atas.

Langkah-langkah yang akan ditempuh melalui strategi Pengembangan Ekowisata, antara lain adalah:

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk pengembangan pemasaran pariwisata antara lain pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri, cetak brosur informasi pariwisata dan souvenir, pemutakhiran website pariwisata

dan operasional *tourism center* di bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan serta menunjang operasional *Balikpapan Tourism Board (BTB)*. Melalui program ini diharapkan potensi pariwisata yang ada di Kota Balikpapan makin dikenal oleh calon wisatawan lokal maupun internasional;

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;

Untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di Kota Balikpapan, Pemerintah Kota akan fokus melakukan pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata yang ada di Kota Balikpapan. Dengan meningkatnya sarana dan prasarana di obyek wisata diharapkan pelayanan kepada pengunjung semakin baik yang akhirnya akan meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pariwisata.

- Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata;

Pemerintah Kota terus melakukan upaya pengembangan obyek wisata khususnya wisata alam unggulan seperti mangrove center, enclosure Beruang Madu Km.23, Pantai Manggar Segara Sari dan kebun raya Balikpapan. Selain itu pengembangan wisata bahari dan pelaksanaan pesta laut dan pesta rakyat skala nasional secara rutin diharapkan dapat menunjang target Balikpapan sebagai kota destinasi pariwisata nasional bahkan internasional.

- Program pengembangan kemitraan;

Pengembangan usaha pariwisata di Kota Balikpapan masih menemui kendala antara lain masih kurangnya karyawan/pekerja hotel/ restoran dan usaha perjalanan wisata yang memiliki ijazah akademi/sekolah tinggi pariwisata serta keterbatasan skill pariwisata. Untuk itu Pemerintah Kota melakukan upaya seperti pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, pelatihan pelayanan dan sertifikasi kompetensi bagi karyawan hotel di Kota Balikpapan dan pengembangan profesionalisme sumber daya manusia bidang pariwisata. Melalui program ini diharapkan tersedia SDM pariwisata yang handal serta terciptanya sinergitas yang baik antara Pemerintah Kota dengan para pelaku usaha pariwisata di Kota Balikpapan.

b. Strategi Menciptakan dan Mengembangkan Kemudahan Berinvestasi

Strategi menciptakan dan mengembangkan kemudahan berinvestasi didasarkan pada pendekatan dan cara menerapkan regulasi kemudahan

investasi, membangun iklim investasi daerah yang kondusif, dan reformasi kebijakan perizinan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pendekatan tersebut nanti akan berdampak pada meningkatkan rencana dan realisasi investasi yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan PDRB Perkapita di Kota Balikpapan.

Capaian dan target strategi Strategi menciptakan dan mengembangkan kemudahan berinvestasi yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.23. Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Menciptakan dan Mengembangkan Kemudahan Berinvestasi

Indikator	Realisasi Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Realisasi Renstra SKPD	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1 IKM pelayanan perizinan	87,59	88	88,5		89
2 % sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online	6%	11%	17%		23%
3 Rencana investasi (Triliun)	36,25	5	10		10
4 Realisasi Investasi (Triliun)	18.88	5	5		5
5 % kepatuhan perizinan usaha	50%	55%	65%		70%

Sumber: BPMP2T Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa capaian indikator program sampai dengan tahun 2015 (periode IV RPJMD) telah memenuhi target capaiannya, sehingga secara persentase pencapaian terukur untuk tiap indikator sampai dengan periode IV RPJMD sebesar 100% (hasil evaluasi RPJMD tahun 2016). Sehubungan dengan pencapaian pada indikator program diatas, pada RKPD tahun 2017 indikator program yang sama dituangkan pada rancangan awal RPJMD tahun 2016-2021 sebagaimana tersaji pada tabel diatas.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Strategi Menciptakan dan Mengembangkan Kemudahan Berinvestasi, antara lain melalui:

- Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan, diharapkan mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan, yang pada akhirnya dapat mendorong keinginan investor untuk berinvestasi di Kota Balikpapan;

- Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan, program ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online sehingga pelaku usaha dalam mengurus perizinan dapat memonitor proses perizinan tersebut. Diharapkan pula dari program ini dapat meningkatkan minat investor baik PDMA maupun PMA semakin meminati berinvestasi di Kota Balikpapan;
 - Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, diharapkan program tersebut dapat menarik keinginan investor guna berusaha dan menanamkan investasi dengan melakukan kegiatan pertemuan/gathering antara pengusaha dengan pemerintah kota sehingga dapat dilihat jumlah rencana investasi;
 - Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan, diharapkan memudahkan Pemerintah Kota dalam melakukan pengawasan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha terhadap perizinan usahanya;
 - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, diharapkan melalui kegiatan promosi dan menjalin kerjasama investasi yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri, memberikan dampak bukan hanya sekedar rencana investasi tetapi benar-benar investasi yang akan dilakukan di kota Balikpapan dapat terealisasi.
- c. Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

Pertanian dan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dengan merujuk permasalahan dan pentingnya menjaga pertanian menuju kemandirian pangan, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengembangan pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan perluasan produksi dengan memanfaatkan potensi geografis wilayah dan sumber daya manusia yang terintegrasi dan sinergis dalam sektor pertanian. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, kawasan peruntukan pertanian terdapat di Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas kurang lebih 325 ha yang meliputi kawasan sawah lestari seluas 130 ha dan kawasan potensi pertanian seluas 195 ha. Kawasan peruntukan pertanian tanaman

hortikultura terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 1,591 ha. Kawasan peruntukan perkebunan terdapat di sebagian Kelurahan Manggar, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur seluas 2.045 ha. Kawasan peruntukan peternakan di sebagian Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas 100 ha.

Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdiri dari daerah penangkapan ikan 0-2 mil seluas 7.642 ha dan daerah penangkapan ikan >2 mil dengan luas 27.896 ha yang berada di sepanjang laut dan pesisir Kecamatan Balikpapan Timur. Kawasan peruntukan perikanan budidaya seluas 579 ha yang terdiri dari revitalisasi kawasan perikanan budidaya darat di sekitar Sungai Sumber, Sungai Manggar, dan pesisir Kelurahan Teritip seluas 545 ha, sementara kawasan perikanan budidaya laut terletak di wilayah laut dan pesisir Pantai Manggar hingga Sungai Aji Raden seluas 1.804 ha. Berikut capaian dan target strategi ini sebagaimana dalam tabel 4.24.

Tabel 4.24 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Indikator		Realisasi Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Realisasi Renstra SKPD	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	Jumlah produksi padi (ton)	626	491	500		515
2	Jumlah produksi palawija (ton)	12.071	9386	400	-	500
3	Jumlah produksi hortikultura (buah buahan) (ton)	28.745	283,50	493		567
4	Jumlah produksi hortikultura (sayuran) (ton)	52.369	52.657	52	-	55
5	Jumlah produksi hortikultura (tanaman hias) (tangkai)	74.531	82.000	85000	-	85000
6	Jumlah sarana & prasarana pertanian	105		8		

Indikator		Realisasi Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Realisasi Renstra SKPD	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
7	Jalan usaha tani (km)	0	0	0		2
8	persentase kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	55,00		10	-	10
9	Produksi lada (ton)			4,08		4,28
10	Produksi karet (ton)	5293	7598			
11	Produksi kelapa (ton)	2.231.100		222,26		233,38
12	% produksi ternak	10	10	10		33
13	% pemasaran produk peternakan yang memenuhi keamanan pangan	50	50	62		72
14	% Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ ternak	50	50	65		75
15	produksi perikanan tangkap (ton)	3477,8	3167,8	3651,7		3834,3
16	jumlah alat perikanan tangkap yang ramah lingkungan	493	305	50		50
17	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	207,1	239,5	227,8		250,6
18	produksi Benih Ikan Air Tawar	282.000	600.000	660.000		690.000

Sumber: DPKP Kota Balikpapan

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk Strategi Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, antara lain adalah:

- Program Peningkatan Produksi Pertanian;

Untuk meningkatkan produksi pertanian di Kota Balikpapan, *Intensifikasi dan Mekanisasi* pertanian melalui pemilihan bibit unggul, pemupukan, irigasi yang baik, mencegah gangguan hama, pengembangan tanaman hortikultura, pembinaan teknologi tepat guna, pengembangan tanaman palawija (jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian) dan lain sebagainya merupakan upaya yang akan ditempuh mengingat maraknya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan

terbangun. Capaian produksi padi tahun 2015 adalah sebesar 626 ton dan palawija sebesar 12.071 ton. Selain memproduksi padi dan palawija, Kota Balikpapan juga memproduksi sayur-sayuran dan buah-buahan. Produksi terbesar sayur-sayuran adalah kangkung yaitu sebanyak 67.097 ton. Produksi sayuran terbanyak kedua yaitu sawi sebanyak 61.324 ton. Adapun komoditi potensial lainnya yang akan terus dikembangkan yaitu bawang, cabe, kacang panjang, bayam, buah naga, nenas, pisang dan lain-lain;

- Program Peningkatan Produksi Perkebunan;

Komoditas perkebunan yang dikembangkan di Kota Balikpapan meliputi perkebunan karet, kelapa, lada, dan komoditas perkebunan lainnya. Luas areal komoditi perkebunan di Kota Balikpapan mencapai kurang lebih 5.712 Ha dengan rincian komoditi karet seluas 4.498 Ha, kelapa dalam seluas 1.085 Ha, lada seluas 16 Ha dan komoditi lainnya seluas 113 Ha. Pemerintah Kota akan melakukan bimbingan dan pelatihan tenaga kerja di bidang perkebunan dan pengaplikasian teknologi pertanian serta pengendalian OPT/hama agar produksi perkebunan dapat meningkat;

- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

Kota Balikpapan masih bergantung pada kota lain untuk komoditi peternakan konsumsi masyarakat. Untuk ternak sapi, rata rata dalam setahun mendatangkan dari Kota atau Provinsi lain sebesar 13.535 ekor dan ayam pedaging sebesar 3.360.100 ekor. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan produksi ternak di Kota Balikpapan melalui pengembangan pembibitan ternak sapi dan ayam ras pedaging serta komoditi ternak yang lain seperti kambing khususnya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Balikpapan;

- Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan;

Seiring dengan program peningkatan produksi peternakan, program peningkatan pemasaran dapat dikembangkan melalui promosi hasil budidaya peternakan dan peningkatan kualitas masyarakat penyedia bahan pangan asal hewan dan industri pengolahannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat lokal, potensi ini juga dapat menjadi komoditas ekspor;

- Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit hewan/ternak;

Program ini meliputi pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit hewan/ternak razia daging dan pemotongan sapi di Luar RPH serta

peningkatan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan (Puskeswan) yang ada di Kota Balikpapan. Melalui program ini diharapkan kualitas daging yang dihasilkan dari peternakan memenuhi standar keamanan dan kelayakan untuk dikonsumsi;

- Program pengembangan perikanan tangkap;

Potensi komoditas perikanan di Kota Balikpapan didominasi oleh kegiatan penangkapan. Hal ini dikarenakan luasnya area tangkapan laut di sekitar Kota Balikpapan serta cukup banyaknya SDM nelayan serta ketersediaan alat tangkap. Oleh karena itu untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, Pemerintah Kota terus melakukan pengembangan teknologi penangkapan ikan dan peningkatan keterampilan nelayan melalui pengenalan-pengenalan teknologi. Dengan penggunaan teknologi diharapkan hasil tangkap para nelayan di sekitar Balikpapan dapat maksimal. Namun penggunaan teknologi juga harus mempertimbangkan kondisi ekosistem laut. Pemahaman akan pentingnya ekosistem laut juga harus ditanamkan pada pola pikir nelayan setempat. Selain itu upaya peningkatan produksi perikanan tangkap juga dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan dermaga perikanan serta penyediaan prasarana stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan dan pabrik batu es di kawasan TPI/PPI Manggar;

- Program pengembangan perikanan budidaya.

Pengembangan komoditas perikanan budidaya di Kota Balikpapan menghadapi kendala antara lain kurangnya tenaga pembudidaya baik tambak maupun kolam serta kurangnya ketersediaan bibit. Karena itu untuk meningkatkan hasil produksi perikanan budidaya, Pemerintah Kota melakukan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi, pengembangan dan peningkatan sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI) Teritip serta menggalakkan kegiatan budidaya kolam di pekarangan.

d. Strategi Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.

Energi telah menjadi kebutuhan dasar yang memainkan peran penting dalam perkembangan perekonomian nasional dan global. Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi fosil yang berasal dari impor untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Sementara penggunaan sumber energi baru terbarukan hanya sekitar 6% dan selebihnya yaitu sekitar 94% berasal dari energi fosil. *(sumber Kemen.ESDM-RI)*.

Potensi bioenergi (limbah pertanian, kotoran hewan, sampah kota, biomassa) yang tersedia di seluruh Indonesia sangat prospektif untuk dikembangkan baik sebagai listrik dan non listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi. Namun demikian sebagian besar pembangkit listrik tenaga berdasarkan fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berlebih. Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Balikpapan adalah memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomiannya.

Potensi energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan di Kota Balikpapan yaitu:

- Biomassa;
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
- Pembangkit Listrik Tenaga Angin;

Penggunaan energi biomassa adalah pilihan prioritas yang memiliki nilai kelayakan investasi yang paling ekonomis diantara alternatif yang lainnya. Selain itu, bahan baku utamanya (sampah organik) yang mudah didapat dan sejak tahun 2012 penggunaan gas methane telah dikembangkan untuk melayani kebutuhan listrik warga di sekitar lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Manggar. Pada tahun 2015 telah dilakukan kajian Teknis Pengelolaan Sampah Pasar Pandansari dimana sampah yang dihasilkan oleh Pasar Pandansari memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas yang dapat dikonversi menjadi listrik. Berikut capaian dan target strategi ini sebagaimana dalam tabel 4.4

Tabel 4.25. Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Indikator		Realisasi SKPD	Target SKPD	Target SKPD	Realisasi SKPD	Proyeksi
		Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1	Pemanfaatan Biomassa (UNIT)	153	162	179		216
2	% PJU yang menggunakan LED	5,98	22,19	30,2		37,94
3	% PJU yang menggunakan meterisasi	22,32	30,46	38,33		45,93

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan

Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk Strategi Meningkatkan Pemanfaatan Energi baru Terbarukan, antara lain adalah:

- Program Pemanfaatan Biomassa:

Pemanfaatan gas methane di Kota Balikpapan dilakukan di TPA sampah Manggardan sampai dengan bulan Mei 2015 jumlah rumah tangga di sekitar lokasi TPA (RT.36 dan RT.61 Kelurahan Manggar) yang memanfaatkan gas methane sebanyak 153 SR. Untuk pemanfaatan biogas di pasar Pandansari, pada tahun 2015 telah diselesaikan DED Sarpras pemanfaatan sampah pasar Pandansari untuk biogas, dimana potensi produksi biogas dari sampah organik di Pasar Pandansari relatif besar yaitu sekitar 402 m³ perhari setara dengan 185 kg gas elpiji. Biogas yang dihasilkan akan membantu kebutuhan energi/menjadi alternatif energi bagi pasar Pandansari. Memperhatikan hal tersebut Pemerintah Kota akan terus melakukan inovasi dan pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan dan ditargetkan teknologi ini dapat diimplementasikan di seluruh pasar di kota Balikpapan;

- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;

Kegiatan untuk program ini yaitu penerapan lampu LED dan meterisasi untuk seluruh PJU di Kota Balikpapan. Penggunaan lampu LED yang telah terbukti dapat mengoptimalkan penerangan jalan Kota dan efisien dalam penggunaan energinya, secara bertahap ditargetkan akan diterapkan untuk seluruh PJU yang ada di Kota Balikpapan.

4.1.5. Penjabaran Misi Ke-5 pada RKPD Tahun 2017

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda pokok yang tak terpisahkan dari otonomi daerah. Sebab otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mandiri dalam memajukan masyarakatnya secara demokratis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, membutuhkan birokrasi yang reformis, efisien, kreatif, inovatif, profesional dan yang mampu menjawab tantangan perubahan.

Reformasi birokrasi sebagai alat merupakan sarana untuk membuat sistem administratif menjadi instrumen yang lebih efektif bagi perubahan sosial, serta instrumen yang lebih baik untuk menciptakan persamaan politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sebagai sebuah proses, reformasi birokrasi dapat dilihat sebagai berubahnya praktik-praktik, tingkah laku, dan struktur birokrasi yang telah mampan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan *good governance* (tata kelola

pemerintahan yang baik).

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. *Good governance* sering diartikan sebagai indikator terealisasinya reformasi birokrasi dengan terpenuhinya prinsip-prinsip, partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian kepada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Implementasi pemerintahan yang baik telah termasuk pada 9 Program Prioritas Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021. Adapun program prioritas sebagai berikut:

1. E-Nyaman

Penyediaan *website* tunggal dalam pelayanan semua perizinan dan penyampaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan; (E-Perijinan dan E-Musrenbang)

2. Nyaman Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Lapangan Kerja

Antisipasi dan penciptaan peluang masyarakat Kota Balikpapan terhadap berlakunya MEA di Kota Balikpapan serta menjaga ketersediaan lapangan kerja untuk masyarakat Balikpapan;

3. Nyaman Lingkungan dan Sosial

- Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kelurahan dan Pengurus RT yang berprestasi mendapatkan dukungan insentif pembangunan;
- Pembangunan Taman 3 Generasi di tiap Kecamatan;
- Mewujudkan Kota Layak Anak dan Layak Lansia;
- Mewujudkan Kota Sehat yang Sehat, Bebas Narkoba dan HIV/AIDS;
- Pembangunan Pusat Keagamaan dan Taman Rohani;

4. Nyaman MICE

Dalam mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka dalam penyelenggaraan MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) karena menjadi salah satu penggerak perekonomian kota.

Tujuan : Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan,

akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan *good governance* diperlukan peran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan masyarakat berpartisipasi aktif maka segala hal/tindakan yang berindikasi negatif dapat dicegah atau diatasi.

Pengembangan pelayanan publik yang prima harus diawali dengan adanya fungsi dasar yang harus dimiliki organisasi yaitu pemasaran, operasional dan finansial. Atas fungsi dasar tersebut dikembangkan *core skill* yang saling terkait dengan fungsi-fungsi yang lain. Beberapa substansi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana hal ini sudah biasa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Core skills*, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki perangkat birokrasi baik menyangkut profesionalisme individu maupun kolektif untuk mengantisipasi perubahan teknologi dan pasar secara kompetitif;
2. *Echnicians*, adalah kemampuan birokrat untuk menguasai aspek teknis secara profesional di bidang pekerjaan sehingga menunjukkan kinerja yang penuh rasa tanggung jawab (*responsibility*);
3. *Management*: kemampuan birokrat untuk dapat mengelola pekerjaan secara profesional baik menyangkut kinerja individual, kinerja tim maupun aspek managerial dan leadership;
4. *Business knowledge*, tuntutan terhadap pemahaman pengetahuan bisnis khususnya menyangkut nilai-nilai keuntungan (*privit making*) yang perlu diadopsi kesektor publik dengan tidak mengabaikan aspek pemertaan dan keadilan;
5. *Skill*, ketrampilan khusus yang harus dimiliki oleh setiap aparatur khususnya menyangkut bidang pekerjaannya, termasuk penyesuaian terhadap proses perubahan;
6. *Habits*, membiasakan bekerja secara profesional dengan tidak mengabaikan aspek etika dan moral sehingga akan tercipta kultur kinerja yang kondusif;
7. *Cohesion*, membiasakan bekerja secara sistemik atau keterpaduan antara berbagai komponen yang terlihat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama;

8. *Collective Experience*, menjadikan pengalaman individu atau kelompok tentang keberhasilan atau kegagalan dalam bekerja sebagai pengalaman bersama;
9. *Knowledge of environment*, menyadari terjadinya perubahan setiap saat dalam suatu lingkungan sehingga pengetahuan tentang lingkungan untuk mengantisipasi perubahan sangat diperlukan;
10. *Technology*, diperlukan penguasaan teknologi sebagaimana persyaratan penting karena menguasai teknologi dapat diibaratkan menguasai dunia dan perubahan.

Selanjutnya dalam mewujudkan ***tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima*** diperlukan inovasi dalam pemanfaatan teknologi guna mendukung penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif.

Sasaran dari tujuan diatas adalah **Tata Kelola Pemerintahan yang baik**. Target dari sasaran ini yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 berdasarkan rancangan awal RPJMD 2016-2021 yaitu:

- a. Opini Laporan Keuangan di targetkan WTP pada tahun 2017 atau sama dengan posisi pada tahun 2015 yaitu WTP. Dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan taat azas;
- b. Indeks persepsi korupsi ditargetkan 6.62% pada Tahun 2017 dengan posisi yang sama pada tahun 2015 sebesar 6.62%;
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan mencapai 79.56% pada tahun 2017 atau meningkat sebanyak 0.2% dari tahun 2015 sebesar 79.36%;
- d. Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan meningkat 1 angka pada tahun 2017 menjadi 83 point dari tahun 2015 sebesar 82 point.

Tabel. 4.26. Capaian Kinerja Indikator Program Tujuan Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima

Indikator	Realisasi SKPD	Target SKPD	Target SKPD	Realisasi SKPD	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Persepsi Korupsi	6.62	-	6.62	-	6.70
Indeks Kepuasan Masyarakat	79.36	-	79.56	-	79.76
Indeks Profesionalitas ASN	82	-	83	-	84

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan

Strategi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Strategis Pengelolaan Keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan taat azas didasarkan pada pendekatan dengan cara meningkatkan SDM pengelola keuangan dan aset, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan meningkatkan Pendapatan Daerah. Diharapkan dengan pendekatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelola keuangan dan aset daerah, yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan Opini Laporan Keuangan (WTP) serta meningkatkan pendapatan daerah guna menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian di Kota Balikpapan. Capaian dan target Strategi Pengelolaan Keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan taat azas yang akan dicapai pada RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 4.27 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Pengelolaan Keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien dan taat azas

Indikator	Realisasi Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Target Renstra SKPD	Realisasi Renstra SKPD	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
1 % Serapan pelaksanaan APBD	84,73 %	84,73 %	90 %		
2 % PAD terhadap APBD	25,96 %	25,96 %			
3 % Pengamanan Aset			38 %		38 %

Sumber: BPKAD Kota Balikpapan

2. Pengintegrasian Sistem Manajemen di Seluruh SKPD

Pengintegrasian Sistem Manajemen di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) guna meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informatika khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi eksisting pada tahun 2015 terdapat 42 sistem yang belum terintegrasi, dan di targetkan pada tahun 2017 terdapat 5 sistem yang telah terintegrasi;

Kelima sistem yang akan diintegrasikan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- d. Administrasi Kependudukan; dan
- e. Perizinan dan Investasi.

3. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis *meritsystem* untuk mewujudkan ASN yang professional;

- a. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan pada tahun 2017 ditargetkan 95%, meningkat 0.67% dari tahun 2015 sebesar 94.33%;
- b. Persentase aparatur yang memiliki pendidikan formal sesuai syarat jabatan pada tahun 2017 ditargetkan 88%, meningkat 2.43% dari tahun 2015 sebesar 85.57%;
- c. Persentase tingkat pelanggaran disiplin aparatur pada tahun 2017 ditarget 0.20% ,turun 0.03% dari tahun 2015 sebesar 0.23%;
- d. Sistem Pemberian Kesejahteraan PNS berbasis Kinerja ditarget pada pada tahun 2017 sudah memiliki 1 sistem manajemen pemberian

kesejahteraan PNS berbasis kinerja;

- e. Persentase aparatur yang memiliki pendidikan dan pelatihan sesuai syarat jabatan pada tahun 2017 ditargetkan 72%, meningkat 7.54% dari tahun 2015 sebesar 64.46%;

Tabel. 4.27 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis *merit system* untuk mewujudkan ASN yang professional

Indikator	Realisasi SKPD	Target SKPD	Target SKPD	Realisasi SKPD	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan	94.33	95**	95	95**	96
Persentase tingkat pelanggaran disiplin aparatur	85.57	86**	88	86**	89
Persentase tingkat pelanggaran disiplin aparatur	0.23	0.21**	0.20	0.21**	0.17
Sistem pemberian kesejahteraan PNS berbasis kinerja	0	0	1 Sistem	0	0
Persentase Aparatur yang memiliki pendidikan dan pelatihan sesuai syarat jabatan	64.46	67**	72	67**	79

Sumber: BKD Kota Balikpapan

4. Penerapan Pelayanan Publik Berstandar Internasional;

- a. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perizinan serta standarisasi pelayanan perizinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha;
- b. Peningkatan dukungan Pelayanan Publik.
- 1) Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum.
Pada tahun 2017 tidak dilaksanakan pemilihan umum baik PILPRES, PILEG, PILGUB maupun PILKADA, pelaksanaan pemilihan Gubernur dilaksanakan pada Tahun 2018 ditargetkan 60% atau sama dengan posisi pada tahun 2015;
 - 2) Persentase Pelayanan Kedinasan, ditargetkan 100% pada 2017 atau sama dengan posisi pada tahun 2015;
 - 3) Penyebaran Informasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, ditargetkan 100% pada 2017 atau sama dengan

posisi pada tahun 2015;

- 4) Persentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah;
- 5) Jumlah Publik Hearing yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan pada tahun 2017 ditargetkan 100 kali.

Tabel. 4.27 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis *merit* system untuk mewujudkan ASN yang professional

Indikator	Realisasi SKPD	Target SKPD	Target SKPD	Realisasi SKPD	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	-	59.3	-	59.3	60
Persentase Pelayanan Kedinasan	100	100	100	100	100
Penyebaran Informasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah	100	100	100	100	100
Persentase Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah	100	100	100	100	100
Jumlah Publik Hearing yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan	100	100	100	100	100

5. Sinkronisasi Produk Hukum

- a. Persentase Ketepatan agenda sidang dtargetkan 100% pada tahun 2017;
- b. Persentase Program Legislasi Daerah yang diharmonisasi ditargetkan pada tahun 2017 sebesar 10 Peraturan Daerah.

Tabel. 4.28 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Sinkronisasi Produk Hukum

Indikator	Realisasi SKPD	Target SKPD	Target SKPD	Realisasi SKPD	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
Persentase Ketepatan agenda sidang	-	100	100	100	100
Persentase Program Legislasi daerah yang di harmonisasi	-	10	10	10	10

6. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
- Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Sarpras dan Pengembangan Kota pada Tahun 2017 di targetkan 100%;
 - Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi pada tahun 2017 ditargetkan 100%;
 - Persentase Pencapaian kinerja periode tahun pertama RPJMD 2016-2021 sebesar -

Tabel. 4.29 Capaian Kinerja Indikator Program dengan Strategi Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Indikator	Realisasi SKPD	Target SKPD	Target SKPD	Realisasi SKPD	Proyeksi
	Tahun 2015 (n-2)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2017 (n)	Tahun 2016 (n-1)	Tahun 2018 (n+1)
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Sarpras dan Pengembangan Kota	75%	75%	80%	-	83%
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi	75%	75%	80%	-	83%
Persentase Kesesuaian Dokumen Bid. Statistik, Pembiayaan dan pelaporan	-	-	20%	-	40%

Sumber: Bappeda Kota Balikpapan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017

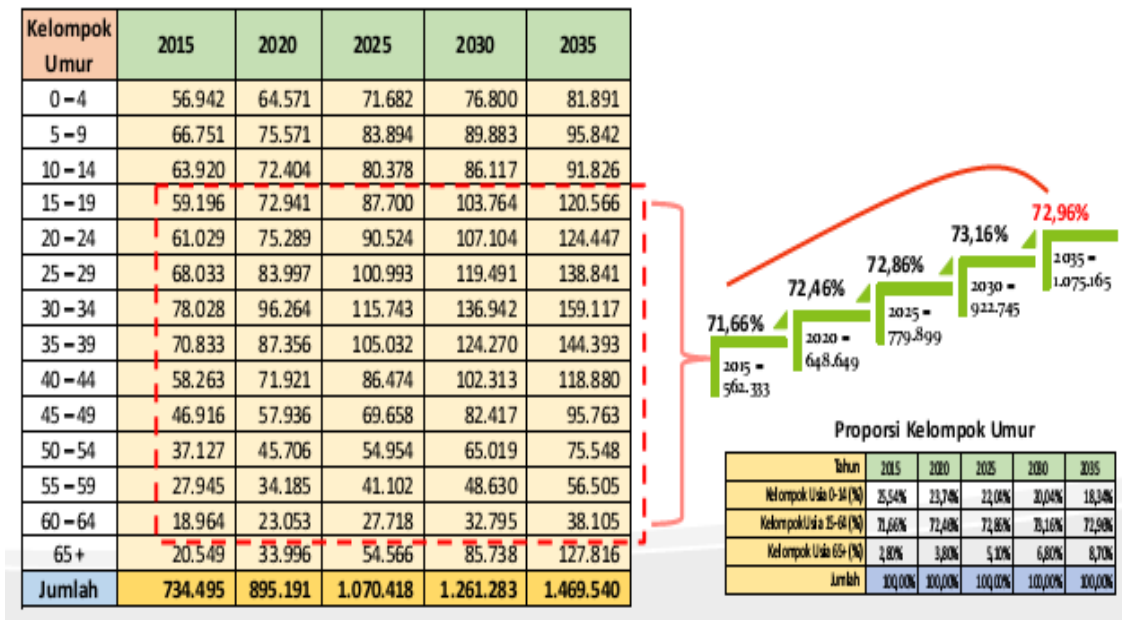
Prioritas pembangunan Kota Balikpapan yaitu:

1. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi merupakan inti dalam pembangunan aparatur negara. Reformasi birokrasi tidak hanya dalam bentuk penyempurnaan organisasi birokrasi pemerintah, namun juga mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pada level mikro, meso dan makro. Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional.

2. Pengendalian kuantitas penduduk.

Mengutip *Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus Demografi di Kota Balikpapan* (Bappeda Kota Balikpapan, 2015); telah dilakukan proyeksi penduduk Kota Balikpapan sampai tahun 2035. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa bonus demografi sejatinya sudah dimulai tahun 2015, yang ditandai dengan tingginya kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yaitu sebesar 562.333 jiwa atau 71,66% pada tahun 2015. Berikut ini disajikan hasil proyeksi penduduk Kota Balikpapan:



Gambar 3.1

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber: Strategi Antisipasi dan Pendayagunaan Bonus Demografi di Kota Balikpapan, Bappeda, 2015

Ditinjau dari kelompok umur dan jenis kelamin, hasil proyeksi menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan dari tahun 2015-2035 didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun 2015 sebanyak 382.491 jiwa (52,08%) hingga tahun 2035 sebanyak 762.881 jiwa (51,91%), sedangkan penduduk perempuan pada tahun 2015 sebanyak 352.004 jiwa (47,92%) dan sampai tahun 2035 sebanyak 706.658 (48,09%).

3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Daerah.

Angka beban tanggungan (*dependency ratio*) Kota Balikpapan 38,38 persen (2013) menjadi 39,49 persen (2014). Rasio ketergantungan Kota Balikpapan jauh berada di bawah titik terendah Indonesia yang diproyeksikan akan menjadi 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031 (RPJMN 2015-2019). Artinya, pada saat ini pun di Kota Balikpapan telah terjadi perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia

(*human capital*). Agar dapat memanfaatkan secara optimal “bonus demografi” yang sejatinya telah dirasakan oleh Kota Balikpapan, maka sangat perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar “bonus demografi” yang sudah ada dapat benar-benar didayagunakan secara optimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4. Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*)

Pembangunan ekonomi Kota Balikpapan selama ini ditopang oleh industri pengolahan, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 57,67%. Sub sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar adalah industri batubara dan pengilangan migas, dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 53%. Artinya lebih dari 50% pembangunan ekonomi di Kota Balikpapan ditopang oleh industri batubara dan pengilangan migas. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat saat ini dan diperkirakan beberapa tahun kedepan harga komoditas, termasuk batubara dan migas akan mengalami penurunan, yang berimbas pada terbatasnya ketersediaan bahan baku industri pengolahan. Untuk itu, perlu strategi untuk penyediaan bahan baku dan mengoptimalkan sub sektor yang berpotensi untuk dioptimalkan, misalnya industri agro dan industri pengolahan karet. Industri agro di Kota Balikpapan cukup menjanjikan dikarenakan permintaan hasil produk industri agro cukup tinggi di Kota Balikpapan, dan industri pengolahan karet merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan, dikarenakan melimpahnya ketersediaan bahan baku. Produksi karet di Kota Balikpapan setiap tahunnya rata-rata 2000-4000 ton (tahun 2010-2013). Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada Tahun 2013, jumlah produksi karet di Kota Balikpapan mencapai 2.322 ton (peringkat 4) atau diatas Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Hulu dan Kota Samarinda.

Jika dilihat dari sektor pariwisata, yang merupakan salah satu sektor andalan Kota Balikpapan Pariwisata memiliki peluang untuk dapat berkiprah dalam persaingan perdagangan bebas MEA. Namun yang perlu dioptimalkan adalah peningkatan pengelolaan objek wisata

yang selama ini masih belum optimal, dan hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kunjungan wisatawan ke objek wisata tersebut, misalnya Kebun Raya Balikpapan yang pada tahun 2014 kunjungan wisatawan baru mencapai 654 orang. Selain itu, di era perdagangan bebas MEA diperkirakan akan banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Balikpapan, tentunya jasa usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata perlu dipersiapkan secara matang, terutama menyangkut masalah kompetensi dan sertifikasi. Selanjutnya jika dilihat dari ketersediaan jasa usaha bidang pariwisata di Kota Balikpapan sudah **cukup mumpuni** untuk bersaing dikancah perdagangan bebas MEA. Namun yang perlu mendapat perhatian serius adalah seberapa banyak usaha bidang pariwisata tersebut yang sudah bersertifikasi. Jumlah usaha bidang pariwisata yang bersertifikasi **masih sangat terbatas**, bukan hanya terjadi di Kota Balikpapan, namun terjadi disebagian kota besar di Indonesia. Selain dihadapkan pada jasa usaha yang belum bersertifikasi, tantangan terberat lainnya adalah masih minimnya tenaga kerja bidang pariwisata yang memiliki sertifikat kompetensi.

5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (*green city*)

RPJPD Kota Balikpapan 2005-2025 telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan harus menyediakan fasilitas fisik dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sektor infrastruktur terdiri atas prasarana transportasi, sumber daya air, listrik dan prasarana permukiman.

Mengutip LAKIP Kota Balikpapan, panjang jalan kota yang dibangun mencapai 6,86 km (2012), 7,9 km (2013) dan 12,69 km (2014). Panjang jalan yang ditingkatkan mencapai 3,9 km (2012), 32,8 km (2013) dan 23,243 km (2014). Panjang jalan yang dipelihara 518 m (2012), 625,8 m (2013) dan 5.570,17 m (2014). Sementara itu, jumlah angkutan umum yang tersedia pada tahun 2014 mencapai 1.887 unit. Upaya untuk menyediakan angkutan umum yang representatif mutlak dilakukan dengan mempercepat realisasi SAUM yang berbasis BRT (*Bus Rapid Transportation*). Keberadaan BRT diharapkan dapat mengurangi jumlah angkutan umum non BRT yang beroperasi sehingga dapat mengurangi polusi udara. Peningkatan daya tampung

jalan melalui peningkatan ruas jalan kota serta pembangunan jalan kolektor sekunder serta penataan dan pembangunan kantong-kantong parkir untuk mengurangi kemacetan sesuai dengan perencanaan ruang perlu dilakukan secara konsisten.

6. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana

Degradasi lingkungan hidup menjadi isu krusial dalam pengelolaan Kota Balikpapan. Keseimbangan lingkungan yang terganggu dapat memicu berbagai bencana. Berdasarkan data bencana yang terjadi, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, telah terjadi 220 kejadian kebakaran bangunan, 245 kejadian kebakaran lahan/hutan, 131 kejadian banjir, 66 kejadian longsor dan 23 kejadian angin putting beliung (LAKIP BPBD 2014, diolah). Mengingat frekuensi bencana yang relatif tinggi, maka Sistem Informasi Peringatan Dini Kejadian Bencana menjadi mutlak dibentuk. Mengacu pada LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sistem tersebut belum terbentuk sampai dengan tahun 2015, dan direncanakan baru akan terbentuk pada tahun 2016.

7. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Menjelang berakhirnya *Millennium development Goals* (MDG'S) tahun 2015, Sebanyak 193 pemimpin dunia menghadiri *Sustainable Development Summit* pada 25-27 September 2015, di Markas Besar PBB, NewYork, AS. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dunia menyatakan komitmennya untuk menyukseskan 17 (tujuh belas) *goals* dan 169 target dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) demi mencapai tiga tujuan utama pada 15 tahun yang akan datang, tepatnya pada 2030 sebagai kelanjutan dari MDG'S. Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tersebut diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, telah menyepakati untuk mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDG) untuk periode 2015-2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan segera menggantikan *Millennium Development Goals* (MDGs), yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir. Dokumen SDG terdiri dari 17 tujuan (*goals*) terbagi menjadi 169 target dan sekitar

300 indikator. Ukuran atau indikator ini sesuai kebutuhan masing-masing negara dan masih dalam proses pembahasan.

Adapun 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) untuk periode 2015-2030, sebagai berikut:

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun (7 target);
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (8 target);
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (13 target);
- 4) Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang (10 target);
- 5) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (9 target);
- 6) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (8 target);
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang (5 target);
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang (12 target);
- 9) Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi (8 target);
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara (10 target);
- 11) Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan (10 target);
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (11 target);
- 13) Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (5 target);
- 14) Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan (10 target);

- 15) Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati (12 target);
- 16) Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan (12 target);
- 17) Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (19 target).

Tabel 4.30
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Balikpapan

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kondisi Eksisting Tahun 2015 Realisasi	Tahun 2017 Target
1. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini Akuntan Publik	WTP	WTP
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	% Serapan pelaksanaan APBD	84,73 %	85%
		% PAD terhadap APBD	25,96 %	21,5 %
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Penurunan hasil pengawasan internal		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	% Pengamanan Aset		38%
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	0.00	0.00

	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur	% aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan	94.33	95		
		% aparatur yang memiliki pendidikan formal sesuai syarat jabatan	85.57	88		
		% tingkat pelanggaran disiplin aparatur	0.23	0.20		
		% Implementasi rumusan kebijakan dan sistem tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan pegawai ASN	0	1 Sistem Aplikasi		
	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	%aparatur yang memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai syarat jabatan	64.46	72		
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	-	-		
		% Fasilitasi Pelayanan Kedinasan	100	100		
% Penyebaran informasi kegiatan walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah		100	100			

	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	% Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah		
		Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan	80	80
		% Ketepatan agenda sidang	100	100
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga		100%
		Cakupan Penerbitan KTP-elektronik		94%
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		80%
		Cakupan penerbitan akta kematian		95%
		Cakupan kepemilikan kartu identitas anak		60%
	Program Penataan peraturan perundang-undangan	% Program Legislasi daerah yang di harmonisasi	-	10
	Program Bantuan Hukum	Prosentase Perkara yang Ditangani	-	100%
Perencanaan Pembangunan Bid. Sarpras dan Pengembangan Kota	% Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bid. Sarpras dan Pengembangan Kota		75%	

	Perencanaan Pembangunan Bid. Sosial Budaya dan Ekonomi	% Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi	-	100%
	Pengendalian, Litbang, dan Pembiayaan Pembangunan	% Pencapaian kinerja RPJMD		20%
2. Pengendalian kuantitas penduduk	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	98.11%	98.25%
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	92.80%	98%
		AKB	6/1.000 KH	5/1.000 KH
		AKABA	7/1.000 KH	6/1.000 KH
		AKI	72/100.000 KH	72/100.000 KH
	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV dan AIDS	0.03	< 1
		Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk	348,46/ 100.000	300/ 100.000
		Prevalensi TBC	122,3/ 100.000	125/ 100.000

	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	% Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	0%	74.07%	
		% Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	50%	65%	
		% Pemenuhan SDM RS	60%	70%	
3. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Daerah	Program pendidikan non formal	Angka Melek Huruf	99.88%	99.90%	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Judul Koleksi Buku	20,254	33,725	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	PAUD/TK/ Sederajat	55,24%	76,00%	
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK	42.16	40.05	
	Program Pendidikan Dasar	SD/MI/Sederajat (IPTEK)	6.60	6.60	
		SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	19.44	19.44	
		SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	57.62	100	
		SMP/MTs/Sederajat (IMTAQ)	40	100	

		APK SD/MI/Sederajat	112,65%	93.05%
		APK SMP/MTs/Sederajat	103,38%	84.05%
		APM SD/MI/ Sederajat	96.39%	96.50%
		APM SMP/MTs/ Sederajat	86.59%	87.59%
		APS SD/MI/ Sederajat	93.37%	94.37%
		APS SMP/MTs/ Sederajat	84.29%	85.29%
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.02%	0.02%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.20%	0.19%
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	101.84%	103.68%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96.30%	98.11%
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SD/MI/ Sederajat	26.81	26.81
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat	20.57	20.57

		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	10.10%	11.13%
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	25%	37.70%
Program Pendidikan Menengah		APK SMA/SMK/MA/ Sederajat	83.17%	78.05%
		APM SMA/SMK/MA/ Sederajat	67.38%	68.38%
		APS SMA/SMK/MA/ Sederajat	78.03%	79.03%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.06%	0.05%
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%
		Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat	17.52	17.52
		Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	26.31%	29.84%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV		
		SD/MI/ Sederajat	2,848	2,888
		SMP/MTs/ Sederajat	526	533
		SMA/SMK/MA/		

		Sederajat	1,285	1,325
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata		
		PAUD/TK	1 : 100	1 : 100
		SD/MI/Sederajat	1 : 27	1:26
		SMP/MTs/Sederajat	1 : 18	1 : 18
		SMA/SMK/MA/Sederajat	1 : 14	1 : 14
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang terserap di dunia kerja baik dalam negeri maupun luar negeri	408 Orang	80 Orang
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	176 Kasus	75 Kasus
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	% Angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri (wirausaha)	125 Orang	60 Orang
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	% Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	63.87%	65%

	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan		% Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	100%	100%
	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial		% PMKS miskin yang terlayani	100%	100%
	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perumahan		% Rumah Tangga miskin yang memiliki sarpras dasar rumah sehat	24 Rumah	10 Rumah
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial		% PMKS uang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	78.80%	78.90%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase PSKS yang telah dibina	26.59%	49.08%
	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan		% Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN	100%	100%
	Program Keluarga Berencana		Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) Meningkat 0,5 %	65.59	66.00

		Proporsi Wanita Usia Subur dalam Status Kawin Yang Tidak Menggunakan KB Meski Mereka Nyatakan	13.76	12.10
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Jumlah Institusi Masyarakat pendukung program KKBPK Meningkatkan (BKB sebanyak 2, BKL sebanyak 1, BKR sebanyak 2, UPPKS sebanyak 1)	195.00	204.00
		Jumlah Kelompok Remaja Pendukung Program KKBPK (PIK R/M) meningkat menjadi 4 PIK R/M	35	36
		Prosentase Penyelesaian Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	78.57	80.2
		Fasilitasi Peran Koordinasi Gugus Tugas Perwujudan Balikpapan Sebagai Kota Layak Anak (Peringkat perolehan penilaian KLA)	Pratama	Pratama

4. Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (green economy)	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	15%	17%	
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	852 IKM	872 IKM	
	Program penataan struktur industri	Prosentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT)			
		KIK		19%	24%
		SIKS		50%	65%
		SIKT		0%	5%
		jumlah Industri yang beroperasi (SIKS & SIKT)		75	14
		persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal		7%	5%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah KUKM yang bermitra dengan perusahaan		50 UMKM	125 UMKM	
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi aktif		77.6%	78.7%	

	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		Jumlah kredit UMKM dari Bank (Rp)	Rp 8,333,935,000,000	Rp 9,188,163,337,500
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	60	60
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		skor Pola Pangan Harapan (PPH)	10.53%	20%
			Laju Inflasi	6,26	5 (+- 1)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		Nilai ekspor bersih (dollar)	1,513,326,496.08	1,970,800,750
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Cakupan unit usaha dagang	473	100
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		% pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	26%	30%
			% Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang	50%	61%

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	% pasar berklasifikasi A	-	11%
	Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	Nilai pasar terhadap penilaian adipura	70,63	71,5
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	2,253,943	2,299,022
	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	28 destinasi	30 destinasi
	Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata	Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan	5 obyek wisata	7 obyek wisata
	Program pengembangan kemitraan	Jumlah asosiasi yang bermitra	5 asosiasi	6 asosiasi
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rencana investasi (Triliun)	90.21	10 T

	Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	% tingkat kepatuhan perizinan usaha	50%	65%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Realisasi Investasi (Triliun)	28.47	10T
	Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	IKM pelayanan perizinan	87,59	88,5
	Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	% sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online	6%	17%
	Peningkatan produksi pertanian Dalam Arti Luas	Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	93,613	1,017
		Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	5,499.91	284.08
		Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)	16,388.21	1,638.82
		Jumlah peningkatan produksi perikanan	5,046	152.8

			(ton)(ton)	5,046.0	152.8
	Program Pemanfaatan Biomassa		Pemanfaatan Biomassa (unit)	-	179%
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		% PJU yang menggunakan LED		30.20
			% PJU yang menggunakan meterisasi		38.33
5. Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan		1.436
	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan --> hubungan dengan terminal ...eksisting batu ampar, kebutuhan: barat, batu ampar, timur, selatan, angkutan barang		Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek		20%
	Program peningkatan		Jumlah Koridor SAUM		1 koridor

	pelayanan angkutan		Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek		96%
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		% Kemantapan Jalan		79.15%
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		Persentase penyediaan rambu jalan		27.30%
			Persentase Penyediaan Titik Zona Aman Sekolah		22.22%
	Program pengendalian banjir		Menurunnya Titik Banjir		47
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik		44.09%
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar bagi warga berkebutuhan khusus		7.29%
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		Rasio Penyediaan Jalur Sepeda		7.32%

	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor (Jumlah Kendaraan yang diuji/Kendaraan Wajib Uji)		60%
	Program Penerangan Jalan Umum	Pembangunan PJU	11539	12239
		Peningkatan Kualitas PJU (Lampu LED)	9.21%	39.49%
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor pemerintah dalam kondisi baik	72.58%	77.42%
6. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana	Program Perencanaan Tata Ruang	Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)		1 Perda RDTR
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penertiban pemanfaatan ruang (jumlah penertiban/jumlah pelanggaran x100%)		98.1%
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	indeks tutupan lahan (hutan lindung, hutan kota, mangrove, RTH, hutan wisata, taman dan jalur hijau)		61.49

	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Indeks Pencemaran Udara	91.84
		Penurunan Indeks Pencemaran Air	41.30
		% Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya (total DAS 42)	45.24%
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan (Laporan yang ditangani/laporan masuk)	100.00%
		Informasi Lingkungan yang mudah diakses	1
		Persentase Sekolah Adiwiyata (jumlah sekolah adiwiyata/jumlah sekolah)	48.96%
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan ((sampah terangkut+sampah olahan 3R)/total timbulan sampah)	84.72%
		Persentase pengangkutan sampah ke TPA ((jumlah yang diangkut / timbulan sampah)x100%)	62.91%

		Persentase pengolahan sampah di sumber (sampah yang diolah secara 3R/jumlah timbulan sampah) --> asumsi dari DKPP timbulan sampah per tahun 2015 adalah 211619 ton/tahun		21.80%
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh		277 Ha
	Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan		49.00%
		Rumah Tidak Layak Huni		1035
		Rasio Rumah Tidak Layak Huni/Jumlah Rumah (alternatif perlu di konsultasikan)		
	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Kapasitas Air Baku (liter/detik)		1,480.00
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Minum (%)		78.40%
		Cakupan Layanan Air Limbah		93%

	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran (Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) --> respon di bawah <15 menit / jumlah kejadian)		90.10%
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran		62.50%
	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		95%
	Program Sarana dan Prasarana Logistik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana		95%
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh		60%
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	% poskamling aktif (jumlah Poskamling yang ada 761 dan yang aktif berjumlah 370 sehingga prosentase yang aktif adalah $370/761 \times 100\% = 48,62$)		48.82

	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Penurunan Angka Kriminalitas		20
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Rasio Petugas Linmas (Jumlah Linmas di bagi jumlah RT, sesuai dengan SPM Kementerian Dalam Negeri setiap RT wajib memiliki satu orang petugas Linmas)	2,4%	3,5%
			Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	-	-
	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika		Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba	3.23	3.3
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Peningkatan jumlah pemuda berprestasi		45
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Peningkatan prestasi olahraga		6 Cabor Tk Provinsi 18 Cabor Tk.Nasional
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga		91.07%

	Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya	Peningkatan event kebudayaan		14 Event (luar 6; Dalam 8)
		Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	4	6
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Nilai Potensi swadaya masyarakat (Dalam Milyaran Rupiah)	89,32	91,50
	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Peningkatan jumlah inovasi daerah		11
7. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)				

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi:

1. Program Prioritas I:

Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah.

2. Program Prioritas II:

Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta indikatornya.

3. Program Prioritas III:

Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan Rancangan Awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD, masing-masing program diuraikan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya apabila terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;

3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada Rancangan awal RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran RKPD Tahun 2017 ini.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2017 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stake holder) melalui Forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Balikpapan ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kota Balikpapan, juga diusulkan ke APBD Propinsi Kalimantan Timur dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN.

Keberhasilan pembangunan di Kota Balikpapan selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kota Balikpapan juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat Kota Balikpapan sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Kota Balikpapan menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Balikpapan Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan tahun 2017, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, APBD Provinsi Kalimantan Timur maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat;
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut direncanakan berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004